

BUKU BACAAN SOSIAL DEMOKRASI 2

Simon Vaut dkk

Ekonomi dan Sosial Demokrasi



AKADEMI
FÜR
SOSIAL
DEMOKRASI

FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG

BUKU BACAAN SOSIAL DEMOKRASI 2

Simon Vaut dkk

Ekonomi dan Sosial Demokrasi

BUKU BACAAN SOSIAL DEMOKRASI 2
Ekonomi dan Sosial Demokrasi
Penulis : Simon Vaut dkk



Diterjemahkan dari versi asli Bahasa Jerman
"Lesebuch der Sozialen Demokratie 2 :
Wirtschaft und Soziale Demokratie"

Penerbit: Friedrich-Ebert-Stiftung Divisi Akademi Politik Bonn, Januari 2009.
Redaksi : Jochen Dahm, Tobias Gombert, Christian Krell, Alexander Petring, Thomas Rixen
Percetakan: Druckerei Brandt GmbH, Bonn; Desain dan Tata Letak: DIE PROJEKTOREN, Berlin;
Foto Sampul: Nyul/Hans12/Chesse

Penerjemah versi Indonesia : Dr. Ivan A. Hadar
Penyelaras versi Indonesia: Dormiana Yustina Manurung
Penerbit: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730
T: +62-21-7193711
F: +62-21-71791358
Email: info@fes.or.id
Website : www.fes.or.id

Cetakan I, 2014
ISBN : 978-602-8866-08-8

Isi publikasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya para penulis per bab. Pernyataan yang dikemukakan, tidak mesti sepenuhnya sesuai dengan pendapat Friedrich-Ebert-Stiftung

Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk dan/atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjual belikan

ISI BUKU

Prakata	6
1. Pengantar	8
2. Dasar Teori Ekonomi	11
2.1. Adam Smith –Pencetus Liberalisme Ekonomi	14
2.2. Karl Marx – Kritik Kapitalisme	19
2.3. John Maynard Keynes: Mengarahkan Kapitalisme	25
2.4. Tipe-tipe Ideal Teori Ekonomi	30
2.5. Ekonomi Saat Ini	33
3. Berbagai Sistem dan Tata Ekonomi	43
3.1. Kapitalisme dan Demokrasi	43
3.2. Kapitalisme Terkoordinasi dan Kapitalisme Bebas	47
3.3. Bingkai Persyaratan Baru Globalisasi	52
4. Orientasi Ekonomi-Politik Sosial Demokrasi	56
4.1. Nilai-nilai Dasar	56
4.2. Hak-hak Dasar	59
4.3. Prinsip-prinsip Ekonomi-Politik	66
4.4. Ekskursus: Mengukur Pertumbuhan Kualitatif	75
5. Perbandingan Program Ekonomi Partai Politik	77
5.1. Program Hamburg –Program Dasar Partai Sosial Demokrasi Jerman SPD)	78
5.2. Landasan Utama Bagi Jerman - Program CDU	82
5.3. „ Masa Depan adalah Hijau“ –Program Dasar dari Bündnis 90/Die Grünen	84

5.4. „Landasan Utama Wiesbaden“ dari FDP	87
5.5. „Simpul Program“ dari Partai „Die Linke “	89
5.6. Penilaian Program menurut Sudut Pandang Sosialdemokrasi	92
6. Tatanan Ekonomi: Model Beberapa Negara	95
6.1. Amerika Serikat	95
6.2. Britania Raya	100
6.3. Jerman	106
6.4. Jepang	114
6.5. Swedia	121
7. Kebijakan Ekonomi: Contoh Konkret	128
7.1. Kebijakan Ekologis Industri: Kebijakan Pertumbuhan bagi Masa Depan Berkelanjutan	129
7.2. Kebijakan Anggaran: Apa Utang Kita Kepada Jerman	134
7.3. Risiko dan Kesempatan Swastanisasi	139
7.4. Bekerja yang Layak dan (Partisipasi dalam) Pengambilan Keputusan: Kebijakan Pekerjaan yang Layak	145
7.5. Debat tentang Upah Minimum	153
8. Berpikir ke Depan	160
Daftar Pustaka	161
Penulis	164

PRAKATA

Bagaimana caranya agar sebuah kebijakan ekonomi moderen Sosial Demokrasi (sosdem) bisa berhasil? Prinsip-prinsip apa saja yang menjadi dasarnya? Bagaimana sebuah kebijakan ekonomi sosdem bisa adil bagi masyarakat dan pasar? Teori apa saja yang mendasari kebijakan ekonomi sosdem yang bertumpu pada nilai-nilai kebebasan, keadilan dan solidaritas ini? Bagi siapa saja, yang secara politis ingin terlibat serta berperan aktif, pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat menentukan. Karena, hanya mereka yang tahu kemana arah tujuannya, bisa memenangkan pendukung bagi ide dan tujuan politik yang ditawarkan.

Kalimat tersebut, menjadi sangat tepat dalam waktu yang bergejolak seperti saat ini. Ketika penulisan Buku Bacaan “Ekonomi dan Sosial Demokrasi” dimulai, wacana ekonomi-politik berbeda dibandingkan saat ini. Krisis pasar uang telah mengubah banyak hal. Kemana semua itu akan berujung, masih belum jelas. Pastinya, semakin bergolak air laut, semakin penting memastikan arah berlayar ‘kapal’ kita.

Buku ini bermaksud untuk memberikan kontribusi dalam memastikan arah yang dituju. Dalam buku ini, dijelaskan berbagai teori ekonomi penting serta nilai-nilai pokok dan penentuan orientasi, dengan mengajukan pertanyaan terkait makna dari semua nilai tersebut bagi kebijakan ekonomi sosdem yang konkret. Perlu diingat bahwa buku ini tidak memberikan jawaban komplit yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka dari waktu ke waktu, harus selalu dipertimbangkan kembali serta dicarikan alasan pembenarannya, bagaimana sebuah kebijakan sosdem bisa berhasil. Karena itu, buku ini dimaksudkan bukan untuk memberikan jawaban final, melainkan mengajak pembaca untuk terus berpikir mencari kesempurnaan.

Buku ini adalah yang kedua dari Serial Buku Bacaan Sosial Demokrasi dan berdasar pada Buku Bacaan Landasan Sosial Demokrasi yang telah dipublikasikan Akademi Sosial Demokrasi tahun 2008. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang nilai-nilai dasar Sosial Demokrasi, serta perbandingan model masyarakat Liberal, Konservatif dan Sosial Demokrasi. Selain itu, juga digambarkan perbedaan antara Demokrasi Libertarian dan Sosial Demokrasi serta penelitian terkait prakteknya di beberapa negara.

Ketika perekonomian abad ke-21 akan dibahas, maka berbagai perubahan yang terjadi akibat gencarnya proses globalisasi tidak dapat dilewatkan begitu saja. Serial buku bacaan berikutnya yang juga akan segera diterbitkan adalah buku terkait globalisasi dan sosdem. Pada serial tersebut globalisasi akan dicermati dari sisi pengaruhnya dalam membentuk kerangka tatanan perekonomian. Dan juga akan dianalisis latar belakang globalisasi serta berbagai kemungkinan wujud politisnya.

Bersama ini, kami sampaikan terima kasih yang tulus kepada Simon Vaut dan Tobias Gombert. Simon Vaut telah menulis bagian terbesar buku ini. Atas kerjasama yang sangat luar biasa Tobias Gombert telah memolesnya secara redaksional dan didaktis dengan sangat kompeten. Terima kasih juga kami haturkan kepada Thomas Meyer dan Michael Dauerstädt untuk arahan dan masukan dalam pengembangan konsep buku bacaan ini. Ucapan terima kasih juga dipersembahkan kepada Wilhelm Nölling atas komentarnya yang sangat membantu dan bagi semua penulis atas kerjasama yang prima. Tanpa dukungan mereka, buku yang ada di tangan Anda ini tidak akan berhasil. Apabila ditemukan kesalahan, hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Simbol dari Akademi untuk Sosial Demokrasi, adalah sebuah kompas. Dengan memanfaatkan publikasi dari Akademi ini, Friedrich-Ebert-Stiftung ingin menawarkan sebuah kerangka untuk memperjelas posisi dan orientasi. Kami akan sangat bahagia, bila Anda memanfaatkan usulan-usulan dalam buku ini untuk menentukan jalan politik Anda. Sosialdemokrasi akan bisa hidup secara langgeng bila warga negara secara terus menerus menjadikannya sebagai wacana dan turut terlibat aktif dalam memperjuangkan perwujudan nilai dan tujuannya.



Dr. Christian Krell
Direktur
Akademi Sosial Demokrasi



Jochen Dahm
Kepala Proyek
Serial Buku Bacaan Sosial Demokrasi

1. PENGANTAR

*Kebijakan ekonomi
apa yang sesuai
dengan
sosdem?*

Mantan Kanselir Jerman, Gerhard Schröder, pada tahun 1998 dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa koalisi pemerintahannya tidak berdasar pada kebijakan kiri atau kanan, tetapi pada kebijakan politik ekonomi moderen.

Apakah itu berarti bahwa dalam bidang politik, tidak ada lagi perbedaan antara liberal, konservatif dan sosdem¹? Masihkah ada teori ekonomi sosdem yang dapat membedakannya dengan aliran lain?

Atau pada kenyataannya hanya ada kata “moderen” dan “tidak-moderen alias kuno”? Bila demikian, siapakah yang berani memperdebatkan dan bersedia mewakili politik kuno dan dalam kaitan ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan “moderen”? Pelatih sepakbola Otto Rehgel pernah berpendapat, “Siapa yang bermain bola secara moderen, maka dia akan sukses.” Bila diterapkan dalam politik, berarti siapa yang melaksanakan politik ekonomi moderen, maka dialah yang akan berhasil?

*Apa ukuran
keberhasilan
kebijakan politik
ekonomi?*

Tetapi apa ukuran keberhasilan itu? Ada yang mengatakan, ketika pertumbuhan dan kemakmuran sangat tinggi. Yang lain lebih menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan: dimana sebuah tatanan ekonomi tidak boleh mengarah pada ketidaksetaraan, penindasan dan ketidakadilan. Dan akhirnya ini, semakin banyak pula suara yang menjadikan ekologi serta pemeliharaan sumberdaya yang berkesinambungan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Pertumbuhan tidak boleh mengarah pada pembangunan yang merusak lingkungan alam.

*Keseimbangan
dari pertumbuhan
ekonomi,
pemerataan
sosial dan
keberlangsungan
ekologi*

Nilai-nilai dasar sosdem adalah kebebasan, keadilan dan solidaritas. Secara programatis, dari sudut pandang sosdem, hal tersebut hanya menyisakan satu jawaban. Ketiga prinsip tersebut, pertama pertumbuhan, kedua kesetaraan sosial dan ketiga ekologi yang berkelanjutan, harus diselaraskan satu dengan lainnya.

1 Dalam buku ini digunakan ungkapan kata ganti untuk perempuan dan laki-laki. Dalam bagian lain, di mana karena alasan bahasa digunakan kata ganti umum, tetap yang dimaksud adalah untuk semua, baik perempuan maupun laki-laki.

Namun, jalan ke arah tersebut tidak tergambarkan sebelumnya. Terkait sebuah kebijakan ekonomi yang moderen dan berlandaskan nilai, maka kutipan Gerhard Schroeder di atas secara reflektif, termasuk mempertimbangkan kebijakan politik kiri atau kanan yang klasik, tidak bisa dimanfaatkan sebagai alat konkret. Sebuah kebijakan ekonomi sosdem yang modern dan terkait nilai, terutama harus berorientasi pada hasil. Tujuannya adalah mengupayakan terwujudnya sebuah masyarakat di mana berlaku nilai-nilai dasar kebebasan, keadilan dan solidaritas serta terpenuhinya hak-hak dasar politik, sosial, ekonomi dan budaya secara menyeluruh dan bagi semua.

Buku ini memberikan landasan orientasi atas pertanyaan terkait basis teori ekonomi mana yang bisa dimanfaatkan sosdem, begitu pula dengan sistem dan tatanan ekonomi apa yang mendorong realisasinya, serta bagaimana penerapannya di beberapa negara termasuk permasalahan teoretis dalam upaya mendesain kebijakan.

Tujuan dan sistematika buku bacaan

		Orientasi Ekonomi-Politik Sosialdemokrasi (Bab 4)							
		Demokrasi Liberal			Sosialdemokrasi				
Struktur Tema Buku Bacaan	Isi Buku Bacaan „Landasan Sosialdemokrasi“					Demokrasi Libertarian			
	Isi Buku Bacaan “Ekonomi dan Sosialdemokrasi”								
	Bab 2	Teori	Marx		Keynes		Smith		
	Bab 3.1	Sistem			Kapitalisme				
	Bab 3.2	Tatanan	Otoritarian		Terkoordinasi		Tidak terkoordinasi		
	Bab 6	Negara-negara			Swedia	Jepang	RFJ	Britania Raya	AS
	Bab 5	Perbandingan Program Partai							
	Bab 7	Contoh dari lapangan							

Berikutnya, pada tataran **teori ekonomi** dipaparkan analisis dan kesimpulan para ekonom paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yaitu Adam Smith, Karl Marx dan John Maynard Keynes. Tipe ideal yang diekstrak dari analisis mereka, berupa liberalisme ekonomi, anti kapitalisme dan kapitalisme terkontrol atau terkoordinasi – kemudian dinilai dari sudut pandang mutakhir berdasarkan tujuan Sosdem (Bab 2).

Bab 2: Teori ekonomi

*Bab 3:
Sistem dan Tataan
Ekonomi*

Pada tataran **sistem dan tataan ekonomi**, buku ini menelusuri keterkaitan antara kapitalisme dan demokrasi serta menggambarkan keduanya dalam tataan ekonomi kapitalisme terkoordinasi dan tidak-terkoordinasi di negara-negara industri barat (Bab 3).

*Bab 4:
Orientasi
ekonomi-politik
Sosialdemokrasi*

Pada tataran program ekonomi-politik, di satu sisi berdasarkan saling pengaruh antara nilai-nilai dasar, hak-hak dasar dan prinsip-prinsip kebijakan ekonomi, dikembangkan **Orientasi Ekonomi-Politik Sosial Demokrasi** (Bab 4).

*Bab 5: Program
Ekonomi-Politik
Partai Politik*

Pada sisi lainnya, berdasarkan kriteria tataan ekonomi terkoordinasi dan tidak-terkoordinasi dan orientasi ekonomi-politik sosdem, diperbandingkan partai politik Jerman yang memiliki kursi di parlemen secara programatik berdasarkan program dasar masing masing (Bab 5). Selanjutnya, perbandingan berbagai tataan ekonomi di AS, Britania Raya, Jepang dan Swedia (Bab 6), serta usulan kebijakan konkret dan eksemplaris dalam lingkup ekonomi politik Swastanisasi.

*Bab 6 dan 7:
Model Negara dan
Contoh Penerapan*

Ekonomi politik terkait swastanisasi, selain swastanisasi, kebijakan industri yang ramah lingkungan dan pengambilan keputusan serta upah minimum (Bab 7) ikut melengkapai buku ini.

Pertanyaan terkait kebijakan ekonomi sosdem menyentuh juga berbagai tataran, yang turut disinggung dalam buku ini, terutama pertanyaan tentang apa yang menjadi kelebihan sosdem.

Sebuah jawaban atas pertanyaan tersebut, ditawarkan program dasar SPD, berikut ini:

„Sosial demokrasi tidak hanya menjamin hak-hak sipil, politik dan budaya seseorang, melainkan pada saat yang sama juga menjamin hak-hak sosial-ekonomi setiap insan. Semua itu memperkokoh kesetaraan sosial bagi semua dalam proses demokratisasi, terutama berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sebagai hak warganegara yang didukung oleh negara kesejahteraan yang mengayomi lewat ekonomi pasar yang terkoordinir. Demokrasi dijamin memperoleh tempat di atas Pasar.“ (Program Hamburg2007: 19)

2. DASAR TEORI EKONOMI

Dalam bab ini terdapat:

- deskripsi teori-teori ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah;
- refleksi arti penting teori-teori tersebut untuk masa kini; dan
- penjelasan tentang arti pentingnya teori-teori tersebut bagi sosdem.

“Praktisi yang percaya sepenuhnya bebas dari pengaruh intelektual masa lalu, biasanya adalah budak dari salah seorang ekonom yang telah punah” (Keynes 1966: 323), demikian tulis John Maynard Keynes, salah seorang intelektual ekonomi terpenting dalam sejarah. Dalam bab ini akan dipaparkan dan diperbandingkan landasan teori dari - selain Keynes, juga - ekonom paling berpengaruh lainnya, yaitu Adam Smith dan Karl Marx. Dengan demikian, komplrit pula tiga kutub terpenting dalam teori ekonomi.

Namun, apakah bermanfaat mencermati dunia pemikiran para ekonom yang menuliskan karya-karya mereka bertahun-tahun yang lalu? Apakah pencerahan mereka masih cocok terhadap globalisasi dunia yang terus berubah, atau apakah karya mereka telah di makan waktu dan tidak bisa dimengerti serta terbukti salah?

Mengapa dan bagaimana pula teori-teori tersebut memiliki arti penting bagi sosdem? Semua teori tersebut, setidaknya memiliki arti penting dalam dua hal:

Pertama, dalam banyak hal, semua teori tersebut menjadi „batu kerikil landasan” ideologi (partai) politik. Mengenal berbagai batu landasan ideologi tersebut bisa membantu menguji inti kebenaran argumentasi ekonomi-politikan dengan demikian tidak menjadi „buta” terhadap batu besar (sebagai kumpulan kerikil) ideologi.

Kedua, meski sosdem tidak secara utuh terkait dengan salah satu dari tiga teori ekonomi tersebut, melainkan menempel pada sebuah kerangka besar normatif, kita bisa memperoleh manfaat dari ketiganya meski dengan mengacu secara jelas pada ide sebuah kapitalisme terkoordinasi, seperti yang dipaparkan Keynes.

*Tiga Ekonom besar:
Smith, Marx dan
Keynes*

*Apakah mereka
masih aktual?*

*„Batu kerikil
landasan”*

*Sosialdemokrasi:
membonceng
ketiganya*

Sebenarnya, semua teori tersebut telah banyak dikritik. Banyak upaya untuk meyakinkan publik bahwa teori-teori tersebut telah gagal, juga dianggap telah kadaluarsa, mati – namun secara terus-menerus muncul bukti bahwa yang dianggap mati, hidup lebih lama. Tak seorang pun yang secara mendasar ingin mempelajari ekonomi bisa melupakan ide-ide Smith, Marx atau Keynes.

*Konteks sejarah:
Smith: pertengahan
abad ke-18*

Dalam mempelajari ide-ide para ekonom klasik ini, perlu dicermati konteks sejarahnya. Adam Smith, memformulasikan ide-idenya pada pertengahan abad ke-18 (masa Merkantilisme) menjadi sebuah teori yang memberi pelajaran kepada para bangsawan bahwa sikap mereka yang berlebihan dalam mengontrol perdagangan dan mengarahkan perekonomian, menjadi sesuatu yang sangat mahal. Juga keraguannya terhadap negara dikembangkan lewat pengalamannya dengan para bangsawan yang boros serta melulu memperkaya diri, bukan mengacu pada contoh sebuah negara kesejahteraan modern.

Marx: pertengahan

Sementara kritik Marx atas kapitalisme dengan bahasa yang bombastis, dilakukan pada pertengahan abad ke-19 sebagai jawaban terhadap pemiskinan dan pengusuran rakyat jelata selama masa awal industrialisasidan gelombang globalisasi pertama.

*Abad ke-19
Keynes: Tahun
1930an*

Sedangkan pada tahun 1930an, Keynes melakukan analisis terhadap liberalisme ekonomi yang karut-marut sewaktu terjadinya krisis ekonomi dunia. Karyanya, „Teori Umum terkait Pekerjaan, Suku Bunga dan Uang“ pada hakikatnya adalah sebuah usulan menstabilisasikan sistem perekonomian dalam upaya menghindari munculnya kediktatoran menggantikan demokrasi yang semakin terancam. Dengan terjadinya krisis keuangan dunia pada tahun 2007, pemikiran Keynes mengalami sebuah proses kebangkitan kembali (Renaissance). Baik pertimbangan terkait regulasi pasar uang global maupun program stimulus (lewat investasi negara), kembali diperdebatkan secara luas.

*Konsep lintas waktu
dan gambaran
ekonomi*

Pergumulan dengan pemikiran tiga ekonom besar tersebut, selain memberikan orientasi mendasar juga memiliki keuntungan sangat praktis berikut ini. Banyak gambaran dan penjelasan ekonomi yang, bagi kita, sudah dikenal dan dimanfaatkan tanpa mengetahui dari mana asalnya, sebenarnya berasal atau diwarnai pemikiran tiga ekonom tersebut.

	Smith	Marx	Keynes
Kapan	Pertengahan abad ke-18	Pertengahan abad ke-19.	Tahun 1930an
Penyebab	Merkantilisme, Absolutisme	Industrialisasi dan Kemelaratan buruh	Krisis ekonomi dunia dan Munculnya diktatur
Tujuan utama	Kebebasan dari Negara merkantilistis	Perbaikan kondisi buruh dan pembebasannya dari penindasan	Pengamanan demokrasi lewatstabilisasi perekonomian danpasar lapangan kerja
Keterkaitan bagi Sosaldemokrasi	Kebebasan dan gambaran acuan koperasi	Gambaran acuan dari „kerja yang layak“ dan pertanyaan terkait penyesuaian antara kerja dan modal	Gambaran acuan perekonomian terkoordiniasi dan kebijakan ekonomi aktif (dinamis)

Sebuah gambaran tentang „tangan pasar yang tak terlihat“, diperkenalkan oleh Adam Smith. Hal ini, untuk menjelaskan efisiensi pasar. Kini, sebagian dimanipulasi dalam bentuk penjelasan mitologis di mana pasar bisa melakukan segalanya.

Sebaliknya, siapa yang mengupayakan „pekerjaan yang layak“, mau tidak mau akan mengacu kepada Marx. Marx sangat mewarnai istilah „pekerjaan teralienasi“.

Dari Keynes, ucapan yang seringkali dikutip adalah „dalam jangka panjang, kita semua akan mati“. Dengan ungkapan tersebut, ia menuntut tanggung jawab negara untuk melawan kegagalan pasar. Anjuran Keynes, terutama ditujukan kepada mereka yang percaya – dalam jangka panjang – pasar memiliki kekuatan menyembuhkan, dan tidak setuju pada tanggung jawab negara terkait kebijakan perekonomian.

Smith: „Tangan pasar yang tak terlihat“

Marx: „Pekerjaan yang layak“

Keynes: „Jangka panjang kita semua akan mati“

Bacaan lanjut:

Nikolaus Piper (Ed.) (1996), Die großen Ökonomen: Leben und Werk der wirtschaftswissenschaftlichen Vordenker, Stuttgart.

2.1. Adam Smith – Pendiri Liberalisme Ekonomi

*Smith:
„Kemakmuran
bangsa“*

*Konteks zaman:
merkantilisme pada
pertengahan abad
ke-18.*

*Tujuan Smith:
Mengatasi
merkantilisme*

Karya dasar ekonomi liberal berasal dari buku yang dipublikasikan Adam Smith „Kemakmuran Bangsa“ pada tahun 1776.

Pada saat itu Britania Raya berada pada fase transisi dari merkantilisme menuju kapitalisme (bandingkan Gerstenberger 2006: 40, 57–65, dan Conert 2002: 64).

Dalam era merkantilisme yang berlangsung sejak abad ke-16 hingga abad ke-18, keberhasilan kebijakan perekonomian diukur oleh para bangsawan dan raja dalam bentuk jumlah emas. Perdagangan dipandang sebagai ‘zero-sum-game’:

Ketika ada yang menang, yang lain sepenuhnya kalah. Tidak ada yang namanya saling menguntungkan. Karena itu, bea masuk barang dipatok tinggi, sementara impor sumberdaya alam didukung penuh. Istana mencoba mengatur perekonomian. Hirarki kerajaan diatur sedetil mungkin, siapa yang diijinkan melakukan kegiatan apa dan dalam jumlah berapa barang diproduksi.

Smith menulis “manifesto kapitalis” untuk mendobrak hirarki kaku perekonomian. Idenya menemui lahan subur. Dengan demikian, ia berhasil melakukan liberalisasi.

Smith berhasil secara mendasar membangun teori tentang kekayaan sebuah perekonomian makro. Ia mengukur kekayaan semata pada kinerja dan bukan seperti yang dilakukan oleh merkantilis berupa cadangan emas.

Adam Smith (1723-1790), adalah bapak liberalisme ekonomi; hidup sebagai filosof di Skotlandia.

Ia mengajukan hipotesis bahwa dalam alur permainan kekuatan, pasar bebas akan memunculkan kemakmuran tertinggi ketika setiap individu mencari manfaat bagi diri masing-masing. Pada tahun 1776, Smith mempublikasikan buku berjudul „Penelitian tentang Wujud dan Penyebab Kemakmuran bangsa“ (seringkali dikutip sebagai „Kemakmuran Bangsa“), dianggap sebagai landasan ekonomi moderen. Pemikiran-pemikiran mendasarnya termaktub dalam buku-buku pelajaran ilmu ekonomi hingga sekarang.

Yang tidak begitu dikenal adalah bahwa filosof moral Smith dalam „Teori tentang Etika Perasaan“ menyebutkan bahwa Kepercayaan dan Kejujuran adalah hal yang mutlak diperlukan dalam kegiatan ekonomi sedangkan saling empati adalah perilaku terpenting bagi hubungan manusia dalam sebuah masyarakat.

Smith berpendapat, terdapat tiga penyebab pencapaian kemakmuran masyarakat, berupa:

- Upaya menggapai manfaat pribadi dan kepemilikan pribadi
- Pembagian kerja dan spesialisasi
- Perdagangan besar dan persaingan.

*Tiga sumber
kemakmuran*

Ia mengilustrasikan bagaimana upaya menggapai keuntungan dan kepemilikan pribadi menimbulkan produktivitas, yang pada akhirnya memakmurkan masyarakat.

*Upaya menggapai
keuntungan pribadi*

„Bukan dari kemauan baik tukang daging, pembuat minuman dan tukang roti kita memperoleh apa yang menjadi kebutuhan makan kita, melainkan karena mereka membuat semua itu berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Kita bukan mempertanyakan rasa cinta mereka kepada kemanusiaan melainkan pada diri sendiri, dan kita tidak menyebut kebutuhan kita melainkan berbicara tentang keuntungan mereka.“ (Smith 1974: 17)

Sebagai pendorong utama pengembangan ekonomi, pada kalimat pertama bukunya “Kemakmuran Bangsa”, Smith menulis tentang pembagian kerja:

„Pembagian kerja mampu menunjang dan memperbaiki kekuatan produktivitas kerja, melebihi apapun.“ (Smith 1974: 9)

*Produktivitas lewat
pembagian kerja*

Ia menerangkan kelebihan dari pembagian kerja ketika memberi contoh sebuah pabrik peniti. Seorang pekerja, setiap harinya hanya mampu memproduksi beberapa peniti. Ketika proses produksi dibagi dalam beberapa langkah pekerjaan dan diselesaikan oleh sekian pekerja spesialis yang masing-masing berkonsentrasi pada satu proses penyelesaian, maka setiap harinya ribuan peniti mampu dihasilkan.

Akhirnya, Smith juga menganjurkan perdagangan dan persaingan bebas. Mirip dengan pembagian kerja antara berbagai pekerja, para pihak yang terlibat dalam perdagangan, melakukan spesialisasi sesuai kemampuan. Dengan demikian, produktivitas secara keseluruhan akan meningkat. Menurut Smith, pembagian lewat „tangan tak terlihat“, lebih efisien dan akan lebih merangsang dibandingkan semua bentuk perencanaan ekonomi. Sebagai contoh, Smith menceritakan perdagangan antara Skotlandia dan Portugis.

*Kemakmuran lewat
perdagangan bebas
dan kompetisi*

Lewat perdagangan
dimanfaatkan
keuntungan
komperatif

Skotlandia dapat memproduksi wol dengan kualitas sangat bagus, sedangkan Portugis mampu memproduksi anggur murah. Smith menyebut hal tersebut sebagai keuntungan komparatif. Bila kedua negara itu berkonsentrasi pada produk unggulan dan berdagang serta tidak berusaha dengan segala cara untuk memproduksi (minuman) anggur dan wol, keduanya akan memperoleh keuntungan.

Pemikiran ini adalah pembalikan dari pertimbangan ketika itu, bahwa perdagangan adalah *zero-sum-game* (pemenang memperoleh semuanya). Ironisnya, lebih dari satu dekade Smith pernah menjadi pegawai bea cukai yang bertugas untuk menjamin berlakunya aturan dagang merkantilisme.

Apa itu „Laisser-
faire“?

Menurut Smith, untuk menggerakkan sumber kemakmuran – orientasi keuntungan, pembagian kerja, dan perdagangan, negara hanya boleh intervensi tidak langsung dan memberikan kebebasan pada pasar seluas mungkin. Dari hal tersebut, muncul apa yang dinamakan doktrin „Laisser-faire“². Doktrin ini membatasi tugas negara yaitu menjaga keamanan publik, pertahanan negara, kepastian hukum, pengadaan infrastruktur serta pendidikan, dan samasekali tidak boleh melakukan intervensi pasar. Dengan demikian akan berkembang produktivitas tertinggi.

Melepas kekuatan
produktif

Smith adalah pencipta landasan teori liberalisasi ekonomi pada abad ke-19, ketika industrialisasi secara tak terduga melepaskan kekuatan produktivitas. Namun, Smith berasumsi bahwa sebuah ekonomi pasar bebas akan dengan sendirinya menemukan keseimbangan, dan tidak memprediksi munculnya krisis dan resesi.

Masalah pembagian
kerja

Mirip seperti Marx dalam teorinya tentang eksploitasi buruh dan akibat analisa keterasingan pekerjaan, Smith juga melihat sisi gelap dari kapitalisme. Ia mencemaskan pembagian kerja yang semakin sempit akan ‘menumpulkan’ manusia, sebagai kompensasinya ia menuntut adanya pemerataan dalam bidang pendidikan.

Smith: Perasaan
etis“

Dalam sebuah karyanya yang kurang terkenal „Teori Perasaan Etis“ (1759), Smith menulis tentang kebutuhan manusia, yaitu agar selalu berperilaku

2 Laisser faire (frz.), artinya „tanpa campur tangan“

sopan, adil, dan sebagai makhluk yang membutuhkan hakekat kolektivitas untuk mengatasi egoismenya. Dengan demikian, ia membantah anggapan dirinya sebagai manifestasi dari gambaran manusia *homo economicus* yang sepenuhnya mengincar keuntungan pribadi.

Smith, melihat dirinya sendiri, pertama-tama bukan sebagai seorang ekonom, melainkan filosof moral dan menekankan pada pentingnya keadilan, kepercayaan dan kejujuran dalam berekonomi.

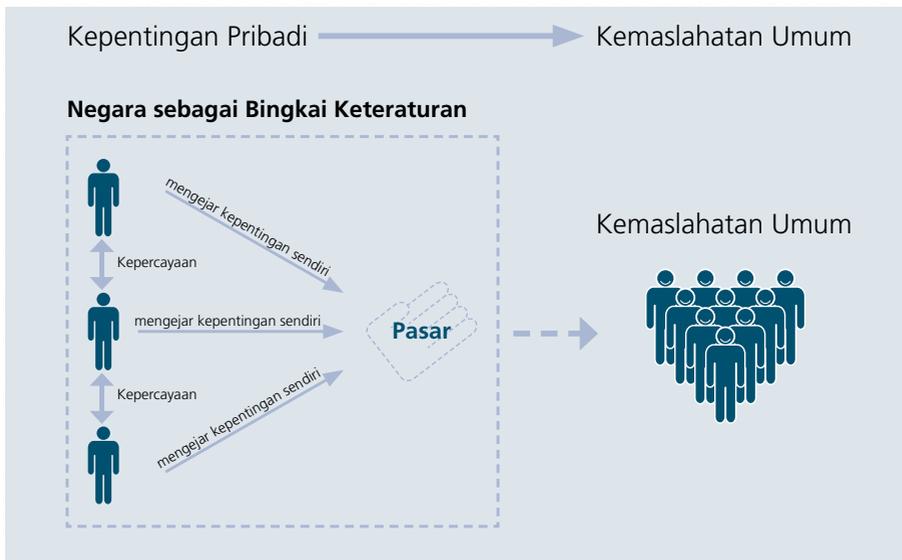


Abb. 1: Smith: Kemaslahatan umum lewat manfaat pribadi

Teori klasik liberalisme ekonomi yang mengacu pada Smith, merupakan pandangan paling dominan hingga terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1929. Baru setelah itu, muncul keraguan publik, apakah pasar yang dipandu oleh tangan tak terlihat, akan selalu berada dalam keseimbangan. Krisis mendalam dan dampaknya berupa pengangguran yang akut mengajarkan bahwa model pemikiran 'Laissez-faire' tidak sesuai dengan akal sehat. Dengan demikian, pondasi liberalisme ekonomi klasik pun terguncang. Peraih Hadiah Nobel, Joseph E. Stiglitz, secara kilas balik menyebut bahwa masalah 'tangan tak terlihat' adalah bahwa ia tak terlihat karena memang tidak ada (Stiglitz 2002).

Setelah itu, berlangsung fase Keynesian yang berlangsung selama beberapa dekade. Baru setelah beberapa tahun masa kelabu, pemikiran ekonomi liberal lewat neoliberalisme kembali muncul mulai tahun 1980an

Mazhab Chicago

Di antara sekian banyak ekonom yang kembali menemukan, mengembangkan dan mempromosikan pemikiran Smiths, yang paling terkenal adalah Friedrich August von Hayek dan Milton Friedman. Friedman mendirikan ideologi ekonomi liberal yang juga disebut „Chicago School“ (Friedman mengajar sebagai Professor di Chicago). Namun, pengikut Neoliberal menyunat pemikiran Smith menjadi sekedar kritik terhadap peran negara dan pembelaannya terhadap pasar bebas. Karyanya, „Teori Persaan Etis“, oleh von Hayek dan Friedman tidak diperdulikan.

Interpretasi baru lewat Thatcher dan Reagan

Interpretasi baru karya Smith, memperoleh pengaruh besar terutama ketika AS berada di bawah pemerintahan Presiden Ronald Reagan, dan di Britania Raya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Acuan kebijakan keduanya adalah bahwa „Negara bukanlah bagian dari solusi – negara adalah masalah“. Semuanya berarti deregulasi, swastanisasi dan mereduksi peran negara.

Konsensus Washington

Para pengagum pasar ini, juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan Bank Dunia dan IMF. Dalam rangka Konsensus Washington, dua lembaga ini menyiapkan ideologi perekonomian liberale, a.l. di Amerika Latin, bekas negara-negara komunis di Eropa Timur serta pasca krisis Asia di Asia Tenggara pada tahun 1997. Deregulasi pasar keuangan, secara garis besar juga berangkat dari ideologi ini. Dampaknya, krisis terberat dari arsitektur keuangan global sejak puluhan tahun dan resesi global sejak tahun 2008.

Bacaan lanjutan:

*Helen Winter
dan Thomas Rommel
(1999), Adam Smith
für Anfänger. Der
Wohlstand der Nati-
onen: eine Leseein-
führung, München.*

2.2. Kritik Kapitalisme Karl Marx

Karl Heinrich Marx (1818-18983) adalah seorang filosof dan wartawan politik asal Jerman.

Apa yang dilihat para ekonom liberal sebagai stabilitas dan pertumbuhan lewat berkembangnya pasar secara bebas, oleh Marx dideskripsikan sebagai pertentangan kelas, penindasan, pemiskinan dan sistem yang rawan krisis sehingga dapat berakhir lewat revolusi proletariat.

Publikasi teori ekonomi Marx terpenting, adalah "Das Kapital" yang terdiri dari tiga jilid. Diterbitkan antara tahun 1867 dan 1894, sebagian dari publikasi tersebut terbit setelah meninggalnya Karl Marx

Kritik kapitalisme filosof Jerman, Karl Marx, seringkali dilihat sebagai teori tandingan terhadap Adam Smith. Pendapat ini, hanya separuh benar. Marx memang mempelajari dengan cermat karya Smith dan menghasilkan analisis yang mirip. Daya produktivitas dan kemampuan inovatif kapitalisme, oleh Marx, lebih diekspos dibandingkan analisis Smith. Meskipun demikian, kesimpulan yang diambil sama sekali berbeda.

Berseberangan dengan Smith, Marx melihat kapitalisme tidak memiliki dasar yang stabil dan bersifat merusak. Kapitalisme tidak membawa "kemakmuran bangsa", melainkan kemelaratan. mayoritas pekerja.

Untuk bisa memahami pemikiran Marx, kita harus mendalami kondisi genting kehidupan buruh pada masa-masa awal industrialisasi di abad ke 19. Sebuah narasi di Museum Kebudayaan Industri di Duisburg, secara meyakinkan mampu menggambarkan kondisi tersebut (Baier dkk. 2002: 18):

„Sementara kelompok orang kaya membangun vila di pinggiran kota, merebak rumah-rumah sewa kumuh di sepanjang jalanan perkampungan yang sangat padat, jorok dan jauh di bawah kondisi yang layak. [...] Tak jarang, seluruh anggota keluarga bahkan orang yang tidak dikenal berdesakan dalam satu kamar, sambil beberapa orang terpaksa antri tempat tidur. Ritme tidur disesuaikan dengan waktu kerja per orang. Kondisi tempat kerja di pabrik sepenuhnya mengacu pada keberadaan mesin, para buruh harus menyesuaikan diri dengannya. Waktu kerja, biasanya 70 jam per minggu, bahkan di industri tekstil 80 jam per minggu. Pekerja anak pun meluas, keamanan sosial nyaris tidak ada, sedangkan pelayanan kesehatan sangat buruk.“

Marx: Terkait Smith

*Konteks waktu:
Industrialisasi awal
pada pertengahan
abad ke19.*

Gambaran seperti itu atau mirip, pasti bisa ditemukan dalam kondisi kehidupan dan pekerjaan di negara-negara miskin.

Menurut Marx, kondisi kehidupan dan pekerjaan yang tidak manusiawi itu, bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah akibat logis dari kapitalisme. Ia menganalisis bahwa pasar bebas secara pasti memunculkan kemiskinan dan penindasan, karena keuntungan para kapitalis berasal dari penindasan para buruh.

Paling penting dalam teori Marx adalah ungkapan “nilai tambah” yang diperkenalkan dalam buku pertama “Das Kapital” yang terbit pada tahun 1867 dan diperjelas dalam epilog beberapa buku berikutnya. Nilai tambah adalah nilai yang diperoleh pengusaha di luar modal yang ditanam sebagai keuntungan. Contohnya adalah, ketika pengeluaran dalam produksi adalah 100 Euro (termasuk gaji dan alat produksi), namun memperoleh hasil 110 Euro dari pasar. Nilai tambah ini, demikian Marx, hanya bisa diperoleh dari nilai kerja para buruh. Atau dengan kata lain: hanya bila para pekerja memberikan nilai lebih dibandingkan apa yang diperolehnya dari gaji.

Nilai tambah, menurut teori nilai kerja dari Marx, berasal dari keuntungan perusahaan yang diperoleh dari kinerja para buruh, dipotong biaya gajidan beban bahan produksi. Nilai tambah juga berarti sama dengan penindasan buruh. Marx membedakan dua jenis nilai tambah, yaitu absolut dan relatif. Nilai tambah absolut berasal dari jam kerja yang lama, sedangkan nilai tambah relatif berasal dari kemajuan produksi. (Das Wirtschaftslexikon 2009)

Marx menggambarkan kondisi para buruh yang hanya memperoleh gaji sebatas untuk mempertahankan hidup mereka. Sementara para kapitalis memperkaya diri dari perbandingan antara gaji buruh dan nilai tambah.

Ia berangkat dari asumsi, para kapitalis –dipacu oleh semakin tajamnya persaingan –berupaya menaikkan nilai tambah tersebut, berupa gaji, yang sama-kun diturunkan, jam kerja diperpanjang dan pemanfaatan mesin diperbesar.

3 Diterbitkan pada awal 2009. Kami berterima kasih kepada penerbit J.H.W. Dietz Nachf., Bonn, atas kemungkinan memakai istilah-istilah dari Leksikon Ekonomi sebelum diterbitkan.

Penindasan sebagai dampak kapitalisme

Istilah „Nilai Tambah“

Bacaan lanjutan:

Volker Happe, Gustav Horn, Kim Otto (2009), Das Wirtschaftslexikon. Begriffe. Zahlen. Zusammenhänge. Bonn.³

Akibatnya, terjadi peningkatan pengangguran. Pada saat yang sama, para pesaing dari waktu ke waktu digusur dari pasar. Masyarakat pun, pada akhirnya, menjadi semakin terbelah dalam dua kelompok, yaitu mereka yang tak berpunya dan sekelompok kecil manusia yang ditangan mereka terakumulasi modal.

Selain istilah “nilai tambah”, dalam karya berjudul “Risalah Ekonomi-Politik” yang diterbitkan pada tahun 1844, Marx juga mewarnai karya-karyanya dengan ungkapan „Keterasingan Kaum Buruh“. Dalam ungkapan ini, mirip seperti Smith, Marx menemukan sisi gelap dari pembagian kerja produktif. Dalam produksi massal, para buruh hanya terlibat menjadi bagian kecil dari langkah-langkah produksi yang monoton. Tidak adanya kontak pekerja dengan produk akhir, menyebabkan hilangnya kepuasan bekerja.

Bila persaingan dan pembagian kerja bagi Smith adalah sumber kemajuan, sebaliknya bagi Marx persaingan dan pembagian kerja adalah kebobrokan mendasar dari kapitalisme dan penyebab penindasan dan keterasingan. Pada masanya, ia melihat bahwa kemajuan produksi hanya menguntungkan pemilik modal, sedangkan para pekerja semakin menderita.

*Ungkapan
„keterasingan“*

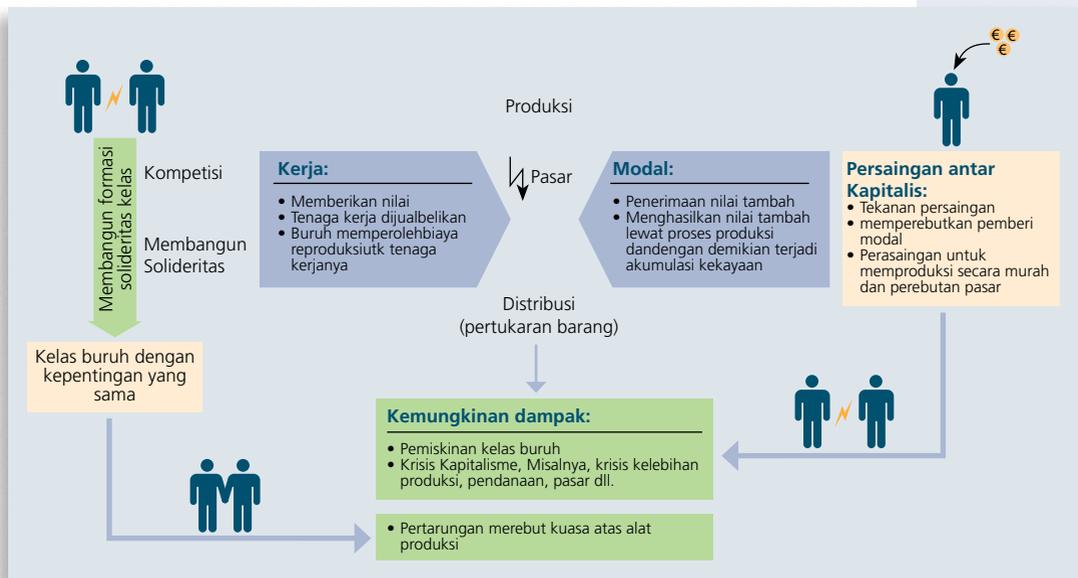


Abb. 2: Kerangka Dasar Argumentasi Marx

Sebuah tatanan ekonomi berorientasi profit, menurut Marx sangat rawan krisis dan tidak stabil. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan melahirkan revolusi kaum tertindas.⁴

„Sentralisasi alat produksi dan kerja massal akan mencapai sebuah titik jenuh, ketika hal tersebut menjadi tidak terpikulkan. Kondisi tersebut akan menghancurkan kepemilikan pribadi yang kapitalistis.“ (Marx 1991: 684 dst.)

Sebuah istilah kunci dalam teori Karl Marx yang diwacanakan dalam Manifesto Partai Komunis tahun 1848, adalah „kepemilikan“, yang dimaksud di sini adalah kepemilikan pribadi atas alat produksi.

Kepemilikan pribadi atas alat produksi, demikian Marx adalah pertanda utama sebuah masyarakat kelas dalam kapitalisme. Dalam karya awalnya, kondisi tersebut diramalkan akan terhapus lewat revolusi proletariat. Kelas buruh, akibat rendahnya gaji tidak memiliki kemungkinan untuk mengumpulkan kepemilikan pribadi yang berarti. Sebaliknya, para kapitalis mengakumulasi kepemilikan pribadi lewat penindasan.

Karena itu, dalam Manifesto Partai Komunis, Marx antara lain menuntut:

- Sentralisasi perkreditan di tangan negara lewat sebuah Bank Nasional dengan modal negara dan monopoli total;
- Sentralisasi transportasi di tangan negara;
- Perbanyak pabrik nasional, peralatan produksi, peneterapan dan perbaikan semua aset pertanahan dalam bentuk perencanaan kolektif (bandingkan: Marx/Engels 1987: 54)

Namun, sebagai interpreter terpenting dari Marx, Friedrich Engels kemudian melihat adanya kelemahan penguasaan oleh negara: „Semakin banyak kekuatan produktif dikuasai negara, semakin banyak ia menjadi kapitalis sejati dan semakin banyak warga yang diperas olehnya. [...] Pemerataan modal tidak terjadi, sebaliknya lebih banyak dikuasai kelompok elit“ (Engels 1988: 553 f.).

4 Dalam penelitian tentang Marx, mengemuka pertanyaan apakah menurutnya sebuah revolusi sebagai sesuatu yang dipastikan terjadi atau hanyalah sebuah kemungkinan perkembangan historis. Paling menentukan bagi setiap sudut pandang yang berbeda tersebut, adalah pertanyaan, apakah perlu dibedakan antara penggalan karyanya atau mencermati karya Marx secara utuh. Bacaan lanjut, Heinrich (2004: 169–178).

Dalam kaitan ini, ekonom John Kenneth Galbraith menulis sebagai berikut: „Dalam kapitalisme, manusia menindas manusia lain. Dalam komunisme terjadi sebaliknya.“ Negara seperti Uni Soviet dan Jerman Timur, yang mengikuti tuntutan Manifesto Komunis untuk melakukan sentralisasi dan pemasyarakatan perbankan, transportasi dan alat produksi, terbukti gagal.

Marx menilai sejarah sebagai hasil berbagai pertarungan antar kelas, yang memuncak dalam pertarungan antara kelompok borjuasi dan akhirnya, kemungkinan, berujung pada revolusi proletariat. Ia mengembangkan sebuah utopi masyarakat tanpa kelas, tanpa persaingan dan tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi.

Namun, sejarah memperlihatkan bahwa apa yang digambarkan Marx tentang keterpurukan buruh dan semakin kuatnya akumulasi kepemilikan pada pemilik modal tidak sepenuhnya terbukti. Kemakmuran bisa juga diperoleh lewat organisasi dan solidaritas para pekerja dalam Serikat Buruh dan kelahiran negara kesejahteraan yang lebih adil.

Istilah yang sering digunakan Marx, **„Borjuasi“** dan **„Proletariat“** berlaku bagi dua kelas yang saling berhadapan. Istilah „Proletariat“ berasal dari kata Latin proletarius („lapis terbawah masyarakat“). Sedangkan istilah „borjuasi“ berasal dari bahasa Perancis yang artinya „kewargaan ekonomi“.

Konsentrasi modal, lewat apa yang ditulis ekonom Austria Joseph Schumpeter sebagai „perusakan kreatif“, bisa dihancurkan. Ia menulis, bagaimana para pengusaha lewat inovasi, persaingan, krisis atau pasar baru selalu akan terstruktur ulang.

„Dibukanya pasar-pasar baru, baik di tempat asing maupun pasar setempat, dan pengembangan organisasi dari pabrik pertukangan menjadi perusahaan besar[...] merupakan ilustrasi dari proses yang sama [...], yang secara terus-menerus melakukan revolusi dari dalam terhadap struktur perekonomian, dan secara berkelanjutan merusak struktur lama sertasecara tetap melahirkan struktur baru. Proses ‚penghancuran kreatif‘ ini bagi kapitalisme adalah sebuah kenyataan mendasar.“ (Schumpeter (1942: 137 dst.)

Sejarah sebagai hasil pertarungan kelas

Keterpurukan tidak selalu pasti

Schumpeter: „Perusakan kreatif“

Industri mobil menggantikan dokar, tukang besi dan baja. Produsen mesin ketik harus menyerah digantikan pedagang komputer. Semua hal tadi adalah contoh penghancuran kreatif, yang di satu sisi merangsang inovasi, namun di sisi lain juga menimbulkan ketidakpastian baru dan menuntut fleksibilitas tinggi dari manusia.

*Gagalnya sosialisme
negara*

Eksperimen sosialisme negara yang mengacu pada Marx, telah gagal dan membuat para teoretisinya terdiskreditasi. Apakah dengan demikian teorinya terbantahkan? Selama ini belum ada alternatif yang berfungsi dan bertahan dalam praksis terhadap tatanan ekonomi berbasis efisiensi pasar dan kepemilikan pribadi.

*Analisis kondisi yang
ada*

Sebagai analisis, Marx lebih baik dibandingkan dengan apa yang diusulkan. Dari ajarannya, tidak ditemukan solusi praksis, ramalannya pun tidak terbukti. Namun, analisisnya masih tetap menjadi bahan rujukan. Marx sebagai teoretisi, tak tertandingi dalam mempertajam pandangan terhadap bahaya krisis kapitalisme yang tak terkontrol.

*Bagaimana
memosisikan
Marx?*

*Willy Brandt:
„Upaya menjangkau
kebebasan“*

Lalu, bagaimana memosisikan Marx? Mungkin, seperti dituntut Willy Brandt sewaktu mengunjungi Karl-Marx-House di Trier: „Adil, apabila kita menempatkan Marx – positif maupun negatif – tidak pada tempat ‘tak tersentuh’. apapun yang dikatakan dan ingin dijadikan orang tentang Marx. Menggapai kebebasan, membebaskan manusia dari perbudakan serta ketergantungan mereka yang ‘bisu’ adalah motivasi pemikiran dan kegiatannya.“

Bacaan lanjut:

*Francis Wheen
(2008), Über Karl
Marx. Das
Kapital, München.*

2.3. John Maynard Keynes: Pengendalian Kapitalisme

John Maynard Keynes (1883-1946) adalah ekonom Britania Raya yang sangat mempengaruhi teori ekonomi abad ke-20.

Dalam sebuah karyanya yang paling berpengaruh, „Teori umum tentang Pekerjaan, Suku Bunga dan Uang “ (1936), ia mempertanyakan asumsi kekuatan pasar untuk menyembuhkan diri sendiri dan meletakkan dasar bagi Keynesianisme dengan tujuan pengaturan kapitalisme.

Selain itu, Keynes juga ikut merumuskan konsep dari sistem Bretton-Woods, yang mendominasi perekonomian global pasca Perang Dunia II.

Baik ajaran Adam Smiths tentang kapitalisme bebas dengan seminimal mungkin intervensi negara maupun penolakan Karl Marx terhadap persaingan dan kepemilikan pribadi atas alat produksi, ternyata bermasalah. Pertanyaannya, adakah jalan tengah berupa sebuah kapitalisme terkendali yang memanfaatkan kekuatan produktif pasar, sambil meminimalisir sisi buruknya yang merusak?

Ekonom John Maynard Keynes menganalisis dua sisi kapitalisme yang bertentangan, yaitu efisien dan produktif, tetapi secara struktural tidak stabil. Meski yakin pada manfaat tatanan pasar yang berbasis pada kepemilikan pribadi dan persaingan, namun ia bersikap kritis terhadap mazhab neo-klasik yang berbasis pada pemikiran Smith.

Keynes, misalnya, mengkritisi „bahwa mazhab tersebut tidak akan mampu menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi di dunia nyata“ (Keynes 1966: 319).

Keynes juga mempertanyakan kebenaran “tangan-tangan tak terlihat” dari pasar yang ternyata tidak berfungsi mengacu pada krisis perekonomian dunia pada tahun 1929. Pasar, tidak seperti yang diasumsikan Smith, kembali membaik melainkan melanggengkan pengangguran dalam jumlah yang besar sekaligus melumpuhkan perekonomian.

Keynes memastikan terjadinya pembalikan spiral, yaitu ketika produksi berkurang dan semakin banyak pekerja yang di-PHK, para konsumen dan produsenpun merasa tidak aman, sehingga semakin sedikit mengeluarkan uang

Keynes - sebuah jalan tengah?

Kritik Keynes terhadap mazhab neo-klasik

Ragu terhadap „tangan-tangan tak terlihat“

Bahaya berbaliknya sebuah spiral ekonomi

(„hemat karena cemas“). Yang terjadi adalah, permintaan semakin menurun, pengusaha kemudian menurunkan produksi dan mengurangi lapangan kerja, sehingga penghematan pun semakin ketat dan seterusnya. Krisis semakin meningkat dan perekonomian akan mengalami depresi berat yang berkelanjutan. Ramalan tersebut, benar-benar terbukti sewaktu terjadi krisis, sehingga memperoleh banyak pengakuan. Tidak hanya memahami situasi ketika pasar tidak berfungsi, tetapi Keynes lewat analisis pengendalian anti-siklus, mengembangkan sebuah konsep mengatasi permasalahan tersebut.

*Dibutuhkan
intervensi aktif
negara*

*Pengendalian
konyunktur oleh
negara*

Dalam masa kesulitan ekonomi, negara harus mengintervensi pasar dan menaikkan permintaan lewat pengambilan utang dan peningkatan belanja. Termasuk lewat pemberian uang langsung kepada warga, atau dengan menurunkan pajak. Meski hal tersebut ada bahaya dan tidak menghasilkan apapun, karena masyarakat akibat ketidakpastian masih terus menghemat. Karena itu, akan lebih membawa dampak apabila negara secara langsung berbelanja, misalnya dengan membangun jalan dan sekolah. Dengan pengeluaran tambahan ini tercipta lapangan kerja, yang pada gilirannya, meningkatkan konsumsi, melahirkan permintaan dan memicu spiral ekonomi positif. Keynes memformulasikannya sebagai berikut:

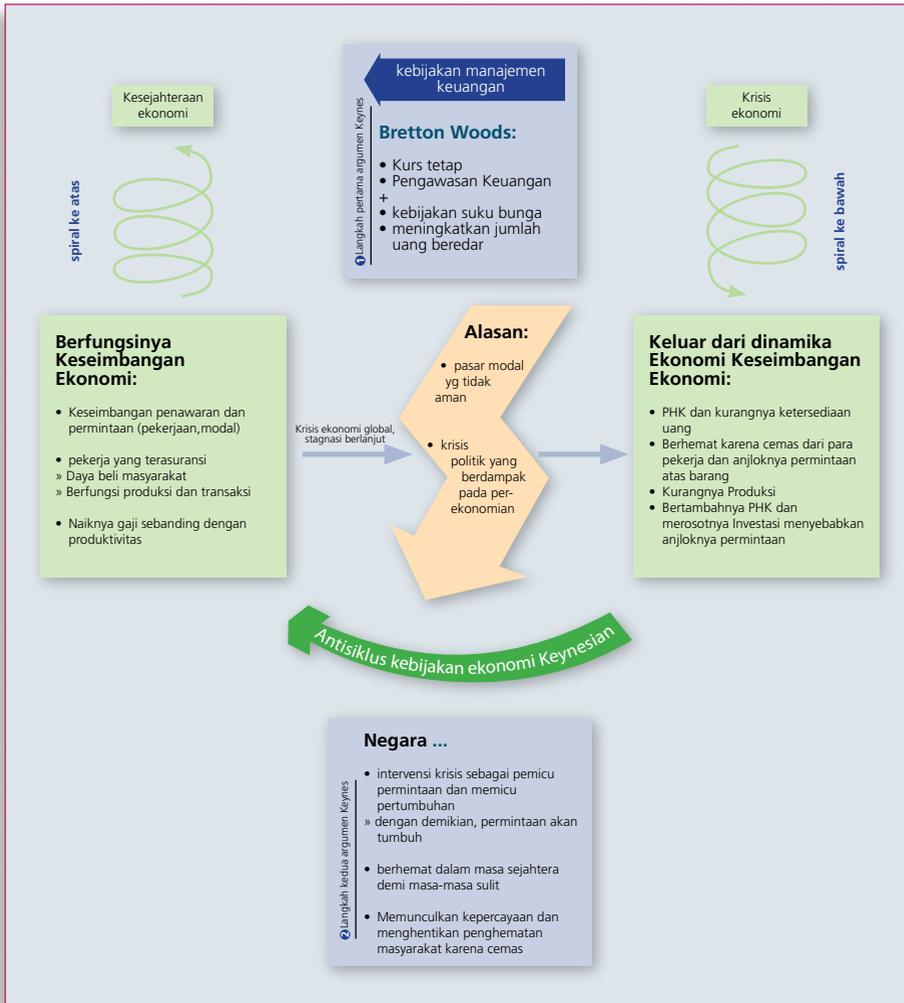
„Bila kita membelanjakan lebih dari 150 juta Poundsterling, maka semua orang akan memperoleh tambahan penghasilan; dan mereka yang menganggur tidak lagi membutuhkan tunjangan. Lebih dari itu, pengeluaran tersebut membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Uang tersebut akan berputar dalam perekonomian dan dibelanjakan untuk berbagai barang serta tidak terakumulasi pada segelintir.“ (Keynes 1939, dikutip dari Weinert 2008)

*„Dalam jangka
panjang, kita semua
akan mati“*

Dengan begitu, Keynes memberi alasan pembalikan dari keyakinan bahwa pasar selalu menemukan keseimbangan, seperti yang diasumsikan oleh Adam Smith. Pernyataan terkenalnya adalah „Dalam jangka panjang, kita semua akan mati“. Dengan pernyataan tersebut, ia menghimbau para penanggung jawab politik, bahwa yang lebih penting adalah menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan hari ini daripada janji masa depan yang lebih baik dan percaya pada kemampuan regulasi oleh pasar.

Namun, Keynes mewanti-wanti risiko intervensi pasar, karena waktu dan besaran intervensi sulit ditakar. Ia menulis:

„Kenyataan paling menonjol adalah landasan pengetahuan yang masih sangat diragukan terkait penilaian kita tentang perkiraan besaran intervensi yang harus dilakukan. Pengetahuan kita tentang berbagai faktor penentu besaran intervensi selama beberapa tahun, biasanya sangat kurang dan tidak berarti.“ (Keynes 1966: 126)



Gambar. 3: Struktur Kasar Argumentasi Keynes

*Apa yang disebut
sebagai revolusi
Keynes*

Analisis dan himbauannya, yaitu negara harus mengintervensi pasar sangat membekas di masanya, sehingga di komentari sebagai “Revolusi Keynes”, yang dengannya ia melawan posisi Smith maupun Marx. Reaksi pun setimpal: kaum liberal dan konservatif menyebutnya sebagai sosialis bertopeng. Sedangkan kelompok Marxist menuduhnya terlalu percaya pada pasar. Yang pasti, pada saat itu Keynes berposisi melawan kemunculan pemerintahan diktator di Eropa dan dengan himbauannya, ia ingin mempertahankan demokrasi.

„Sistem negara otoriter saat ini tampaknya ingin mengatasi permasalahan pengangguran dengan mengorbankan kemampuan kinerja dan kebebasan. Bisa dipastikan bahwa dunia tidak bisa mengatasi pengangguran – terlepas dari dinamika jangka pendek - menurut pandangan saya memang terkait dengan kapitalisme saat ini, dan karena itu tidak boleh ditolerir. Lewat analisis permasalahan yang tepat, masalah pengangguran bisa dibatasi, penyakitnya disembuhkan dan pada saat yang sama kemampuan kinerja serta kebebasan bisa dipertahankan.“ (Keynes 1966: 321)

„Aturan psikologis“

Selain itu, dengan “aturan psikologis”nya, Keynes mengajukan sebuah alasan, mengapa pemerataan tidak hanya secara sosial sangat bermanfaat, tetapi secara ekonomi sangat rasional. Sebuah perekonomian yang dinamis membutuhkan permintaan pasar yang cukup. Karena, lewat peningkatan pendapatan jumlah tabungan dan konsumsi perorangan meningkat, sehingga mereka yang bergaji rendah perlu ditingkatkan pendapatannya.

*Pengaruh Keynes di
abad ke-20*

Keynes juga berperan menentukan dalam mengkonstruksi apa yang dinamakan Sistem *Bretton-Woods*.

Pada abad ke-20, Keynes adalah ekonom yang pengaruhnya tak ada bandingnya. Anjuran Keynes, secara terarah diaplikasikan di AS lewat program “New Deal” oleh Presiden Franklin D. Roosevelt-dari Partai Demokrat: *Pertama*, Investasi publik untuk Infrastruk-

Bretton-Woods: Pada tahun 1944, dalam sebuah konferensi di sebuah kota kecil AS, Bretton Woods, disepakati sebuah arsitektur keuangan. Intinya adalah sebuah sistem keuangan internasional, di mana naikturunnya nilai mata uang dipatok pada Dollar AS. Sebagai lembaga untuk memberikan kredit internasional dan untuk regulasi pasar uang didirikan IMF dan Bank. Sistem Bretton-Woods berlaku hingga tahun 1973. Setelah terjadi goncangan besar dalam pasar uang, pematokan pada Dollar AS terpaksa dilepas. Dengan demikian, stabilitas pasar uang dipreteli.

tur ditingkatkan secara drastis. *Kedua*, lewat peningkatan tunjangan sosial, konsumsi masyarakat diperkuat, karena manusia dengan penghasilan rendah atau tidak berpenghasilan hanya memiliki simpanan terbatas. Ajaran Keynes, hingga tahun 1970an mendominasi pemikiran terpelajar. Di Jerman, diwakili terutama oleh ekonom sosdem, Karl Schiller yang pada 1966 - 1972 menjadi menteri keuangan dan ekonomi Republik Federal Jerman. Pada saat itu, bahkan presiden AS yang konservatif, Richard Nixon pun mengatakan: „Sekarang, kami semua adalah Keynesian.“

Namun, sejak pertengahan 1970an, keynesianisme mengalami krisis. Di satu sisi, kebijakan anggaran belanja anti-siklus tidak berfungsi dengan baik seperti yang dikonsepsikan oleh Keynes. Pengeluaran di masa krisis memang ditingkatkan, namun ketika perekonomian membaik, utang tidak (bisa) dibayar. Dengan demikian, utang publik membengkak dan ruang gerak bagi pengeluaran menurun dari satu krisis ke krisis berikutnya. Selain itu, muncul dua krisis minyak. Akibat peningkatan drastis harga minyak, terjadi lingkaran setan: Gaji meningkat, namun peningkatan harga BBM menelan penghasilan, kembali gaji ditingkatkan yang memicu inflasi untuk kemudian memicu peningkatan gaji. Dengan demikian, program stimulus lewat negara tidak berdampak sama sekali. Perekonomian pun menjadi stagnan pada saat inflasi meroket (stagflasi). Neoliberal dan neoklasik, memperoleh momentum dan mengajukan kebijakan yang ramah pengusaha. Keuntungan lokasi lewat penurunan biaya, konsolidasi anggaran belanja dan pengetatan ikat pinggang, kembali naik daun.

Stagflasi: Pertemuan pada saat yang sama antara Stagnasi dan Inflasi. (Das Wirtschaft-slexikon 2009)

Setelah bertahun-tahun pemberlakuan kebijakan ekonomi liberal, antara lain akibat krisis keuangan pada

tahun 2007, semakin nyaring suara yang menuntut intervensi negara dalam pasar terkendali. Menemukan kembali (pemikiran) Keynes, semakin jelas terlihat. Hal yang tidak mengherankan, karena apa yang ditulis Keynes tentang pasar uang, menjadi semakin aktual:

„Para spekulan boleh jadi tidak menderita sebagai gelembung sabun perekonomian yang terus dipompa dalam kerakusan usaha. Namun situasi men-

*Permasalahan
keynesianisme*

Bacaan Lanjutan:

*Reinhard Blomert (2007), John Maynard Keynes, Reinbek.
Heinz-J. Bontrup (2006), Keynes wollte den Kapitalismus retten. Zum 60. Todestag von Sir John Maynard Keynes, Bonn.*

jadi serius bila kerakusan menyebabkan gelembung sabun masuk ke dalam putaran deras spekulasi. Bila pertumbuhan modal sebuah negara sebagai hasil sampingan kegiatan tempat perjudian (spekulasi), maka boleh dipastikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan terbilang buruk.” (Keynes 1966: 134)

2.4. Tipe Ideal Teori Ekonomi

Dalam perdebatan politik sehari-hari, pemikiran dari Smith, Marx dan Keynes selalu muncul. Bila seorang politisi liberal, ingin menggusur negara dari tugas pokoknya sambil berkata negara bukan bagian dari solusi melainkan bagian dari masalah, maka ini sejalan dengan pemikiran Adam Smith. Di masa ketika globalisasi kapitalisme tak terbendung di mana pasar seringkali kebablasan, maka langkah solusi Keynes untuk mengendalikan ekonomi pasar kembali aktual. Dan, bila kita melihat kondisi pabrik di negara-negara berkembang, di mana para buruh bekerja secara eksploratif, misalnya menjahit pakaian, selama 14 jam per hari dengan gaji yang rendah, maka kita pun akan kembali mengingat analisis Karl Marx.

Semua itu tidak mengherankan, karena secara tipe ideal⁵, Smith, Marx dan Keynes memiliki tiga visi ekonomi yang berbeda, yang selalu akan dikemukakan oleh setiap kubu politik terkait pertanyaan tentang distribusi, relasi pasar dan negara serta masalah ekonomi-politik lainnya. Tiga tipe ideal tersebut, bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Negara agar tidak mencampuri proses ekonomi. Nafsu untuk mengumpulkan kepemilikan pribadi adalah energi pendorong perilaku ekonomi dan karena itu jangan diganggu (pandangan libertarian, mengacu pada Smith).

5 „Tipe ideal“, sesuai pemahaman sosiolog Max Weber, berarti secara sengaja dan terarah menggambarkan realitas dengan tegas, agar bisa menunjukkan dan menata gambaran kenyataan sosial dalam pemikiran. „Tipe ideal“ juga berarti, dalam buku pengantar ini hanya bisa secara singkat dan sederhana dideskripsikan tentang berbagai karakter visi ekonomi-politik.

2. Sistem ekonomi kapitalistis yang berbasiskan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan persaingan, mengarah pada penindasan dan pemiskinan. Karena itu, perlu dihapus (pemahaman komunistis, mengacu pada Marx).
3. Tatanan perekonomian berbasis kepemilikan dan ekonomi pasar, namun negara harus berperan dalam pengaturan, pendistribusian dan pengendalian makro ekonomi, lewat permintaan terarah dalam ekonomi rakyat. Pemilikan diijinkan, namun pada saat yang sama harus ada pengaturan terkait dengan aspek sosial dan kepentingan umum (sosdem, mengacu pada Keynes).

Dari wacana teori ekonomi, menjadi jelas bahwa baik pasar tanpa aturan maupun upaya untuk sepenuhnya meniadakan tatanan pasar, tidaklah mungkin. Sejarah mengajarkan, bahwa radikalisme pasar maupun penghilangan pasar, telah gagal. Kapitalisme harus diarahkan dan dikendalikan, bila tujuan sosial demokrasi ingin dicapai. Program Godesberg partai SPD, pada tahun 1959 berkat arahan ekonom berpengaruh, Karl Schiller, memproklamirkan motto: "Pasar, sebanyak dimungkinkan; perencanaan, sebanyak yang dibutuhkan".

Seperti diungkapkan sebelumnya, teori-teori yang diperkenalkan harus dinilai berdasarkan konteks sejarah. Sejarah telah memperlihatkan bahwa kapitalisme tidak, seperti yang diramalkan Karl Marx (akan) hancur akibat kontradiksi dalam dirinya sendiri. Kapitalisme, juga tidak berayun dalam harmoni keseimbangan diri seperti diasumsikan oleh Adam Smith. Abad ke-20 telah menghasilkan kemakmuran seperti yang belum pernah dikenal sebelumnya bagi lapis besar masyarakat, sambil pada saat yang sama membawa kesengsaraan serta berbagai krisis yang terjadi. Bagaimana perkembangan tersebut dinilai dari sudut pandang sosdem? Matthias Platzeck, Peer Steinbrück dan Frank-Walter Steinmeier, memberikan jawaban dalam bukunya „Auf der Höhe der Zeit“ (Pada Puncak Zaman) yang terbit pada tahun 2007:

„Di satu sisi, cara berpikir sempit para ekonom Marxis ortodoks, seperti halnya kaum liberal di lain sisi, berhadapan dengan para teoretisi visioner Eduard Bernstein serta mereka yang mendahulukan politik maupun yang berprinsip reformistis, progresif dan kompromistis dengan melihat keseimbangan kepentingan yang menembus batas kelas. Ketika yang lain percaya pada

2. Anti kapitalisme

3. Kapitalisme terkendali

„Pasar, sebanyak dimungkinkan – perencanaan, sebanyak dibutuhkan“

Apa jawaban politik sosdem atas pertanyaan ini?

kekuatan ekonomi dan sejarah, sosdem meyakini pentingnya pembentukan dan perubahannya secara aktif dan pragmatis. Dinamika pasar, dikaitkan secara ofensif dengan reformasi sosial dan pembaruan, agar secara sistematis terbuka akses bagi masyarakat atas pertumbuhan dan kesejahteraan. Pasar bebas, demokrasi dan keutuhan sosial, tidak hanya dipertautkan, melainkan dengan menggunakan alat politik diupayakan terjadinya sebuah hubungan timbal balik yang positif –tepat disinilah, secara historis terjadi sebuah rancangan kemajuan yang sama sekali baru dan tanpa ada contoh serupa sebelumnya sejak permulaan abad ke-20. Awalnya, secara praktis dan lewat keberhasilan yang belum pernah terjadi keseimbangan terkait beberapa kekuatan, apa yang secara historis selalu dianggap sebagai tidak cocok serta saling bertentangan satu dengan lainnya: pasar bebas yang dinamis, demokrasi yang hidup dan keutuhan sosial. Sepenuhnya tepat, ketika sosiolog Ralf Dahrendorf menggunakan istilah diwarnai oleh ,sosdem abad ke-20'.. [...] Saat ini, perlu kembali diperjelas dan diingatkan betapa sulitnya kemenangan sosdem melawan para penentangannya –dan betapa buah hasil tersebut berada dalam bahaya pada awal abad ke-21 ini. [...] Karena itu, yang mendesak dibutuhkan kini adalah ditingkatkan kembali kepercayaan diri Sosdem bahwa betapa sangat berarti dan visioner serta masih berlakunya ide-ide yang berhasil dikembangkan dalam pertarungannya sebelumnya dengan kelompok marxisortodoks dan laissez-faire liberal, juga terjadi pada abad ke-21 ini. Karena dalam masa globalisasi saat ini, tak ada yang berubah terkait ketegangan internal antara pasar, demokrasi dan masyarakat.” (Platzeck/Steinbrück/Steinmeier 2007: 19-21)

2.5. Ekonomi Saat Ini

Setelah membahas para ekonom terpenting, muncul pertanyaan di mana posisi perekonomian saat ini? Bahwa pertanyaan ini sulit dijawab, terlihat dalam cerita berikut ini:

Bertepatan dengan masuknya Britania Raya sebagai anggota Uni Eropa pada tahun 1973, muncul sebuah advetorial dalam harian „London Times“ yang ditandatangani 154 ekonom dengan pernyataan bahwa kemungkinan besar langkah Britania Raya itu bakal membawa kerugian ketimbang keuntungan. Pada hari berikutnya, ada reaksi dari 142 ekonom lainnya yang membuat pernyataan sebaliknya. Dilihat dari perbandingan jumlah ekonom di dua kubu, sebuah surat pembaca menduga bahwa bergabungnya Britania Raya dalam Uni Eropa akan merugikan perekonomian negeri ini ketimbangan menguntungkan. (dikutip dari Wagner/Wiegard 2002: 773).

Anekdote tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pendapat dominan dalam ilmu perekonomian. Hal ini, terutama memiliki dua alasan mendasar:

Pertama, ekonomi seperti halnya setiap ilmu pengetahuan, meminjam kata-kata Karl Popper, tidak dibangun di atas batu cadas, melainkan di atas tanah berlumpur. Artinya, data, fakta dan pengamatan yang mendukung kesimpulan akhir analisis ekonomi, rapuh dan sama sekali tidak bisa dijamin kebenarannya.

Kedua, ilmu ekonomi sangat terkait dengan nilai yang dianut. Berbeda dengan ilmu pasti/alam, asumsi dan teorinya ditentukan oleh gambaran tentang manusia dan masyarakat. Seorang ekonom yang percaya bahwa manusia adalah makhluk *homo oeconomicus*, yang selalu mencari keuntungan, akan melakukan penilaian yang berbeda dibandingkan ekonom lainnya yang menganggap manusia sebagai makhluk sosial yang kompleks.

Sebuah peringatan yang menyedihkan, bahwa fakta-fakta yang dianggap benar dan berbasis ilmu pengetahuan ekonomi, ternyata didasari oleh ideologi dan karena itu banyak rekomendasi dari para ekonom, perlu selalu dikritisi, demikian wartawan ekonomi Andreas Hoffmann dalam pernyataan berikut.

Di mana posisi ilmu ekonomi saat ini?

Pertanyaan sulit: sebuah contoh

Tiada pendapat dominan: dua alasan

Pertama: tiada pengetahuan dibangun di "landasan batu cadas"

Kedua: pernyataan ekonomi, terkait

“Saya tidak bisa masuk pesawat tanpa memikirkan subsidi. Ekonom membenci subsidi. Subsidi berasal dari kuasa kejahatan, mereka melumpuhkan perekonomian. Tapi tanpa subsidi tak akan ada airbus yang terbang. Hanya karena beberapa pemimpin ingin membangun pesawat, kita bisa terbang dengan airbus. Jika tidak, boeing akan memonopoli udara seperti Bill Gates memonopoli komputer. [...] Lalu, tentang kekuatan serikat buruh. Diduga serikat buruh mengurangi keberhasilan perusahaan. Namun, mengapa pembuat mobil Jerman, ahli mesin dan logam serta perusahaan elektronik Jerman begitu sukses di dunia? Seharusnya, mereka gagal dalam usaha mereka, karena di perusahaan mereka serikat buruh adalah yang terkuat. [...] Referensi terkait praksis, hanya sedikit bermanfaat bagi seorang pakar ekonomi yang kredibel. Dari seorang ekonom, kita hanya menemukan pandangan yang bias, dilanjutkan oleh kalimat yang tidak terkait dengan realitas melainkan tentang ‘pendekatan tatanan politik’. [...] Hanya saja, mengapa seringkali arah angin dari peta politik yang ada pun, tidak sesuai kenyataan? Perang Dunia Pertama, misalnya, tidak akan pecah karena para ekonom menganggapnya tidak menguntungkan. Seminggu sebelum ‘Kamis Hitam’ pada bulan Oktober 1929, ekonom selebriti Irving Fisher mengatakan tidak akan pernah terjadi ‘crash’ di pasar saham. Tidak satupun dari lima resesi di negeri ini yang telah diprediksi oleh peneliti, juga tidak tentang ‘internet boom’ di tahun 90an. Pada musim gugur 2002, diperkirakan bahwa pertumbuhan akan sebesar 1,4%, namun yang terjadi ekonomi menyusut 0,2%, dan saat ini semua bingung, bahwa lapangan pekerjaan dan perekonomian kembali tumbuh. Sementara Angela Merkel, kembali terlambat melakukan reformasi.”

(dipublikasikan dalam „Süddeutschen Zeitung“, 16. September 2006)

Ekonomi bukanlah ilmu pasti/alam

Menjadi jelas, bahwa ekonomi bukan ilmu pasti yang bisa membuat ramalan akurat, tapi ditentukan berdasarkan asumsi yang kurang lebih masuk akal, yaitu asumsi yang pernah terbukti secara empiris.

Sebagai konsekuensi: bukanlah posisi dan sudut pandang

Kesimpulan apa yang bisa ditarik dari pengetahuan ini? Tentu bukan menolak ke-ilmiahannya ilmu ekonomi atau, pernyataan para ekonom bisa ditafsirkan sebagai kesewenang-wenangan. Namun, adalah penting agar ekonom dan sarjana mengungkapkan sumber dan sudut pandang mereka sehingga siapa pun yang membaca hasil analisis mereka dapat mengelompokkan dan menafsirkan pendapat mereka dalam konteks latarbelakang posisi dan sudut pandang tersebut.

Secara kasar, terdapat dua kelompok ilmu ekonomi, yaitu pihak yang berorientasi pada kebijakan penawaran dan kebijakan permintaan. Di antara dua kubu ini, terdapat kelompok-kelompok transisi yang cair.

*Dua pihak:
kebijakan
penawaran dan
permintaan*

Kebijakan Penawaran

Kebijakan ekonomi yang berorientasi-penawaran (pasokan; suplai) berada dalam tradisi teori neoklasik Adam Smith, yang dilanjutkan oleh ekonom John Stuart Mill dan David Ricardo. Tuntutan politik, yang dalam hal ini diwakili John Stuart Mill dalam teori yang bersifat kritis terhadap peran negara dan ramah terhadap pasar liberal, sedapat mungkin menciptakan kondisi yang menguntungkan agar memperoleh keuntungan besar. Oleh karena itu dalam “kebijakan penawaran”, pasokan barang dan jasa harus dioptimalkan. Setelah itu, demikian teori yang dikembangkan, secara otomatis akan muncul permintaan. Negara harus meminimalkan intervensi atas pasar. Subsidi, kepemilikan publik dan regulasi agar diminimalkan, pajak dan biaya dijaga agar tetap rendah. Bank sentral menjaga stabilitas nilai uang, tetapi tidak melakukan intervensi dalam siklus bisnis.

*Kebijakan
penawaran: Smith,
Ricardo dan Mill*

Kebijakan Permintaan

Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada permintaan (kebutuhan) didirikan oleh John Maynard Keynes dan bergantung pada peran aktif pemerintah untuk mempromosikan lapangan pekerjaan dan mengendalikan perekonomian. Paling penting untuk itu adalah mengamankan stabilitas permintaan dalam perekonomian. Hal ini mensyaratkan tumbuhnya upah minimum sebesar produktivitas. Henry Ford, yang memperkenalkan produksi massal dan dengan demikian mendorong produktivitas menganjurkan upah yang lebih tinggi untuk meningkatkan permintaan. Kutipannya yang terkenal, “mobil tidak membeli mobil”.

*Kebijakan
permintaan: Keynes*

Ketika terjadi penurunan konsumsi dan investasi swasta, negara harus melakukan intervensi dengan program investasi dan langkah-langkah intensif membuka lapangan kerja. Lewat stimulus tambahan, investasi swasta akan diperkuat, lapangan kerja dan permintaan konsumen pun meningkat. Bank sentral harus mendukung pemulihan ekonomi pada saat krisis dengan memotong suku bunga dan meningkatkan penawaran uang.

Ciri-ciri yang membedakan

Ciri-ciri utama kebijakan ekonomi yang membedakan antara orientasi penawaran dan permintaan terkait penilaian pentingnya upah. Yang pertama melihat upah sebagai faktor biaya yang memberatkan dan harus dikurangi terutama pada saat krisis. Sedangkan penafsiran yang terakhir, upah sebagai faktor permintaan penentu yang perlu diperkuat ketika perekonomian memburuk agar tidak terjadi lingkaran penurunan seperti yang terjadi sewaktu depresi global pada tahun 1920-an. Beberapa ekonom juga melihat kurangnya permintaan sebagai alasan stagnasi di Jerman antara 2001 dan 2005. Kombinasi pembatasan upah selama bertahun-tahun dan penurunan investasi publik berdampak pada jatuhnya permintaan domestik yang menjadi beban perekonomian Jerman. Sebagai jalan keluar dari krisis, diberlakukan kenaikan upah dan penguatan program ekonomi publik (Horn 2005). Namun, terdapat dua permasalahan dalam kebijakan mendukung permintaan. Pertama, telah terbukti dalam praktek bahwa sulit untuk benar-benar melunasi utang publik pada masa ekonomi kembali membaik. Akibatnya, beban utang keuangan publik terus tumbuh. Ternyata, ruang gerak bagi program ekonomi dan pembuatan kebijakan, semakin sempit. Kedua, dalam keterkaitan antara stimulasi permintaan dan kebijakan, Bank Sentral menggelontorkan banyak uang sehingga membanjiri pasar, sebagian bisa menjadi apa yang disebut spiral upah.

Namun, upah yang lebih tinggi dengan cepat akan “dimakan” oleh inflasi. Pada saat yang sama, akibat tingginya inflasi muncul sikap “menghemat karena cemas” yang menyebabkan stagnasinya konsumsi. Hasil logis dari perkembangan ini adalah terjadinya stagflasi, atau kombinasi fatal antara stagnasi dan inflasi, seperti yang terjadi pada tahun 1970an.

Dimulai sejak Depresi Besar pada tahun 1920-an hingga 1970-an, kebijakan permintaan keynesian secara internasional, terbilang dominan. Menanggapi ekonomi global yang lesu dan tingginya inflasi (stagflasi) pada akhir 1970-an, kebijakan neoklasik kembali mengalami kebangkitan. Kebijakan ini dipelopori oleh Ronald Reagan di AS dan Margaret Thatcher di Inggris pada tahun 1980an, dan dalam bentuk yang tidak terlalu drastis oleh Helmut Kohl di Jerman. Pada tahun 1990-an, arah kebijakan ini tercermin dalam doktrin ‘Konsensus Washington’ yang secara internasional, menyebar luas. Terutama, melalui Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, kebijakan mempromosi-

kan liberalisasi, pemotongan pajak, swastanisasi, deregulasi, perdagangan bebas dan penghapusan subsidi ini menuntut, pasar harus diperkuat dan negara dipinggirkan. Mantan kepala ekonom Bank Dunia dan pemenang Hadiah Nobel, Joseph E. Stiglitz, saat ini menjadi pengkritik terkemuka dari Konsensus Washington. Dia melihat konsensus tersebut sebagai kepercayaan buta yang menjadi ideologi, meski tidak didukung oleh bukti empiris. Terdapat negara yang mengikuti resep liberalisasi pasar yang mengalami stagnasi ekonomi, sedangkan yang lain lewat koordinasi dan pengendalian pasar, mengalami keberhasilan sosial-ekonomi (Stiglitz 2002).

Mayoritas ekonom Jerman saat itu, tampaknya cenderung mengikuti kebijakan sisi penawaran. Ketika Koalisi Merah-Hijau pada tahun 2005 mengajukan pertimbangan untuk meningkatkan permintaan melalui belanja publik, mengikuti kebijakan klasik Keynesian, spontan sekitar 250 profesor ekonomi lewat "Seruan Hamburg", menuntut penguatan kebijakan ekonomi berorientasi penawaran (suplai). Beberapa tahun terakhir, ekonom yang berpihak pada kebijakan berorientasi permintaan (kebutuhan) berada dalam posisi defensif, meski kini mulai kembali diperhitungkan.

Dengan teori permintaan Keynes, dapat dijelaskan mengapa krisis keuangan tahun 2008 terjadi dengan cepat dan berdampak dramatis pada perekonomian serta memicu resesi di seluruh dunia. Dengan tepat, banyak negara merespon krisis dengan kebijakan Keynesian klasik, yaitu merangsang permintaan melalui perluasan belanja publik dan penguatan daya beli masyarakat biasa.

Seringkali, lembaga-lembaga penelitian ekonomi aliran tertentu (kebijakan berorientasi penawaran atau permintaan) dalam ekonomi, termasuk lima lembaga penelitian ekonomi utama di Jerman mengikuti kecenderungan tersebut dan bisa dikategorikan sebagai "berorientasi penawaran", atau sebaliknya, "berorientasi permintaan". Hasil penelitian mereka, cukup berpengaruh dalam perdebatan terkait kebijakan ekonomi. Karena itu, perlu diketahui keyakinan dasar mereka dan selalu menjadi pertimbangan dalam membaca analisis dan rekomendasinya. Namun, kelima lembaga tersebut, juga bekerjasama terutama dalam penyusunan prakiraan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan anggaran publik serta mempengaruhi perencanaan banyak perusahaan.

*Ekonom Jerman:
mayoritas
berorientasi
penawaran*

Jawaban Keynesian

Bacaan lanjut:
*Sebuah gambaran
yang baik terkait
latarbelakang
perdebatan ini,
bisa ditemui
dalam buku yang
enak dibaca dan
mudah dipahami
karangan Peter
Bofinger „Grund-
züge der Volkswirt-
schaftslehre“
(2007).*

- Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) di Berlin, dipimpin oleh Prof. Klaus Zimmermann, www.diw.de, cenderung berorientasi permintaan
- Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) di Halle/Saale, dipimpin oleh Prof. Ulrich Blum, www.iwh-halle.de, cenderung berorientasi penawaran
- Institut für Weltwirtschaft (IfW) di Kiel, dipimpin oleh Prof. Dennis J. Snower, www.ifw.de, berorientasi penawaran
- Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) di Essen, dipimpin oleh Prof. Christoph M. Schmidt, www.rwi-essen.de, berorientasi penawaran
- Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (IFO) di München, dipimpin oleh Prof. Hans-Werner Sinn, www.ifo.de, berorientasi penawaran dan dari lima lembaga ini, adalah yang paling mendukung pasar liberal.

Selain itu, terdapat lembaga berorientasi penawaran „Institut der deutschen Wirtschaft Köln“ (IW, Pimpinan: Prof. Dr. Michael Hüther, www.iwkoeln.de), yang dekat dengan pengusaha, serta lembaga yang dekat dengan Serikat Pekerja dan berorientasi permintaan, yaitu „WSI“ (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut, Pimpinan: Prof. Dr. Heide Pfarr, www.wsi.de) dan „IMK“ (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, Pimpinan: Dr. Gustav Horn).

	Kebijakan penawaran	Kebijakan permintaan
Ide dasar	Menciptakan persyaratan terbaik bagi pengusaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi.	Lewat promosi lapangan kerja dan pengendalian oleh negara dalam perekonomian untuk menjamin stabilitas permintaan.
Tradisi pemikiran	Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill	John Meynard Keynes
Pemahaman tentang negara	Negara yang pasif	Negara yang aktif
Pandangan tentang gaji	Gaji sebagai faktor biaya terpenting	Gaji adalah faktor permintaan dan harus tumbuh bersama produktivitas.
Peran Bank Sentral	Menjaga stabilitas nilai uang.	Menjaga nilai uang dan mendukung terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan.
Masa berpengaruh	Sejak 1980an,	Tahun 1930an hingga 1970an, kembali menguat sejak 2008
Kelembagaan	<p>Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)</p> <p>Institut für Weltwirtschaft (IfW)</p> <p>Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI)</p> <p>Ifo Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (ifo)</p> <p>Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)</p>	<p>Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)</p> <p>Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)</p> <p>Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK)</p>

Area Ketegangan Pntara Pasar, Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan, Regulasi dan Pengendalian Kebijakan

Keseimbangan pasar, demokrasi dan keutuhan sosial

Setelah mempelajari teori-teori dasar ekonomi, timbul pertanyaan bagaimana sosdem bisa membangun kebijakan ekonomi moderen berbasis nilai berdasarkan teori-teori tersebut. Sebuah kompas untuk orientasi dibutuhkan oleh sosdem, yang akan dijelaskan dalam dua bab berikut ini. Namun, sebelum itu, pada halaman ini perlu digambarkan relasi-relasi ketegangan yang perlu diseimbangkan dari sudut pandang sosdem.

Pertumbuhan dan keadilan sosial

1. Produktivitas dan Pertumbuhan versus Keadilan dan Keadilan Sosial

Mengejar kepentingan diri sendiri dan kepemilikan pribadi merangsang timbulnya semangat besar seperti yang dijelaskan oleh Smith dan Marx. Pasar dan persaingan memastikan bahwa sumber daya yang langka akan berada di tempat yang memanfaatkannya secara paling produktif. Hal ini terbukti jauh lebih efisien dibandingkan yang bisa dicapai oleh sebuah perekonomian terencana.

Di sisi lain, pasar juga menciptakan distribusi yang tidak merata dan dengan fluktuasi siklus dan kerentanan terhadap krisis, seperti yang dijelaskan oleh Keynes, pasar secara struktural tidak stabil. Karena itu, pasar harus dibingkai agar bisa mengendalikan krisis. Negara kesejahteraan harus bisa melindungi manusia terhadap risiko pasar. Tentang pajak penghasilan progresif (yaitu, terkait dengan meningkatnya pendapatan) serta pajak warisan dan pajak properti, harus direkayasa agar terjadi pemerataan. Dan, tentang kebijakan anggaran belanja, pajak dan suku bunga, negara harus mengendalikan siklus perekonomian. Artinya, dalam kondisi krisis ekonomi, belanja publik harus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas konsumsi dan mendorong investasi masyarakat lewat pemberian kredit murah.

Fleksibilitas dan Keamanan

2. Fleksibilitas dan Inovasi versus Perlindungan Kerja dan Keadilan Sosial yang Komprehensif

Di satu sisi, kompetisi dan persaingan telah menyebabkan inovasi. Di sisi lain, masa menganggur dan krisis yang menyertainya, juga harus diatasi

lewat perlindungan terhadap pekerja dari PHK berupa tunjangan sosial. Perubahan struktural yang drastis, seperti yang terjadi ketika menurunnya industri pertambangan di daerah Ruhr, hanya dapat diatasi lewat kebijakan struktural terarah untuk mengembangkan lapangan pekerjaan baru.

3. Pemilikan Pribadi dan Kompetisi vs Keterkaitan Sosial dan Regulasi

Sistem ekonomi yang nyaris sepenuhnya meniadakan kepemilikan pribadi dan alat-alat produksi serta persaingan, telah gagal. Setiap sistem ekonomi yang berhasil, berdasarkan kepemilikan pribadi dan kompetisi. Namun, hal ini tidak menafikan tanggung jawab sosial melalui kepemilikan. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 14 Konstitusi Jerman: “Kepemilikan dan warisan, dijamin. Kepemilikan [...] bertanggungjawab. Penggunaannya juga harus melayani kepentingan publik.” Untuk memastikan keadilan pasar dan menghindari monopoli perorangan, persaingan harus diatur.

4. Fungsi Otonomi Perusahaan vs Partisipasi Pekerja dan Bingkai Kebijakannya

Dari hak atas kepemilikan, menyusul hak menjadi seorang pengusaha. Namun, pengambilan keputusan dalam perusahaan tidak hanya di tangan pemegang saham, tetapi juga melibatkan pekerja yang melalui kerja mereka menciptakan nilai tambah. Keputusan bisnis, perlu dibatasi oleh pengambilan keputusan bersama.

Dari hal tersebut, berkembang empat dimensi berikut:

- penetapan bingkai kebijakan
- Pengembangan logika pasar
- Hak untuk terlibat dan hak dalam pengambilan keputusan
- Regulasi makro-ekonomi

Secara keseluruhan, ini berarti bahwa dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai sosdem, logika pasar dapat berkembang dalam konteks politik. Membolehkan kepemilikan, sekaligus tunduk pada kepentingan umum. Hal ini dipastikan, tidak hanyabahwa para pemegang saham tetapi juga pekerja terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Stabilitas perekonomian dipastikan dengan peraturan makro-ekonomi, yaitu nega-ra melakukan inter-

Pemilikan dan keterkaitan sosial

Keputusan pengusaha dan partisipasi pekerja

Empat dimensi kebijakan ekonomi

vensi melalui kebijakan anggaran dan tingkat suku bunga dalam sebuah pertumbuhan yang stabil dan tingginya lapangan kerja.

Apa artinya semua ini bagi sosdem?

- Siapa yang tertarik pada isu-isu ekonomi, sebaiknya memahami berbagai landasan teori serta mampu mengidentifikasi ideologi dibaliknya.
- Sosdem memanfaatkan tidak hanya satu, melainkan berbagai landasan teori.
- Sebagai titik pusat adalah kapitalisme terkendali atau terkoordinasi, seperti yang dipromosikan oleh Keynes.
- Sosdem juga mempertimbangkan kritik kapitalisme oleh Marx, serta terkait efisiensi dan produktivitas seperti yang digambarkan oleh Smith.
- Sebuah tatanan ekonomi, juga harus didasarkan pada persaingan dan kepemilikan. Namun, pasar harus diatur. Krisis ekonomi juga harus diperingi negara secara aktif dan memastikan keterlibatan dan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan.

3. BERBAGAI SISTEM DAN TATANAN EKONOMI

Dalam bab ini, akan dibahas tentang

- relasi antara kapitalisme dan demokrasi yang, di satu sisi, saling bersitegang – namun, di sisi lain, saling mendukung;
- berbagai jenis kapitalisme terkait perbedaannya dalam koordinasi;
- istilah „Pasar Bebas Sosial“;
- apa saja pengaruh positif dari globalisasi, serta sisi gelapnya dilihat dari sudut pandang sosdem.

3.1. Kapitalisme dan Demokrasi



„Apakah super kapitalisme merusak demokrasi?“, demikian pertanyaan jurnal ekonomi „Manager Magazin“ dalam judul sampulnya, Maret 2008. Gambar yang dipajang adalah kepala belalang. Dalam laporan utamanya, ditulis bahwa globalisasi pasar bebas⁶ bisa menghapus kepercayaan terhadap demokrasi. Dalam analisisnya, disebutkan bahwa banyak masyarakat yang tidak lagi percaya bahwa dalam proses globalisasi, mereka akan memperoleh keuntungan ekonomi. Akibatnya, hilang pula kepercayaan terhadap ekonomi dan politik.

Dengan demikian, artikel dalam jurnal „Manager Magazin“ membahas relasi ketegangan mendasar antara demokrasi dan kapitalisme.

6 Pasar bebas atau kapitalisme – apakah terdapat perbedaan arti dari kedua istilah tersebut? Substansi dari kedua istilah tersebut adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepemilikan dan persaingan. Dalam bahasa sehari-hari, seringkali terjadi bahwa „ekonomi pasar“ biasanya lebih banyak digunakan oleh pendukung sistem ekonomi liberal, sementara „kapitalisme“ lebih banyak digunakan oleh sura-suara yang kritis terhadap pasar. Namun, dalam buku ini, dua istilah tersebut digunakan tanpa menunjukkan ada nuansa ideologis di dalamnya.

Apakah „Super Kapitalisme“ merusak demokrasi?

*Keterkaitan historis:
dari demokrasi dan
kapitalisme*

Secara historis, terdapat keterkaitan erat dalam kelahiran demokrasi dan kapitalisme. Kelahiran demokrasi seringkali dikaitkan dengan keberadaan pasar-pasar bebas. Di Eropa abad ke-18 dan 19, tuntutan kebebasan individu awalnya dikaitkan dengan ekonomi yang berlandaskan pada persaingan bebas dan kepemilikan pribadi (bandingkan Bab 2, Pengantar mengenai Adam Smith). Berbarengan dengan tuntutan tersebut, muncul keinginan tentang kepastian hukum dan hak-hak dasar yang melekat, tuntutan terkait partisipasi politik dan perwakilan masyarakat dalam negara. Demokrasi pertama dalam abad moderen tercetus lewat kemerdekaan Amerika Serikat (AS) dengan seruan „No taxation without representation!“ (tiada pembayaran pajak tanpa perwakilan dalam negara) – artinya, sangat erat dengan tuntutan partisipasi ekonomi dan politik. Setelah tahun 1989, munculnya negara-negara pasca-komunisme berbarengan dengan liberalisasi ekonomi dan demokratisasi.

*Apakah negara-
negara demokratis
ekonominya
berhasil?*

Cukup lama bisa dipastikan bahwa negara-negara demokratis, secara ekonomi, lebih berhasil dibandingkan negara-negara bersistem non-demokratis. Sangat kasat mata, kesejahteraan di Barat dan kegagalan ekonomi di Blok Timur. Namun, saat ini, terdapat pula negara-negara yang meskipun tidak demokratis mampu memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Contoh paling kasat mata adalah China, yang perekonomiannya berkembang sangat pesat dan tanpa banding setelah masuk dalam sistem kapitalis meskipun dalam proses tersebut tidak mengalami demokratisasi. Juga di beberapa negara, sinkronnya derap langkah antara liberalisasi ekonomi dan politik (belum?) tidak terlihat. Hal ini terbukti dalam publikasi tahunan indeks „Economic Freedom of the World“, yang mengklasifikasi kebebasan ekonomi dan politik. Pada dua peringkat teratas kebebasan ekonomi, dapat ditemukan di Hongkong dan Singapura.

Tercatat, (masih?) ada negara-negara dengan sistem kapitalis otoriter. Sedangkan, setiap negara demokratis yang ada, selalu berlandaskan ekonomi pasar.

*Hubungan penuh
ketegangan antara
kapitalisme dan
demokrasi*

Padahal, hubungan antara demokrasi dan kapitalisme bukannya tanpa ketegangan. Demokrasi berdasarkan kesetaraan: „one man, one vote“ –setiap suara, harus memiliki bobot yang sama. Sedangkan, ekonomi pasar berbasis ketidaksamaan. Dalam sistem ekonomi kapitalistis, “kue” yang diproduksi akan dibagikan dalam potongan-potongan yang tidak sama. Benar, bahwa

lewat distribusi bisa dibagi rata, namun bila setiap orang memiliki potongan yang sama besarnya, rangsangan pun ikut menghilang.

Ketidaksetaraan bisa berarti, antara lain, pelaku ekonomi yang kuat akan mengembangkan kewenangan veto yang bersifat menguasai dan menyebabkan „kerusakan demokrasi“. Ilmuwan politik, Wolfgang Merkel, mendefinisikan istilah tersebut sebagai berikut: „Rusaknya demokrasi akibat sebuah sistem kekuasaan yang ditandai oleh berfungsinya demokrasi elektoral yang mengatur peralihan pemerintahan, namun akibat kerusakan terkait logika fungsional dari satu atau beberapa bagian pemerintahan, telah menyebabkan kehilangan pilar-pilar penunjang lainnya yang (dalam sebuah pemerintahan demokrasi yang baik) berfungsi sebagai penjamin kebebasan, kesetaraan dan kontrol atas kekuasaan.“ (Merkel dkk., 2003: 66).

Artinya, meskipun terdapat pemilihan umum dan berbagai elemen demokrasi lainnya, namun semua itu seakan “terkubur oleh keberadaan faktor-faktor perusak.“ Hal ini terjadi, misalnya, bila seorang pelaku dalam masyarakat, secara ekonomis terlalu berkuasa sehingga mampu menjatuhkan veto atas keputusan kolektif. Contoh konkretnya, seorang investor memeras masyarakat terkait keputusan tempatnya berinvestasi dengan mengancam akan menarik modalnya, bila tidak diberikan kelonggaran kebijakan tentang pembatasan standar lingkungan hidup dan standar pekerjaan. Ketika ia berhasil memperoleh kelonggaran, berarti telah terjadi kerusakan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam buku awal dari serial buku sosdem, pada halaman 62–66 dan 89 dan seterusnya, berangkat dari ulasan Thomas Meyers, “Teori Sosial demokrasi”, dijelaskan tentang hubungan demokrasi dengan kapitalisme pasar.

Gambaran pada halaman 43 (Ilustrasi 4), menunjukkan paradoks demokrasi: Di satu sisi, kapitalisme adalah persyaratan bagi demokrasi. Di sisi lain, bisa saja bila persyaratan bagi sebuah regulasi pasar tidak mencukupi, yang artinya meniadakan hak sebagian anggota masyarakat, maka hal tersebut akan menuju pada rusaknya demokrasi.

*Ketidaksetaraan
bisa menyebabkan
kerusakan
demokrasi”*

*Faktor pengganggu
demokrasi*

*Hubungan antara
demokrasi dan
kapitalisme pasar
menurut teori T.
Meyer*

Paradoks demokrasi



Ilustrasi. 4: Paradoks Teori Demokrasi

Milton Friedman: ekonomi pasar melahirkan demokrasi

Pemahaman serta kesadaran terkait risiko kapitalisme bagi demokrasi itulah yang membedakan sosdem dari Libertarian demokrasi. Libertarian ekonom seperti Milton Friedman menyatakan bahwa ekonomi pasar membawa kebebasan politik dan demokrasi.

Chile, sebuah contoh sebaliknya

Namun, dia memberikan bukti empiris sebaliknya. Friedman ternyata membuat kecewa teman-temannya pada tahun 1970an ketika menjadi penasehat diktator militer yang brutal di Chile. Diktator Augusto Pinochet, mengikuti resep Friedman menjalankan arah kebijakan liberalisasi ekonomi yang ekstrim. Berbeda dengan yang diharapkan oleh para ekonom libertarian, cara ini tidak melahirkan kebebasan politik, apalagi demokrasi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi menstabilkan kediktatoran. Dibandingkan negara-negara Amerika Latin lainnya, Chili adalah negara terakhir yang menjadi demokratis.

Aktualitas isu „Demokrasi dan Kapitalisme“

Mengapa relasi penuh ketegangan antara kapitalisme dan demokrasi semakin memperoleh perhatian publik, bahkan didiskusikan dalam sebuah jurnal ekonomi? Ekonom AS yang juga mantan Menteri Pekerjaan di Pemerintahan Clinton, Robert Reich, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2008, berjudul

„Super Kapitalisme – Bagaimana Ekonomi mengubur Demokrasi“ menawarkan sebuah jawaban. Ia menulis tentang kurun waktu pasca Perang Dunia II hingga tahun 1980an sebagai masa emas sebuah kapitalisme moderat (baca: hampir, karena juga untuk kurun waktu tersebut secara kritis, Robert Reich teringat tentang kurangnya kesempatan partisipasi perempuan dan minoritas dalam perekonomian). Di masyarakat Barat pasca perang dunia, ketika terjadi peningkatan standar hidup dan standar sosial minimum, tercapai kesepakatan antara Serikat Pekerja, pengusaha dan pemerintah. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang didominasi oleh *Laisser-faire*-Ekonomi, hal tersebut adalah sebuah kemajuan luar biasa. Dalam “Super Kapitalisme”, sebuah ekonomi yang terglobalisasi menghasilkan perbedaan penghasilan yang kembali

Superkapitalisme adalah sebuah istilah yang diwarnai oleh pemikiran Robert Reich yang menggambarkan perkembangan Kapitalisme dalam kondisi Globalisasi.

melonjak tajam. Hak pekerja dan standar sosial berada dalam bahaya dan tanggung jawab sosial dari pengusaha semakin rendah. Analisa

Robert Reich, mirip dengan apa dikutip pada awal bab ini dari „Manager Magazin“ dan seperti yang dikatakan Thomas Meyer, berupa Kekuatan pasar untuk mengelak dan menghancurkan demokrasi. Karena itu, Robert Reich mengusulkan diperkuatnya pengendalian pasar lewat regulasi dan penguatan hak-hak pekerja.

Super kapitalisme dan dampaknya

3.2. Kapitalisme Terkoordinasi dan Tidak-Terkoordinasi

Dalam Bab 2 buku ini, digambarkan tipe-tipe ideal sistem ekonomi berdasarkan pemikiran ekonom Smith, Marx dan Keynes. Dalam dunia nyata di negara-negara industri Barat, teridentifikasi dua model kapitalisme yang disebut dalam buku „Varieties of Capitalism“ sebagai kapitalisme terkoordinasi dan kapitalisme tidak-terkoordinasi. Cara ini, memiliki kekuatan besar dalam menjelaskan analisis dan penilaian terkait sistem ekonomi.

Kapitalisme terkoordinasi dan tidak-terkoordinasi

Perbedaan sistem ekonomi, terkait beberapa dimensi berikut:

- Sistem keuangan
- Hubungan kerja
- Sistem sekolah dan sistem pendidikan
- Relasi antar pengusaha

Kapitalisme tidak-terkoordinasi

Kapitalisme liberal disebut tak terkoordinasi dan dalam dimensi-dimensi tersebut di atas, memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- Sistem keuangan: Pendanaan perusahaan, umumnya dilakukan melalui pasar modal. Artinya, perusahaan bertindak sesuai prinsip 'Shareholder-Value'. Pemilik modal juga siap berinvestasi dalam perusahaan dengan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
- Hubungan kerja: Biasanya berjangka pendek („*hire and fire*"), sementara perlindungan pemutusan kerja biasanya lemah. Gaji, biasanya dinegosiasikan secara pribadi atau diputuskan pada tingkat perusahaan. Perkumpulan pengusaha dan serikat pekerja, relatif lemah.
- Sistem sekolah dan pendidikan: Lebih banyak generalis yang dihasilkan. Artinya, dalam pendidikan yang diajarkan kebanyakan tentang hal-hal yang bersifat umum, bukan yang langsung pada jenis kualifikasi terkait profesi tertentu. Ini, memang memudahkan mobilitas dalam bursa pekerjaan dengan berbagai jenis lapangan kerja, namun berarti pula terjadi kekurangan dalam hal pengetahuan spesifik terkait profesi.
- Relasi antara pengusaha: Terdapat hanya sedikit pembauran (misalnya, ketika para pengusaha, memiliki anggota komisaris lintas perusahaan) dan kerjasama di luar kegiatan masing-masing (misalnya, terkait penelitian). Perkumpulan sektor usaha, lebih berupa tempat para pelobi untuk perusahaannya ketimbang pelaku yang memiliki tanggung jawab sosial-kemasyarakatan.

Sistem Keuangan

Hubungan kerja

Sistem sekolah dan pendidikan

Hubungan antar pengusaha

Sistem ini, bisa fleksibel dan cepat beradaptasi mengikuti perubahan-perubahan pasar. Artinya, bahwa model produksi ini mendukung industri inovasi, namun tidak stabil serta tidak pasti bagi pekerja.

Kapitalisme terkoordinasi

Kapitalisme ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Sistem keuangan: Pendanaan, biasanya lewat kredit perbankan. Ini adalah modal yang „lebih tenang“ dibandingkan “*Shareholder-Value-Model*”, Lebih memungkinkan untuk investasi jangka panjang. Namun, bentuk ini bisa mempersulit pendanaan perusahaan, misalnya untuk pendirian perusahaan oleh pelaku pasar yang belum mapan. Selain oleh pasar, manajemen juga dikontrol dan dinilai oleh beberapa pelaku perbankan, pekerja dan negara (*Stakeholder-Model*).
- Hubungan kerja: Gaji akan dikoordinasi oleh masing-masing perusahaan, setelah dinegosiasikan secara sektoral atau kontrak gaji secara perbidangan. Hubungan kerja, biasanya berjangka panjang. Stabilitas dan pemerataan sosial, saling terkait. Terdapat Perkumpulan Pengusaha yang terorganisir dengan baik, begitu pula dengan Serikat Pekerja serta keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan di perusahaan.
- Sistem sekolah dan pendidikan: Model pendidikan terkait dengan bidang kualifikasi spesifik perusahaan yang didukung oleh perkumpulan pengusaha dan pekerja (*Sistem Pendidikan Dual*). Dengan demikian, diajarkan pengetahuan kejuruan sesuai bidang dan kebutuhan perusahaan.
- Relasi antar pengusaha: Seringkali, terdapat keterikatan antara para pengusaha lewat permodalan bersama. Perkumpulan sektoral memiliki peran penting dalam sistem politik

Kapitalisme terkoordinasi ditandai lewat stabilitas yang tinggi dan dinamika serta fleksibilitas yang lebih rendah dibandingkan kapitalisme tidak-terkoordinasi. Dalam sistem ini, alur dan proses produksi yang ada biasanya berlanjut dan hanya mengalami perubahan kecil secara parsial. Kemampuan inovatif, umumnya berlangsung dalam langkah-langkah kecil. Dalam mengantisipasi permasalahan baru, sistem ini hanya mampu menyesuaikan diri secara lambat.

Sistem keuangan

Hubungan kerja

Sistem sekolah dan pendidikan

Relasi antar pengusaha

Kedua sistem tersebut, memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dalam kemampuan bersaing, tidak ada yang mengungguli lainnya. Perbedaan, bisa membawa manfaat dari dua alasan:

1. Analitis: Dengan mencermati model, bisa diperjelas, mengapa model produksi yang berbeda ini terjadi. Bagi negara-negara *Anglo-Saxon*, berkat bursa kerjanya yang fleksibel dan memperoleh akses atas modal berisiko, lebih mampu mengembangkan industri inovatif, seperti teknologi informasi (IT). Adalah bukan sebuah kebetulan, bahwa perusahaan IT seperti Google, Microsoft dan sejumlah 'Start-ups' lahir dan bertempat di AS. Sedangkan negara-negara kapitalisme terkoordinasi seperti Swedia dan Jerman memiliki industri yang sangat mampu bersaing seperti dalam sektor otomotif atau permesinan. Negara-negara ini memproduksi barang, yang disebabkan oleh tingginya angka permodalan, membutuhkan perencanaan jangka panjang. Dalam industri tersebut, yang dibutuhkan bukan inovasi mendasar, melainkan perbaikan secara terus menerus. Faktor-faktor itu, membutuhkan lokasi yang memiliki tenaga kerja terampil yang bersedia bekerja dalam jangka panjang di perusahaannya serta memiliki akses terhadap permodalan yang "tenang".

2. Dua model tersebut, juga berbeda secara normatif. Nilai Sosialdemokrasi biasanya lebih bisa diwujudkan di negara dengan kapitalisme terkoordinasi. Hubungan kerja yang lebih panjang, menawarkan pekerja kepastian ketimbang bursa kerja „*hire-and-fire*“. Begitu pula, menjadi tempat yang aman bagi pengusaha yang ingin melakukan investasi jangka panjang ketimbang sekedar mencari keuntungan sesaat.

Ekonomi Pasar Sosial: Bagi varian kapitalisme terkoordinasi Jerman, sejak pasca Perang Dunia II, disebut „Ekonomi Pasar Sosial“ atau juga dikaitkan dengan kawasan pemerintahan Jerman (Barat) di kota Bonn, disebut „Kapitalisme Rhein“ mengacu pada Sungai Rhein. Ekonomi Pasar Sosial, adalah sebuah reaksi, di satu sisi, terhadap kesenjangan sosial akibat industrialisasi serta, di sisi lain, terhadap kebrutalan Pemerintahan Diktator Nazi. Ini adalah sebuah upaya Jalan Ketiga, antara kapitalisme tanpa kendali dan tatanan ekonomi sosialis. Disebut terakhir, pada masa pasca Perang Dunia II memiliki daya tarik yang tak bisa diabaikan. Waktu itu, konstitusi yang disepakati tidak menentukan sebuah tatanan perekonomian tertentu. Dalam Pasal 15, dimungkinkan sebuah bentuk alat produksi (yang) sosialis. Partai-partai politik pun bersikap kritis terhadap kapitalisme: CDU cabang Nordrhein-

Westfalen, dalam Program Ahlen pada tahun 1947, berbicara tentang sebuah „christlichen Sozialismus“ (Sosialisme Kristen) dan SPD menuntut nasionalisasi industri bahan baku dasar. Ekonomi Pasar Sosial, dengan demikian adalah sebuah upaya untuk menarik masyarakat Jerman kepada pasar bebas dan demokrasi.

Ekonom Alfred Müller-Armack mewarnai konsep dan istilah tersebut, dan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1947, tentang „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“ (Pengendalian Ekonomi dan Ekonomi Pasar), ia menulis:

„Kita berbicara tentang ‘ekonomi pasar sosial’ untuk menunjukkan bentuk ketiga kebijakan ekonomi. Ini berarti [...] bahwa ekonomi pasar diperlukan sebagai pilar utama tatanan ekonomi masa depan, hanya saja tidak dibiarkan jalan sendiri, seperti halnya ekonomi pasar liberal, melainkan secara sadar dikendalikan, menjadi ekonomi pasar yang dikendalikan secara sosial. (Müller-Armack 1947: 88)

Ini berarti secara konkret, bahwa di satu sisi ada persaingan, harga bebas dan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan di sisi lain, kesetaraan sosial lewat asuransi sosial dan pajak progresif. Peran negara tidak secara jelas ditentukan. Pada tahun-tahun awal Republik Federal Jerman (Jerman Barat), intervensi pasar dilakukan secara terbatas, misalnya, untuk mencegah monopoli. Sejak tahun 1970-an, pengaruh terhadap perekonomian diperluas dengan memasukkan pengendalian perekonomian.

Kapitalisme Rhein, diakui di seluruh dunia, karena berhasil menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja dengan memperluas negara sosial. Negara-negara Eropa lainnya, juga berusaha mengikuti model ini. Rancangan Konstitusi Eropa menetapkan dalam Pasal 1 sampai 3 ekonomi pasar sosial, sebagai target Uni Eropa.

Janji “kesejahteraan bagi semua” oleh Ludwig Erhard, memang tidak sepenuhnya ditepati, karena antara lain akibat krisis minyak tahun 1970-an dan reunifikasi, telah menciptakan masalah sosial baru terutama di pasar tenaga kerja. Meskipun demikian, telah tercipta sebuah kelas menengah yang luas, yang menstabilkan demokrasi yang relatif muda.

Popularitas konsep tersebut, kini telah menyebabkan konsep tersebut dipakai secara tidak tepat. Berbagai konsep kemudian diproyeksikan sebagai ekonomi pasar sosial.

Kebijakan dasar DGB (Serikat Pekerja Jerman), menyebut ekonomi pasar sosial sebagai “kemajuan besar dalam sejarah”. Hampir setiap gerakan politik, kini mengacu pada ekonomi pasar sosial, meski tentang kebijakan sosial berimbang, regulasi dan ekonomi, masing-masing memiliki interpretasi yang sangat berbeda.

3.3. Bingkai Persyaratan Baru dalam Globalisasi

Globalisasi - “dunia datar”

Mengendalikan globalisasi

1. Membongkar hambatan perdagangan

2. Munculnya ekonomi baru

3. Inovasi teknologi

“Dunia ini datar” adalah judul sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan metafora ini? Penulisnya, Thomas Friedman, mengajukan asumsi bahwa akibat globalisasi, ekonomi dunia memasuki sebuah era baru di mana persaingan global telah semakin pesat meningkat. Ekonomi makro hanya mampu sedikit menutup diri. Ruang gerak persaingan global telah diratakan. Friedman menyebut sejumlah penggerak globalisasi:

- Sejak tahun 1950-an, hambatan perdagangan melalui perjanjian internasional secara bertahap dikurangi. Lewat kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia WTO (begitu pula, pendahulunya, GATT) tarif masuk diturunkan, sementara pembatasan impor dicabut. Sejak 1970-an, nilai tukar antara mata uang nasional sebagian besar fluktuatif. Dalam zona perdagangan bebas regional di Uni Eropa dan NAFTA (Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko), praktis semua pembatasan perdagangan telah dicabut. Mercosur di Amerika Latin dan ASEAN di Asia Tenggara, juga seperti itu.
- Sebelumnya, Eropa, AS dan Jepang adalah kekuatan dominan di pasar dunia, namun kini, semakin banyak negara yang masuk ke dalam persaingan global. Secara bertahap sejak tahun 1970-an, China membuka diri dari perekonomian tertutup ke pasar dunia dan ekonomi pasar, dan sejak itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjadi eksportir terbesar di dunia setelah Jerman. Setelah tahun 1989, republik-republik pecahan Soviet dan Eropa Timur beralih ke ekonomi pasar dan bersaing dalam perdagangan dunia. Tak lama setelah itu, India mulai meliberalisasi ekonominya yang proteksionis dan dipenuhi regulasi, dan sekarang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi mendampingi Cina. Dengan demikian, lebih dari dua milyar manusia masuk ke dalam kompetisi global.
- Inovasi teknologi mempercepat dua proses yang didorong secara politis. Biaya untuk menelpon internasional, berkat teknologi serat digital berhasil ditekan, sehingga pusat telpon di India bisa menerima telpon dari AS lewat Internet, pesanan dari Hamburg, dalam beberapa detik bisa disampaikan ke Shanghai. Perangkat lunak untuk sebuah perusahaan di Paris, bisa dikembangkan di Bangalore, India. Administrasi kantor, bisa dipindahkan

dari London ke Praha. Logistik modern memungkinkan terjadinya rantai produksi yang kompleks, sehingga suku cadang dan bagian tertentu dari sebuah produk bisa diproduksi di tempat-tempat berbeda, begitu pula dipasang dan diperjualbelikan di seluruh dunia. Biaya transpor kapal laut semakin murah dan perjalanan dengan pesawat bukan lagi sesuatu yang mewah.

Siapa pemenang Globalisasi? Profit terbesar adalah ekonomi-pengetahuan. Negara dengan perekonomian yang memiliki penelitian intensif memperoleh pangsa pasar besar dalam perekonomian global. Mengapa? Bila iPod, sekalipun dikembangkan dengan biaya mahal, namun kemudian bisa diproduksi secara massal dengan harga relatif murah dan dalam jumlah besar dijual di pasar global. Karena, bila dibatasi hanya untuk pasar lokal, kemungkinan tidaklah menguntungkan karena besarnya biaya pengembangan. Sebuah program lunak, sebuah lagu atau file yang sekali diproduksi akan semakin menguntungkan apabila memiliki pangsa pasar yang besar.

Hal yang sama berlaku pula bagi produk industri teknologi tinggi. Sebuah disain mobil dikembangkan dalam kurun waktu 5-10 tahun dengan biaya tinggi. Teknologi tinggi seperti mesin hibrida hanya akan menguntungkan bila mobil yang diproduksi memiliki pangsa pasar besar. Industri otomotif di Jepang dan Jerman yang banyak berinvestasi dalam pengembangan, sangat memperoleh keuntungan dari globalisasi. Secara umum, negara yang memiliki standar pendidikan tinggi, yang menarik bagi peneliti dan pekerja kreatif, adalah pemenang globalisasi.

Terkait produk massal, situasinya berbeda. Sebuah pabrik, misalnya, memproduksi kemeja, kenaikan biayanya bersamaan dengan naiknya jumlah produksi. Keuntungan dalam persaingan berkat tingkat pendidikan dan infrastruktur yang lebih baik pada produk yang tidak terlalu membutuhkan penelitian dan pengembangan, tidak begitu banyak. Karena itu, produksi barang-barang sederhana massal, semakin menghilang dari negara-negara bergaji tinggi. Lokasi produksinya pindah ke negara-negara yang biaya produksinya rendah. Industri tekstil pernah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar di Eropa. Saat ini, tinggal beberapa celah yang masih tersisa, misalnya terkait disain. Sementara produksi massal telah berpindah ke India, Banglades atau China.

*Pemenang
globalisasi: ekonomi
pengetahuan*

*Dampak bagi
barang industri
kualitas tinggi*

*Dampak terhadap
produk massal*

*Keuntungan
globalisasi*

Artinya, dalam globalisasi keuntungan banyak diraih selain oleh sektor ekonomi pengetahuan dengan produk yang membutuhkan biaya tinggi dan masukan inovatif, juga bagi negara yang menawarkan biaya produksi rendah. Hal berikut ini, juga terjadi: Jerman sebagai juara dunia eksportir menjual mobil dan mesin berkualitas ke seluruh dunia. Para perancang mode dari Italia dan Perancis, mendisain pakaian mewah bagi seluruh dunia. Perusahaan perangkat lunak AS, Google dan Microsoft, sama terkenalnya di China dan Rusia seperti halnya di dalam negeri AS sendiri. Di sisi lain, perekonomian pengetahuan memperoleh keuntungan dari mengimpor produk massal murah: pemanggang roti, stoking, Mebel IKEA, semuanya, yang diprouksi di China, Eropa Timur dan negara bergaji rendah lainnya yang sejak dua dekade terakhir dibandingkan daya beli negara bergaji tinggi menjadi lebih murah.

Sisi gelap globalisasi

Perkembangan terkait globalisasi, ternyata juga memiliki sisi gelap:

*Kesenjangan
penghasilan*

1. Tidak semua orang dalam masyarakat memperoleh keuntungan yang sama dari globalisasi, banyak yang tidak, sebagian bahkan dirugikan. Bagi seorang pekerja pabrik tekstil di Eropa, bukanlah hal yang membesarkan hati bahwa tetangganya, perusahaan IT memperoleh banyak pesanan, kalau perusahaannya sendiri tutup karena dipindahkan ke negara bergaji rendah. Secara keseluruhan, kesejahteraan di negara-negara kaya maupun negara berkembang meningkat. Dua dekade sejak 1990, mencatat pertumbuhan tertinggi secara global. Di China sendiri, sejak tahun 1970an, 400 juta penduduknya telah melampaui apa yang didefinisikan oleh PBB sebagai batas kemiskinan – meski, kenyataannya, harus bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Tetapi, pada saat yang sama, terjadi kesenjangan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara industri, kesenjangan menjadi semakin lebar.
2. Liberalisasi perdagangan dunia adalah proses yang alot selama beberapa dekade. Meskipun demikian, apa yang disebut globalisasi “negatif” dimana banyak aturan dicampakkan, secara mendasar masih berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses globalisasi “positif” berupa pengembangan standar baru yang diperlukan yang berjalan sangat lambat. Sebagai contoh, Protokol-Kyoto untuk perlindungan iklim, setelah 15 tahun disepakati masih saja belum diratifikasi oleh semua negara, Lebih dari itu, juga tidak dijalankan oleh sebagian negara-negara yang telah meratifikasi. Standar sosial yang berlaku global, seperti norma-norma untuk perlindungan

*Tiadaanya standar
sosial internasional*

pekerja dari ILO (International Labour Organization), memiliki sifat tidak mengikat. Pakta-PBB tentang hak-hak dasar sosial-ekonomi, meski secara hukum internasional mengikat, namun tidak memiliki konsekuensi apapun. Sampai hal tersebut bisa dilaksanakan, masih menjadi perjalanan panjang.

Kecemasan yang seringkali diungkapkan terkait globalisasi adalah „*race to the bottom*“, yaitu balapan menuju standar sosial dan lingkungan terendah. Berlawanan dengan asumsi ini adalah kenyataan bahwa negara-negara dengan standar sosial-lingkungan tertinggi adalah juga negara yang memiliki perekonomian yang paling mampu bersaing. Sebagai contoh, terutama negara-negara Skandinavia dengan norma-norma lingkungan terpuji dan secara global memiliki sistem kesejahteraan terkompit, yang didanai lewat tingginya pajak. Artinya, tingginya biaya, tidak harus menjadi kelemahan persaingan bila, seperti di Finland, Swedia, Norwegia dan Denmark, membuat sistem pendidikan dan prestasi penelitian yang sangat bagus, infrastruktur yang baik, birokrasi yang efisien dan bebas korupsi serta perdamaian sosial. Sebuah negara kesejahteraan tingkat tinggi, juga bisa memiliki kemampuan bersaing dan kemakmuran dalam sebuah kondisi dan tuntutan keterbukaan pasar. Meski, tentu saja, memerlukan persyaratan berikut. Bila negara-negara dalam kadar yang sama secara kualitatif tidak bisa menawarkan hal selain menurunkan biaya, maka mereka akan menjadi pecundang globalisasi. Dan, terakhir, dari kenyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa negara-negara dengan standar tertinggi, memperoleh keuntungan dari globalisasi, dan ini bukan berarti standar-standar tinggi tersebut secara otomatis menyebar akibat globalisasi.

Tekanan persaingan membutuhkan penurunan standardsosial dan lingkungan?

Contoh sebaliknya dari Skandinavia

Apa artinya semua itu bagi Sodem?

- Kapitalisme dan demokrasi, kelahirannya sangat erat terkait satu dengan lainnya.
- Kapitalisme bisa membawa ketidakadilan, sesuatu yang “mengubur” demokrasi. Untuk mencegahnya, Sodem perlu menemukan jawabannya.
- Dari sudut pandang Sodem, kapitalismeterkoordinasi adalah model paling menguntungkan. Ia menjamin tatanan ekonomi yang stabil dengan keseimbangan sosial yang tinggi dan lapangan kerja jangka panjang dibandingkan kapitalisme tak terkoordinasi.
- Globalisasi menyebabkan kemajuan ekonomi global dan semakin tingginya dinamika perekonomian. Namun, ia juga menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial baru.

4. ORIENTASI EKONOMI-POLITIK SOSIAL DEMOKRASI

oleh Christian Krell, Simon Vaut

Dalam Bab ini akan dipaparkan

- Orientasi kebijakan ekonomi Sosdem;
- Nilai-nilai dasar sosdem, yaitu kebebasan, keadilan dan kesetaraan ;
- Hak-hak dasar, yang pembentukan dan realisasinya menjadi tujuan Sosia-ldemokrasi;
- Prinsip-prinsip keberlangsungan lingkungan, keseimbangan dan dinamika sosial yang harus mewarnai kebijakan ekonomi Sosdem ketika mengacu pada nilai-nilai dan hak-hak dasarnya.

Untuk mencapai itu, pertama secara sadar keluar dari bingkai ekonomi-politik sempit dan secara mendasar bertanya, pada nilai-nilai apa sebuah perspektif sosdem untuk seluruh masyarakat harus berorientasi. Karena, sebuah bentuk kebijakan harus selalu – juga bila hanya terkait dengan bagian dari keseluruhan seperti tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan yang menjadikan seluruh masyarakat sebagai pusat perhatian.

4.1. Nilai-Nilai Dasar

Kebebasan, keadilan dan solidaritas – itulah nilai-nilai dasar terpenting dari sosdem dalam menuju sebuah masyarakat, di mana nilai-nilai tersebut bisa diwujudkan. Nilai-nilai dasar sosdem semuanya sejajar, tergantung satu dengan lainnya dan saling melengkapi.

Nilai-nilai dasar sosdem dideskripsikan, diperkenalkan dan dijelaskan secara panjang lebar dalam buku bacaan „*Grundlagen der Sozialen Demokratie*“ (Landasan Sosial Demokrasi). Karena itu, dalam buku ini hanya dijabarkan secara singkat defenisinya.

- Kebebasan berarti menentukan kehidupan sendiri. Utamanya berarti bebas dari cengkeraman semena-mena negara dan masyarakat. Namun, kebebasan sejati baru dicapai apabila persyaratan ekonomi dan sosial dalam memanfaatkan kebebasan terciptakan.
- Keadilan dibangun dari persamaan martabat semua manusia dan menuntut tidak hanya persamaan di hadapan hukum, melainkan juga persamaan kesempatan sebagai bagian dari masyarakat serta jaminan sosial yang terlepas dari latar belakang keluarga, asal-usul sosial, kekayaan dan jenis kelamin.
- Solidaritas adalah kesediaan manusia untuk saling membela dan saling menolong. Sosdem Johannes Rau, menggambarkan solidaritas sebagai sesuatu yang menopang dan menyatukan masyarakat.

Sejarah tiga nilai dasar ini sangat menarik. Ketiganya memiliki akar sejarah pada masa 'Aufklärung' (pencerahan) dan waktu itu menjadi sebuah solusi revolusioner. Tuntutan atas „Kebebasan, Keadilan dan Persaudaraan“ mewarnai Revolusi Perancis tahun 1789. Sejak pertengahan abad ke-18, gerakan buruh selalu mengumandangkan tuntutan tersebut. Mengawali pendirian SPD oleh Ferdinand Lassalle pada 1863, bendera-bendera para buruh pun bertuliskan, tuntutan “Kebebasan, Keadilan dan Persaudaraan.”

SPD kemudian menjadi partai politik pertama yang pada tahun 1959 memasukkan nilai-nilai kebebasan, keadilan dan solidaritas dalam program dasarnya, yang dikenal sebagai „Program Godesberg“. Sekitar dua dekade kemudian (1978), CDU pun memasukkan tiga nilai dasar ini dalam program dasarnya yang pertama, meski dengan pemahaman yang berbeda.

Saat ini, nilai-nilai dasar tersebut bukan lagi tuntutan sebuah gerakan revolusioner, tetapi diterima sebagai hal mendasar dari semua aliran politik. Meskipun demikian adalah salah menganggap hal tersebut sebagai konsensus semua partai politik terkait nilai-nilai dasar kebebasan, keadilan dan solidaritas.

Masih saja, terutama dalam dua tataran, terdapat perbedaan penting antara aliran partai politik terkait nilai-nilai dasar tersebut.

*Kebebasan:
menentukan
kehidupan sendiri*

*Keadilan: ikut
memperoleh
kesejahteraan dan
jaminan sosial*

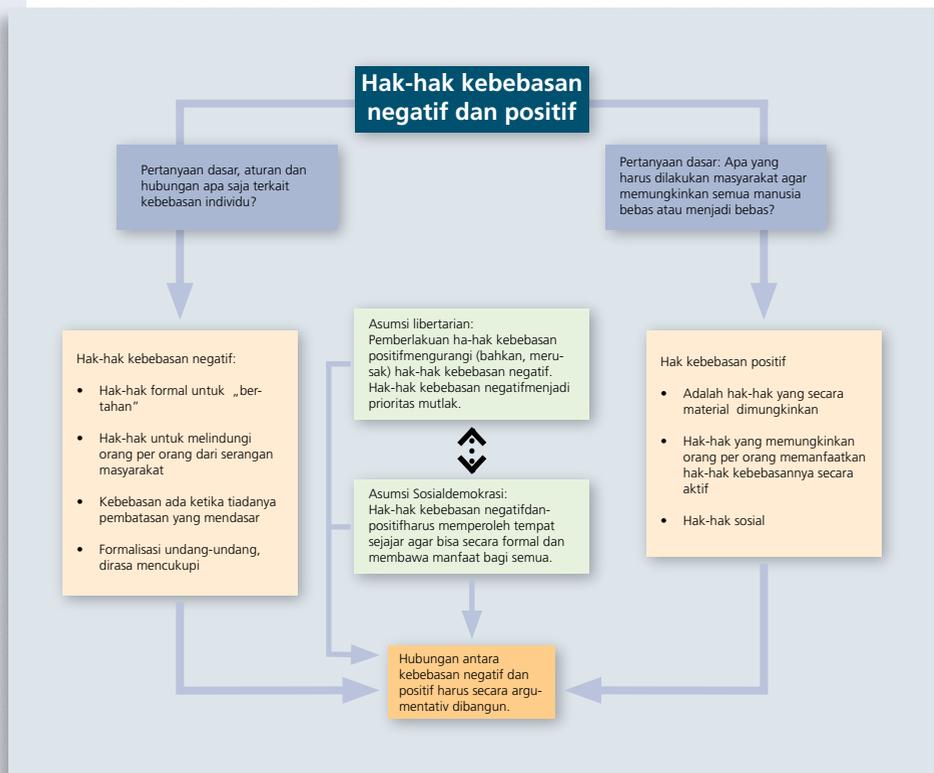
*Solidaritas:
saling mendukung*

Akar sejarah

Bacaan lanjutan:
*Tobias Gombert
(2008), Grundlagen
der Sozialen Demo-
kratie, Lesebücher
der Sozialen Demo-
kratie, Band 1,
Bonn, S. 9–43.*

1. Pemahaman tentang setiap nilai dasar

Setiap nilai dasar bisa saja diinterpretasi secara berbeda. Tidak semua, misalnya, memiliki pemahaman yang sama tentang kebebasan. Aliran liberal, misalnya, menekankan secara khusus pada kebebasan negatif, yaitu hak mempertahankan diri dari cengkeringan negara dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi. Sosdem melangkah lebih jauh dan menekankan bahwa kebebasan tidak hanya berupa hak mempertahankan diri melainkan juga hak-hak kebebasan positif sebanyak yang dimungkinkan. Kebebasan sejati, menurut perspektif sosdem, misalnya terkait kebebasan berpendapat, berarti bahwa tidaklah sekedar menetapkan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, namun yang penting adalah setiap warga lewat pendidikan dan lain sebagainya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan haknya atas kebebasan mengeluarkan pendapat.



Ilustrasi 5: Hak-hak kebebasan negatif dan positif

2. Hubungan antara nilai-nilai dasar satu dengan lainnya

Yang sangat penting, tidak hanya interpretasi setiap nilai dasar, melainkan juga hubungan antara satu nilai dasar dengan lainnya. Sangat menentukan apakah semua nilai-nilai dasar memiliki bobot yang sama atau apakah satu nilai dasar memiliki arti yang lebih tinggi dibandingkan lainnya. Hal ini bisa diperjelas dalam kebijakan liberalisme: dalam pemahaman hak-hak dasar liberal, kebebasan menjadi nilai sentral. Kebebasan, misalnya kebebasan persaingan atau kebebasan kepemilikan, menurut pemahaman liberal cenderung memiliki arti lebih penting dibandingkan keadilan yang dianggap membatasi nilai kepemilikan pribadi. Sosdem tidak membedakan setiap nilai, melainkan menekankan bahwa semua nilai dasar memiliki arti yang sejajar.

Menjadi jelas: meskipun semua aliran politik penting di Jerman mengakui nilai-nilai dasar kebebasan, keadilan dan solidaritas sebagai acuannya, namun pemahaman masing-masing aliran sangat berbeda satu dengan lainnya.

4.2. Hak-Hak Dasar

Apa yang digambarkan sebagai arti nilai-nilai dasar sebagai orientasi kebijakan ekonomi bagi sosdem, sebenarnya memiliki dua permasalahan:

Pertama, nilai-nilai dasar bukanlah tanpa kontroversi. Berbagai aliran politik dan budaya yang berbeda, juga dikaitkan dengan nilai-nilai dasar tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai dasar tersebut bukanlah landasan yang luas dan umum diterima untuk dijadikan sebagai orientasi kebijakan ekonomi.

Kedua, nilai-nilai tersebut sangat abstrak dan berada pada tataran abstraksi yang tinggi. Bila orientasi kebijakan ekonomi ingin dirumuskan, harus dilakukannya secara konkret. Sebuah pengantar yang tepat dan konkret untuk sebuah orientasi kebijakan ekonomi, tidak bisa hanya dengan mendefinisikan nilai-nilai dasar saja.

Karena itu, nilai-nilai dasar sosdem adalah sebuah bingkai penting bila ingin merumuskan kebijakan ekonomi sosdem. Namun, bingkai tersebut harus dibangun berdasarkan landasan yang luas dan terikat serta dilengkapi dengan tuntutan yang tepat dan konkret.

Perbedaan pembobotan nilai-nilai dasar

Nilai-nilai dasar sebagai basis orientasi kebijakan ekonomi: dua permasalahan

1. Nilai-nilai dasar bukannya tanpa kontroversi

2. Nilai-nilai dasar sangat abstrak

Para pemikir sosdem, selalu berkuat dalam mencari jawaban atas tantangan tersebut. Ilmuwan politik, Thomas Meyer, antara lain mengusulkan jawaban atas tantangan tersebut agar sosdem tidak hanya mengacu pada nilai-nilai dasar tetapi juga pada hak-hak dasar. Sebagai titik acuan bagi teori sosdem, ia menyebut hak-hak dasar yang termaktub dalam Pakta HAM dari PBB. Dalam buku bacaan „*Grundlagen der Sozialen Demokratie*“ (Landasan Sosial Demokrasi), hal tersebut diuraikan secara rinci.

Banyak alasan yang mendukung dalam penentuan orientasi kebijakan ekonomi sosdem agar mengacu pada Pakta PBB:

- Pakta PBB secara global merupakan sumber yang paling diakui dan terikat secara hukum serta menjadi sumber lintas-kultural dan lintas negara bagi hak-hak dasar dan dengan demikian sebagai landasan kehidupan bersama umat manusia.

- Pakta PBB dirumuskan sangat konkret dan rinci terkait hak-hak ekonomi bagi setiap orang.

Karena itu, dalam buku ini, pakta PBB perlu dijabarkan secara lebih tepat dan juga perlu diuji apa artinya bagi kebijakan ekonomi sosdem dan di mana perbedaan sosdem dibandingkan aliran politik lainnya.

Pada tahun 1966, PBB merancang dua pakta internasional tentang hak-hak asasi manusia.

Pakta tentang hak-hak sipil dan politik (Pakta Sipil) terutama berisi tentang hak-hak kebebasan negatif, yaitu hak-hak menangkis ancaman intervensi negara atau masyarakat teradap kebebasan individual. Misalnya, hak atas kebebasan dan keamanan individual (Artikel 9) atau hak tanpa batasan atas kebebasan berpendapat (Artikel 19) dan pemilihan umum yang bebas dan rahasia (Artikel 29).

Pakta tentang hak-hak ekonomi, sosial budaya (Pakta Sosial) terutama berisi apa yang disebut hak-hak kebebasan positif, yaitu hak-hak yang dimungkinkan, lewat rekayasa negara dan masyarakat untuk mendorong dan memungkinkan kebebasan perseorangan. Di sini terdapat, misalnya, hak

atas pekerjaan (Artikel 6) serta kondisi pekerjaan yang adil, aman dan sehat (Artikel 7), hak atas organisasi serikat pekerja independen (Artikel 8), hak atas keamanan sosial (Artikel 9) dan atas pendidikan yang bebas dan pendidikan tinggi (Artikel 13).

Saat ini, 151 negara telah meratifikasi pakta sipil, sedangkan 148 negara meratifikasi pakta sosial. Namun sayangnya, pakta-pakta tersebut juga ditan-datangani oleh negara-negara yang secara sistematis melanggar hak-hak kebebasan fundamental. Sangat jelas, bahwa bentuk formal pakta-pakta tersebut belum cukup untuk mencapai apa yang ditulis dalam pakta: „Ideal manusia bebas yang terbebas dari ketakutan dan keadaan darurat“. Jarak antara apa yang tertulis dan pemenuhannya, seringkali sangatlah jauh.

Selain itu, kewajiban negara terkait pemenuhan hak-hak dalam pakta sosial tidak secepatnya berupa pemenuhan hak-hak dasar, melainkan hanya dalam bentuk sikap untuk secara bertahap dipenuhi. Di sini, dijabarkan kewajiban bertindak negara agar secara formal tentang hak-hak mendasar agar bisa dipenuhi.

Tujuan sosdem adalah apa yang termaktub dalam pakta PBB terkait hak-hak dasar politik, sipil, sosial, ekonomi dan budaya agar tercapai di mana-mana, bahwa hak-hak tersebut tidak sekedar berlaku formal, tetapi juga secara riil diberlakukan. Sosdem, pada intinya, adalah program yang secara konsekuen mewujudkan hak-hak kebebasan positif dan negatif di seluruh dunia.

Tapi, dapatkah hak-hak kebebasan positif dan negatif dipersandingkan? Apakah keduanya benar-benar sama pentingnya? Ataukah yang satu berada di atas yang lain? Sebuah debat tentang hal tersebut pernah dipicu, misalnya, oleh Oskar Lafontaine ketika dalam sebuah wawancara ia mengajukan pertanyaan apa manfaatnya kebebasan berpendapat bagi seorang penderita AIDS di Afrika („*Der Tagesspiegel*“, 15. Agustus 2008). Artinya, apakah hak-hak kebebasan hanya bermanfaat bagi orang mempunyai yang mampu mengartikulasikan pendapatnya di media massa? Apakah kebebasan pers berguna bagi seseorang yang sangat miskin sehingga tak mampu membeli koran? Amartya Sen, filsuf-ekonom dari India, yang memperoleh Hadiah Nobel dalam kegiatannya, berkesimpulan bahwa: „Belum pernah ada kondisi darurat kelaparan dalam sebuah negara demokratis dengan pers bebas“ (Sen

Hak dan penerapan Pakta PBB, seringkali tidak sebanding

Sosialdemokrasi: perwujudan Pakta PBB

Bisakah hak-hak kebebasan ditimbang satu dengan lainnya?

1999). Alasan terjadinya darurat kelaparan, biasanya, karena masalah distribusi dalam pengertian kurangnya akses terhadap bahan pangan yang tersedia. Satu pemerintahan yang harus bertanggung jawab kepada warganya dan berkeinginan agar kembali terpilih, secara jangka panjang tidak bisa terus-menerus berlaku tidak peduli atas kondisi sosial yang buruk, terutama bila hal tersebut dipublikasikan oleh pers yang bebas. Kebebasan, demikian Sen, juga membawa keseimbangan sosial. Untuk itu, lanjut Sen, negara dan masyarakat harus menciptakan landasan perilaku dan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan hanya akan langgeng bila terdapat ukuran minimal dari jaminan sosial dan tunjangan hidup, misalnya untuk kesehatan dan pendidikan.

*Kebebasan negatif
& positif saling
terkait*

*Willy Brandt: „Juga
kebebasan dari
kemiskinan dan
ketakutan“*

Hak-hak dasar sipil dan sosial, begitu pula hak-hak kebebasan positif dan negatif saling bergantung satu dengan lainnya dan tidak bisa diadu satu dengan lainnya. Willy Brandt, dalam pidato perpisahannya sebagai ketua partai, juga mengungkapkan keterkaitan tersebut: „Bila saya harus mengatakan, apa yang selain perdamaian bagi saya lebih penting dari lainnya, maka jawaban saya tanpa jika dan tapi adalah: kebebasan. Kebebasan bagi banyak orang, bukan bagi segelintir. Kebebasan pemikiran dan hati nurani. Juga kebebasan dari kondisi darurat dan ketakutan (Brandt 1987: 32). Yang menjadi kepedulian Willy Brandt, di satu sisi dari kesewenang-wenangan dan penindasan dan dengan demikian terkait hak-hak kebebasan negatif, di sisi lain, kebebasan berkaitan dengan kehidupan yang secara material berkecukupan dan dengan demikian terkait dengan hak-hak kebebasan positif. Dengan kepeduliannya terhadap dampak nyata dari hak-hak dasar tersebut itulah yang membedakan Sosdem dari demokrasi libertarian.

Sosdem dan Demokrasi Libertarian

Pertama-tama, sosdem dan demokrasi libertarian secara ilmiah adalah tipe-tipe ideal yang secara riil dipastikan tidak akan ditemukan. Namun, untuk menentukan posisi, adalah penting untuk memahami kedua model demokrasi ini.

Baik demokrasi libertarian maupun sosdem berbasis pada model demokrasi liberal dan dengan demikian keduanya memiliki akar yang sama, yaitu:

*Model demokrasi
berbeda....*

*... dengan akar
yang sama*

- Demokrasi pluralistis dan negara hukum
- Kekuasaan politik yang terikat konstitusi
- Kedaulatan rakyat dalam prinsip mayoritas demokratis

Namun, keduanya secara jelas berbeda dalam hal relasi antara hak-hak kebebasan positif dan negatif. Demokrasi libertarian berangkat dari asumsi bahwa hak-hak kebebasan positif akan menyunat hak-hak kebebasan negatif dan bahkan, pada akhirnya, dapat menghancurkannya. Sosdem, sebaliknya, berkeyakinan bahwa hak-hak kebebasan negatif dan positif harus diperlakukan sejajar agar baik secara formal berlaku maupun secara riil benar-benar terjadi.

Sebuah hak-hak kebebasan dasar dalam bentuk formal saja seperti dari sudut pandang demokrasi libertarian, tidaklah cukup bagi sosdem, karena kesenjangan ekonomi akan menyebabkan

- relasi ketergantungan dan ketertindasan,
- hubungan kerja yang tidak manusiawi,
- kemungkinan pemahaman tentang hak-hak politik warga yang berbeda. (Bandingkan, Meyer 2005: 14).

Pada contoh kebebasan berpendapat, menjadi jelas: Dari sudut pandang libertarian cukup, bila negara tidak melakukan apapun untuk membatasi kebebasan berpendapat, misalnya, terkait sensor terhadap pers. Sedangkan, dari sudut pandang sosdem negara harus melakukan langkah penting berikutnya berupa aktif mendukung pemberian kesempatan yang riil dan sama bagi semua warga untuk mengeluarkan pendapat. Untuk itu, antara lain, semua warga harus memperoleh akses yang sama terhadap informasi dan memiliki pendidikan yang cukup agar mampu mengungkapkan pendapat. Selain itu, seseorang yang memiliki hak kepemilikan atas media massa, harus diatur agar ia tidak menggunakan kekuasaannya atas media untuk memanfaatkannya mempublikasikan pendapatnya melebihi yang lain. Sebuah penyalahgunaan seperti itu melawan keterkaitan sosial dari kepemilikan, hal yang menjadi ciri khas penting sosdem. Dari sudut pandang libertarian, intervensi terhadap kebebasan kepemilikan seperti itu, tidak disetujui.

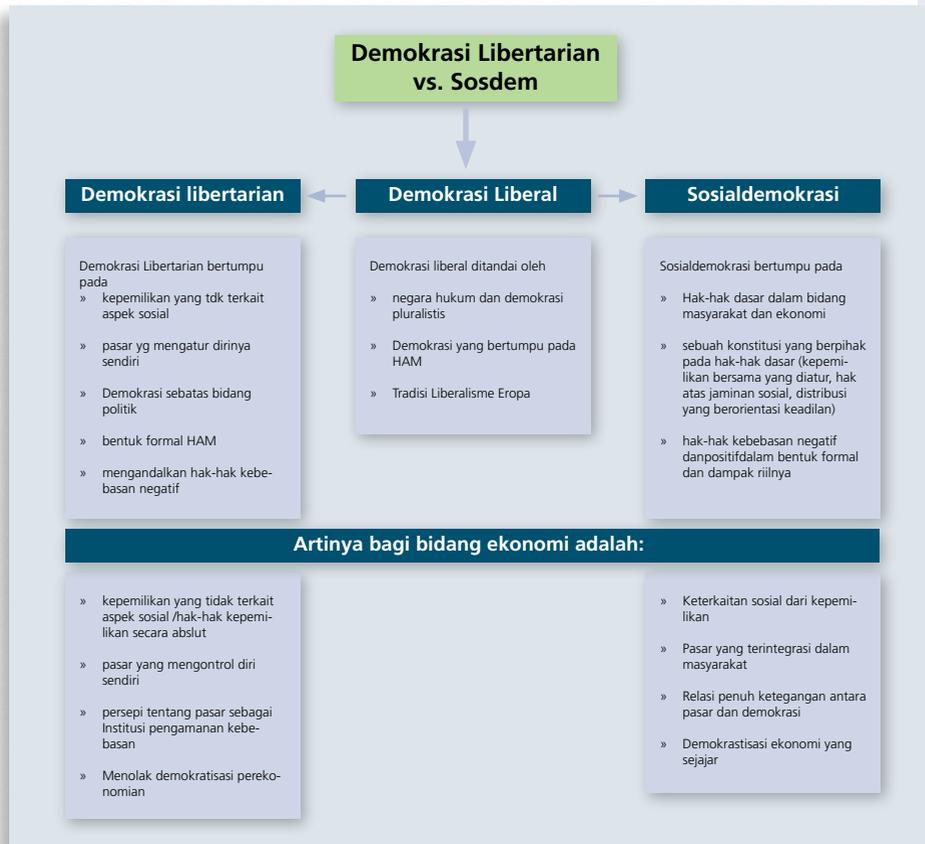
Bentuk formal hak-hak kebebasan tidaklah cukup

Contoh: kebebasan berpendapat

Meskipun berasal dari akar yang sama, sosdem dan demokrasi libertarian memiliki pandangan yang berbeda, dan karena itu terkait tatanan ekonomi juga memiliki tujuan yang sangat berbeda.

Perbedaan mendasar terlihat misalnya pada persepsi tentang pasar. Demokrasi libertarian memahami pasar sebagai ungkapan kebebasan dan karena itu meyakini pasar yang mengatur dirinya sendiri. Sebaliknya, sosdem menekankan bahwa pasar yang sepenuhnya bebas, dapat menimbulkan hasil yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Krisis keuangan 2008 adalah sebuah contoh. Karena itu, sosdem menginginkan integrasi pasar dengan masyarakat melalui bingkai persyaratan secara politis dan lewat regulasi oleh negara.

Menjadi jelas, bahwa meskipun sosdem dan demokrasi libertarian secara historis memiliki titik pangkal yang mirip yaitu dari demokrasi liberal, terutama dari kacamata kebijakan ekonomi, sangat berbeda satu dengan lainnya:



Ilustrasi 6 : Liberal, libertarian dan Sosdem dalam perbandingan (terkait bidang ekonomi)

Persepsi tentang pasar dari sosdem juga tertuang dalam 'Program Hamburg' dari SPD:

„Bagi kami, pasar adalah alat yang perlu dan lebih unggul dibandingkan bentuk-bentuk koordinasi ekonomi lainnya. Namun, pasar yang dilepas tanpa aturan, menjadi buta ekologis dan buta sosial. Pasar tidak memiliki kemampuan, untuk memproduksi barang-barang publik. Agar sisi positif pasar bisa berkembang, secara umum diperlukan sebuah negara yang mampu memberikan sanksi, undang-undang yang berpengaruh dan pembentukan harga yang adil.“ (Program Hamburg 2007: 17)

4.3. Prinsip-Prinsip Kebijakan Ekonomi

Tiga prinsip

Apa artinya hak-hak dan nilai-nilai dasar sosdem bagi kebijakan ekonomi sosdem?

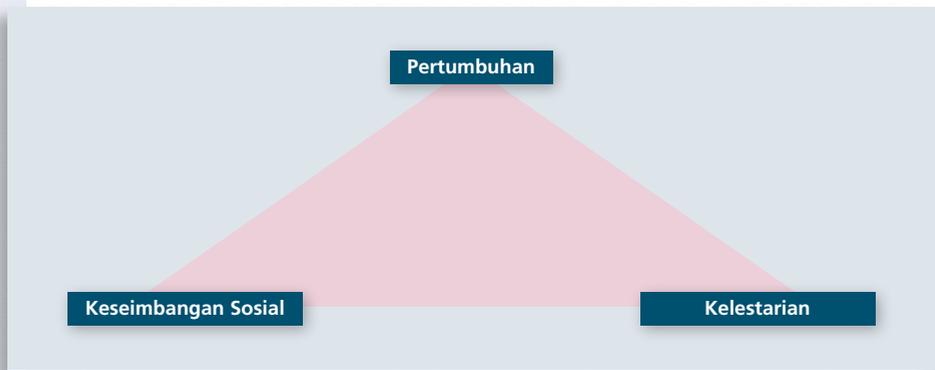
*Pertumbuhan,
keseimbangan sosial
dan keberlanjutan*

Di sini, diasumsikan bahwa sebuah kebijakan sosdem yang menginginkan agar nilai-nilai dasarnya benar-benar terlaksana, harus berorientasi pada tiga prinsip berikut ini:

- Pertumbuhan
- Keseimbangan sosial
- Keberlanjutan

Dari sudut pandang sosdem, ketiga prinsip tersebut harus diperhatikan dan diberlakukan secara sama dalam kebijakan ekonomi. Disitulah letak perbedaan antara sosdem, libertarian dan kelompok-kelompok populis kiri, yang masing-masing hanya berkonsentrasi pada satu dari prinsip-prinsip tersebut. Karena, hanya bila semua prinsip tersebut diperlakukan secara sama, akan memunculkan pertumbuhan berkualitas dan kemajuan yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan berkelanjutan.

Setiap langkah kebijakan ekonomi harus dinilai apakah memang mengacu pada prinsip-prinsip tersebut secara berimbang atau tidak. Prinsip-prinsip tersebut dengan demikian menjadi ukuran bagi kebijakan ekonomi sosdem.



Grafik 7: Segitiga prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Sosdem

Pertumbuhan

„Manusia“, demikian diformulasikan oleh Pakta PBB, “harus bebas dari ketakutan dan kondisi darurat kemiskinan”. Konkretnya, pakta ini ditulis dengan tujuan mendorong „sebuah pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta lapangan kerja yang produktif“. Kebebasan dari kondisi darurat kemiskinan mensyaratkan adanya pengamanan minimal bagi setiap orang dari sisi material. Untuk itu, harus disiapkan produk sosial, yang menjamin ukuran minimal kesejahteraan agar setiap insan mampu menjalankan hak-hak dasarnya. Di satu sisi, hal ini terkait dgn kesejahteraan perorangan, di sisi lain, juga terkait kesejahteraan umum, sehingga tersedia sumber daya yang cukup dalam mendefinisikan kewajiban/pelayanan publik.

Pertumbuhan Ekonomi: Kenaikan Bruto Produk Domestik (BPD), berarti pertambahan jumlah biaya dari barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian. Karena jamaknya semua itu terkait pertumbuhan ekonomi, maka sebuah stagnasi akan dicantumkan sebagai nol-pertumbuhan. Ketika produksi menurun, akan disebut sebagai minus-pertumbuhan. Harga-harga yang meningkat, setidaknya dalam pertumbuhan ekonomi nominal, dicatat sebagai positif. Sebaliknya, dalam pertumbuhan riil, kenaikan harga tidak diperhitungkan. (Leksikon Ekonomi 2009)

Sebuah masyarakat yang bebas, adil dan solidaris mensyaratkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini, awalnya, harus dicapai lewat pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Hanya lewat produktivitas tinggi dan penciptaan nilai tambah bisa diperoleh ruang gerak bagi perwujudan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Secara historis, bisa ditunjukkan bahwa ketika ekonomi

tumbuh berkesinambungan, maka pemerataan produk sosial secara layak dan adil akan lebih mudah terjadi dibandingkan masa-masastagnasi ekonomi. Pertumbuhan adalah juga sebuah persyaratan bagi perwujudan dari apa yang disebut sebagai nilai dan tujuan sosdem.

Tapi, apa tepatnya yang dimaksud dengan pertumbuhan? Kesepakatan tentang pertumbuhan yang benar dalam sosdem, telah berubah dalam beberapa dekade terakhir.

*Pakta PBB:
„Kebebasan dari
ketakutan dan
kondisi darurat/
kemiskinan“*

*Pertumbuhan
minimal sebagai
syarat bagi sebuah
masyarakat bebas,
adil dan solidaris.*

*Defenisi
pertumbuhan yang
mana?*

1967, *Undang-undang Stabilitas dan Pertumbuhan: „Pertumbuhan yang berkelanjutan dan terukur“*

Di bawah kepemimpinan menteri perekonomian dan keuangan sosdem, Karl Schiller pada tahun 1967, „pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan terukur“, menjadi tujuan utama kebijakan yang terpatri di dalam undang-undang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rendahnya tingkat pengangguran, inflasi dan keseimbangan perekonomian luar negeri terkait apa yang disebut “segi empat magis” sebagai tujuan kebijakan ekonomi dibakukan. Dengan demikian, tugas negara sesuai teori Keynes, menyeimbangkan fluktuasi ekonomi dan menghindari resesi.

1972, *„Batasan Pertumbuhan“: kritik terhadap orientasi pertumbuhan*

Sebuah studi berpengaruh yang dipublikasikan pada tahun 1972 berjudul „Batasan Pertumbuhan“, antara lain telah ikut menajamkan kesadaran kita bahwa pertumbuhan juga terkait pemanfaatan sumberdaya alam danerusakan lingkungan. Keduanya bisa memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Akibat kerusakan lingkungan, semakin gencar suara yang mempertanyakan apakah pertumbuhan layak menjadi tujuan atau apakah dalam jangka panjang, pembangunan masih dimungkinkan.

„Pertumbuhan“ dalam ‘Program Hamburg’:

„Kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi semua, dahulu dan sekarang, adalah tujuan-tujuan kebijakan ekonomi sosdem. Di masa lalu, kemajuan dipahami terutama sebagai pertumbuhan kuantitatif. Kini, tekanan perubahan iklim yang cepat, beban berat atas sistem ekologi dan pertumbuhan pesat penduduk bumi, memaksa pembangunan memberikan arah baru yang layak bagi masa depan. Tergantung pada hal tersebutlah sebuah pembangunan akan mencapai kemajuan atau tidak. Kami ingin mempersatukan kemajuan berkelanjutan, dinamika ekonomi dan keadilan sosial. Untuk itu, perlu pertumbuhan kualitatif dengan penggunaan sumber daya yang hemat. Manusia harus bisa memperoleh penghasilan bagi kehidupannya lewat pekerjaan tanpa rasa takut dan tanpa penindasan. Setiap manusia harus memperoleh bagiannya yang adil dalam kemakmuran ekonomi.“ (Program Hamburg2007: 42)

2000, *Strategi Lissabon: istilah pertumbuhan yang berbeda-beda*

Saat ini, pertumbuhan berangkat dari konsep berbeda yang mengupayakan inovasi teknologi, pembaruan ekologis dan keterpaduan sosial. Dalam konteks ini, pada tahun 2000 di bawah kepemimpinan kepala-kepala pemerintahan sosdem disepakati apa yang disebut Strategi Lissabon, yang rencananya dalam sepuluh tahun ke depan akan membuat Eropa menjadi kawasan yang secara ekonomi paling kompetitif dan dinamis di dunia.

Pemahaman tentang pertumbuhan juga mengalami perubahan, ketika euforia pertumbuhan tahun 1960an, diikuti oleh sikap kritis pada tahun 1970an.

Saat ini, berkembang pandangan beragam yang menggunakan istilah pertumbuhan berkualitas, yang antara lain berlandaskan penghematan pemanfaatan sumber daya dan melayani kemajuan sosial. Pandangan yang berbeda ini, memungkinkan keberlangsungan lingkungan hidup dan pemerataan sosial.

Pemerataan Sosial

Keseimbangan sosial sebagai prinsip kebijakan ekonomi adalah sebuah keharusan dari perspektif sosdem. Selain itu, secara ekonomi hal tersebut sesuai akal sehat.

Siapun yang menganggap serius nilai-nilai dan hak-hak dasar, harus mengupayakan kebijakan ekonomi yang diwarnai oleh keseimbangan (atau, tepatnya keadilan) sosial. Tidak hanya nilai-nilai dasar keadilan, kebebasan dan solidaritas yang sesuai dengan tuntutan tersebut, melainkan juga rumusan hak-hak dasar dari Pakta PBB. Dalam pakta tersebut, misalnya, dituntut „biaya hidup yang layak“, kemudian, bahwa „perempuan tidak boleh memiliki kondisi pekerjaan yang lebih buruk dibandingkan laki-laki dan bahwa pekerjaan yang sama harus digaji sama“, bahwa harus dipastikan adanya „sandang, pangan, dan papan berkecukupan“, juga dipenuhinya „hak atas pendidikan“ agar „artikulasi kepribadian manusia“ sepenuhnya bisa dilakukan.

Sosdem mencita-citakan sebuah masyarakat warga yang sejahtera, di mana setiap anggota masyarakat memperoleh jaminan bagi kehidupan material agar bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat serta dalam kehidupan berdemokrasi. Karena itu, menurut pandangan sosdem, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah keharusan, namun bukanlah untuk pertumbuhan *an sich* semata, tetapi juga harus mempertimbangkan pemerataan sosial dan keadilan. Buah dari sebuah perekonomian yang dinamis dan produktif, harus dibagi dengan cara yang adil. Dengan demikian, terjamin bahwa manusia bebas dari kecemasan eksistensi, juga lewat pekerjaan yang layak bisa membiayai kebutuhannya serta memperoleh bagian yang adil dari peningkatan produk sosial.

Istilah pertumbuhan berkualitas yang bertumpu pada penghematan pemanfaatan sumberdaya dan kemajuan sosial

*Pakta Sosial PBB:
„biaya hidup yang layak“*

Pemerataan sosial yang terintegrasi dalam konstitusi

Di Jerman, pemerataan sosial dalam tatanan perekonomian juga ditetapkan dalam konstitusi. Pada Pasal 19, didefinisikan bahwa Republik Federal Jerman adalah sebuah negara federasi sosial. Selain itu, Pasal 14 menentukan keterikatan sosial dari kepemilikan: „Kepemilikan adalah sebuah kewajiban. Pemanfaatannya, juga harus melayani kemaslahatan semua anggota masyarakat.“

Contoh dari kepemilikan yang terikat dengan aspek sosial

Siapa yang memiliki banyak rumah tinggal, maka tidak boleh menyalahgunakan properti tersebut sebagai obyek spekulasi, melainkan harus dijaga kondisinya dan disewakan. Seorang manajer tidak hanya bertanggung jawab atas keuntungan para pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat, misalnya dengan mempertahankan lapangan pekerjaan dan perlindungan lingkungan hidup. Siapapun yang memperoleh bagian sangat besar dari kemakmuran masyarakat, harus pula sangat banyak melayani masyarakat. Keterikatan sosial dari kepemilikan adalah ciri mendasar sosdem.

Kontradiksi antara pemerataan sosial prinsip prestasi?

Tetapi, bukankah pemerataan sosial bertolak belakang dengan prinsip prestasi dalam ekonomi pasar? Tidakkah pemerataan sosial menghilangkan rangsangan berprestasi yang penting bagi perekonomian dan pertumbuhan yang dinamis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjuk pada kenyataan tentang adanya ketegangan antara orientasi pertumbuhan dan pemerataan sosial.

Rodrik: penciptaan nilai tambah mensyaratkan adanya pemerataan sosial!

Namun, ternyata ada juga sebuah hubungan timbal-balik: Mekarnya produktivitas dan pertumbuhan selalu membutuhkan sebuah fondasi sosial. Pembentukan nilai mensyaratkan sebuah ukuran minimal dari pemerataan sosial. Demikianlah yang dibuktikan oleh ekonom AS, Dani Rodrik, bahwa negara-negara yang mampu memberikan jaminan sosial yang tinggi, juga adalah negara-negara yang secara ekonomi sukses. Hal ini, antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa jaminan sosial meningkatkan kesediaan berprestasi setiap manusia. Seseorang yang secara sosial terjamin, biasanya lebih siap untuk melakukan perubahan, menghadapi risiko dan berani mencoba sesuatu yang baru (bandingkan: Rodrik 1997: 178 dst.)

Mereka yang kritis juga mengakui: negara sosial memacu produktivitas

Keterhubungan tersebut, tidak banyak mengundang kontroversi. Presiden Ifo (*Instituts für Wirtschaftsforschung e. V.*) di München, yang dekat dengan pengusaha pun menekankan: “ (Tetapi) solidaritas memberikan para pemuda juga keamanan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan menghadapi risiko dan kesempatan hidup yang menjanjikan. Sejauh ini, saya tidak yakin tentang

kebenaran praduga luas bahwa negara kesejahteraan menelan biaya yang besar. Sebaliknya, saya merasa sangat mungkin bahwa negara kesejahteraan telah memunculkan daya produktivitas tinggi yang bertanggung jawab atas pesatnya pertumbuhan ekonomi pasca Perang Dunia II di negeri ini.” (Sinn 1986: 566–577).

„Pemerataan Sosial“

Dalam Program Hamburg:

„Penghasilan dan kekayaan di Jerman terbagi secara tidak adil. Kebijakan perpajakan Sosdem agar mendukung pembatasan ketidakadilan dan memberi kesempatan yang sama. Kami mendukung kenaikan gaji, yang berorientasi pada pertumbuhan produktivitas dan inflasi. Kami menginginkan kekayaan berada di tangan pekerja. Keterlibatan pemilikan pekerja dalam modal perusahaan sebagai sumber penghasilan tambahan menjamin sebuah keterlibatan pekerja dalam keberhasilan perusahaan. Selain itu, hal tersebut merangsang inovasi dan produktivitas.“ (Program Hamburg2007: 43 dst.)

Sosdem, dengan demikian mencita-citakan keseimbangan antara orientasi pertumbuhan dan pemerataan sosial. Sebuah contoh konkret adalah model Swedia. Dalam contoh negara-negara pada Bab 6, menjadi jelas bahwa tingginya pemerataan sosial adalah persyaratan bagi keberhasilan besar perekonomian Swedia.

Keseimbangan antara orientasi pertumbuhan dan pemerataan sosial

Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah prinsip utama ketiga dari kebijakan ekonomi sosdem. Keberlanjutan mencakup dimensi ekologi, ekonomi dan sosial.

Awalnya, keberlanjutan seringkali dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan ekologis. Karena memang, pemikiran terkait keberlanjutan bermunculan dari pertimbangan-pertimbangan ekologis. Istilah „keberlanjutan“ asal muasalnya dari perekonomian perhutanan: Kayu dari hutan, maksimal hanya bisa ditebang sebanyak yang bisa tumbuh, demikian tuntutan ilmuwan kehutanan, Georg Ludwig Hartig, pada abad ke-18. Saat ini, keberlanjutan ekologis berarti bahwa lingkungan sebagai landasan kehidupan bagi generasi berikutnya sedapat mungkin harus selalu dipertahankan. Karena itu, pemeliharaan sumber daya alam, perlindungan iklim, keragaman hayati dan pembatasan kerusakan lingkungan menjadi aspek-aspek yang penting. Hak-hak dasar yang tercantum dalam Pakta Sosial PPB, juga menekankan pada anjuran „Demi perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan“ (Pasal 13), harus

Asal muasal istilah “Keberlanjutan” adalah dari ekonomi perhutanan

secepatnya landasan kehidupan setiap orang dilindungi. Tidak hanya, karena tanpa itu persyaratan kehidupan generasi berikutnya akan terancam, melainkan juga karena di sini dan sekarang seluruh umat manusia tergantung pada air minum yang bersih dan udara yang sehat.

Sudah lama, para pemimpin sosdem memperingatkan pentingnya keberlanjutan:

1972, ide keberlanjutan oleh Gustav Heinemann

„Kami harus mengajukan pertanyaan, apakah bumi bakal beranjak pada kondisi malapetaka bila ledakan penduduk tidak dihentikan dan bila umat manusia dalam tempo yang semakin cepat menguras sumber daya alam seperti yang terjadi selama ini. [...] Untuk masa depan anak dan cucu kita, kita semua harus bersedia memperlambat dan, bila perlu, mengurangi hal tersebut.“ (Gustav Heinemann, 1972)

1983, Komisi - Brundtland

Pada tahun 1983, pemikiran Komisi-Brundtland (dinamakan sesuai nama mantan PM Norwegia), sebagai salah satu inisiatif PBB, menjadi masukan. Pernyataannya:

„Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengambil risiko bahwa generasi berikut harus bisa memenuhi kebutuhannya.“ (dikutip dari Hauff 1987: 46)

Dimensi ekonomi keberlanjutan

Namun istilah „keberlanjutan“, selain ekologis juga mengandung dimensi ekonomi. Dalam sebuah laporan akhir Komisi – dari Parlemen Jerman, tahun 1998, tentang „Konsep Keberlanjutan – dari acuan ke implementasi“ ditekankan bahwa: keberlanjutan ekonomi berarti bahwa pencapaian kemakmuran juga harus dimungkinkan bagi generasi penerus agar perekonomian pasar sosial bisa berlanjut. Untuk itu, belanja publik, terutama bagi negara kesejahteraan, agar terus-menerus didanai secara solid dan berkelanjutan serta melakukan investasi dalam pendidikan, penelitian dan infrastruktur.

Contoh sebagai peringatan

Pentingnya keberlanjutan ekonomi menjadi semakin kasat mata dengan memperhatikan krisis keuangan global. Sebuah pencapaian berorientasi keuntungan jangka pendek, yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan, bukan hanya membahayakan setiap perusahaan melainkan juga menggoyahkan seluruh perekonomian.

„Keberlanjutan“ dalam Program Hamburg SPD:

„Prinsip keberlanjutan memiliki arti, berpikir dari masa depan; melawan keuntungan jangka pendek, begitu pula terhadap dominasi ekonomi yang mengikuti logika murni administratif-manajerial; berangkat dari ide masyarakat, mengkonsepkan kebijakan dan keberagaman demokratis, keberlanjutan ekologis, integrasi sosial dan keterlibatan kultural dipahami sebagai acuan kebijakan sosdem.“ (Program Hamburg 2007: 17 dst.)

Keberlanjutan, juga memiliki dimensi sosial: Keberlanjutan sosial berarti semua anggota masyarakat memiliki kepemilikan bersama dan penyeimbang ketegangan sosial yang juga berkelanjutan. Hal tersebut berarti pengamanan kebutuhan dasar dan kepemilikan masyarakat yang berkelanjutan.

*Program Hamburg:
„Keberlanjutan
berarti: berpikir dari
masa depan“*

Pertumbuhan kualitatif– Persamaan hak untuk diwujudkan dari tiga prinsip tersebut

Pertumbuhan, pemerataan sosial, keberlanjutan – tiga prinsip ini menjadi kebijakan ekonomi sosdem yang secara sejajar dan bersamaan harus diwujudkan. Namun, apakah hal tersebut bisa terlaksana? Apakah pemerataan sosial membatasi kemungkinan pertumbuhan sebuah masyarakat? Bukankah pertumbuhan setidaknya membutuhkan sumberdaya alam dan dengan demikian, berakibat pada pembatasan keberlanjutan? Ketiga prinsip tampaknya berada dalam relasi ketegangan satu dengan lainnya. Bagaimana mereka bisa diwujudkan dengan hak yang sama?

Willy Brandt , telah mempertimbangkan berbagai hal di atas pada tahun 1973 dengan mengambil contoh prinsip pertumbuhan dan keberlanjutan:

„Baik perorangan maupun masyarakat, tidak boleh hidup dengan mengorbankan alam. Selain itu, pengembangan lingkungan kita tidaklah manusiawi. [...] Bising, pengotoran udara dan air, kenyataannya telah mempertanyakan keuntungan pertumbuhan. Tetapi, saya mengingatkan pemikiran pendek, bahwa solusi dari semua permasalahan adalah pembatasan pertumbuhan dan produktivitas. Pertanyaannya, lebih tentang di mana, bagaimana dan untuk apa pertumbuhan ekonomi – dan pencerahan bahwa pertumbuhan dan prinsip ekonomi harus bertumpu pada pelayanan kepada ummat manusia. Bila,

*Adakah ketegangan
dalam hubungan
antara tiga prinsip
tersebut?*

*Willy Brandt tentang
hubungan antara
pertumbuhan dan
keberlanjutan*

berbagai hubungan tersebut hasilnya tidak sesuai keinginan kita, maka kita semua harus berpikir lebih tajam, termasuk bekerja lebih keras.” (Willy Brandt, pernyataan pemerintah, 18 Januari 1973)

*Pertanyaan kunci:
pertumbuhan, di
mana, bagaimana
dan untuk apa?*

Dengan begitu, Brandt ingin mengatakan bahwa ia bukannya tanpa syarat menganjurkan prinsip pertumbuhan, melainkan selalu hanya lewat pemikiran mendalam tentang di mana, bagaimana dan untuk apa sebuah pertumbuhan dihasilkan. Siapa yang dilayani dan siapa yang diuntungkan? Artinya, sosdem tidak menganjurkan sebuah istilah pertumbuhan yang buta, melainkan pertumbuhan kualitatif yang mempertimbangkan pemerataan sosial dan keberlanjutan secara sejajar.

*Keberlanjutan
bisa memicu
pertumbuhan.
Contoh: kebijakan
industri yang
ekologis (Bab 7)*

Bila – sesuai dengan maksud Brandt – sedikit lebih tajam dipikirkan, akan ditunjukkan dengan cepat bahwa ketiga prinsip tadi tidak hanya berada dalam relasi penuh ketegangan, namun satu sama lainnya bisa saling tergantung dan saling mendukung. Jauh di atas, dalam teks sebelumnya, sudah diperjelas bahwa pemerataan sosial adalah sebuah persyaratan bagi sebuah perekonomian yang dinamis. Juga keberlanjutan ekologis, bisa memicu pertumbuhan. Saat ini saja, perusahaan di Jerman yang bekerja dengan energi terbarukan telah menjadi motor pertumbuhan perekonomian dan memastikan jumlah lapangan kerja yang tinggi. Dalam Bab 7, contoh dari praksis tentang kebijakan industri yang ekologis akan dijeaskan keterkaitan yang mirip.

*Dari keterikatan
antara
pertumbuhan,
pemerataan sosial
dan keberlanjutan
muncul
pertumbuhan
berkualitas*

Telah ditunjukkan pula bahwa tuntutan tiga prinsip, yaitu pertumbuhan, pemerataan sosial dan keberlanjutan diberlakukan secara sejajar, adalah sebuah tantangan besar, tapi pada saat yang sama juga bisa berarti sebuah kesempatan besar. Konsekuensi yang dihasilkan oleh tiga prinsip tersebut, selalu diuji kembali dan dirundingkan. Tidak ada kebenaran final dalam hal ini. Tetapi, bila ketiga prinsip

„Pertumbuhan Kualitatif“ dalam Program Hamburg SPD:

„Kami bekerja untuk kemajuan berkelanjutan yang menyatukan dinamika perekonomian, keadilan sosial dan akal sehat ekologis. Lewat pertumbuhan kualitatif, kami ingin mengatasi kemiskinan dan penindasan, memungkinkan kemakmuran dan pekerjaan yang layak bagi semua serta mengantisipasi perubahan iklim. Yang berlaku adalah, mengamankan landasan kehidupan alamiah bagi generasi penerus dan memperbaiki kualitasnya. Untuk itu, kami ingin memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melayani manusia.“ (Hamburger Programm 2007: 5)

tersebut secara bersamaan dipertimbangkan, akan terjadi pertumbuhan yang kualitatif dan menguntungkan seluruh masyarakat.

4.4. Ekskurs: Mengukur Pertumbuhan Kualitatif

Bagaimana mengkuantifikasi kemajuan ekonomi? Indikator yang sering digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara dalam kurun waktu satu tahun. Bila PDB-nya meningkat, maka disebut terjadi pemulihan ekonomi, sedangkan bila terjadi stagnasi atau penurunan PDB, maka disebut resesi. Pentingnya PDB, tidak perlu diperdebatkan. Belanja publik, pengurangan pengangguran dan kemakmuran sebuah masyarakat tergantung pada pertumbuhan ekonomi.

Namun, sebagai alat pengukur kemajuan ekonomi, PDB meninggalkan banyak bolong. Dalam pandangan sosdem, gambaran yang dihasilkan dengan menggunakan PDB tidaklah lengkap karena sekedar menjelaskan berapa banyak secara keseluruhan yang telah diproduksi, tetapi tidak menjawab berbagai pertanyaan berikut:

- Bagaimana hasil produk domestik didistribusikan? Apakah pembagiannya adil? Apakah kelompok kecil elit memperoleh bagian sangat besar dari sumber daya? Pembagiannya menggunakan kriteria apa? Menurut kebutuhan, kinerja atautkah lapisan sosial?
- Seberapa ramah lingkungan produk yang dihasilkan? Apakah sumber daya diinvestasikan dalam perlindungan lingkungan? Atautkah pertumbuhan dibiayai lewat pengurasan sumber daya alam?
- Bagaimana pertumbuhan dihasilkan dan kemana mengalir hasilnya? Apakah dengan biaya utang negara dan konsumsi? Atautkah berupa investasi dalam infrastruktur, pendidikan dan penelitian sehingga memungkinkan pertumbuhan jangka panjang?

*Kemajuan ekologis=
Produk Domestik
Brutto?*

*Bolongnya
PDB*

1. Pemerataan

2. Lingkungan

3. Keberlanjutan

4. Pekerjaan tanpa bayar

- Bagaimana mempertimbangkan aspek prestasi non-meneter? Apakah PDB meningkat berkat bertambahnya jam kerja? Bila kerja voluntir dan pekerjaan rumah tangga dirubah menjadi pekerjaan dalam bidang usaha, mengapa terjadi peningkatan PDB padahal jumlah yang dihasilkan sama?

Istilah pertumbuhan yang beragam ...

Untuk menjawab semua pertanyaan tadi, perlu dikembangkan sebuah istilah yang kompleks terkait kemajuan perekonomian serta sebuah istilah pertumbuhan yang beragam yang melampaui dari sekedar pertanyaan tentang berapa banyak sebuah perekonomian makro memproduksi.

Istilah Pertumbuhan Klasik	Perluasan Istilah Pertumbuhan
<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kinerja perekonomian	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kinerja perekonomian• Pemerataan sosial• ekonomi berkelanjutan

... „Indeks untuk kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan“ (ISEW)

Inisiatif awal memformulasikan sebuah pertumbuhan komprehensif, berasal dari ekonom Bank Dunia, Herman Daly, dalam „*Index of Sustainable Economic Welfare*“ (ISEW, bandingkan: Daly/Cobb 1989). Didalamnya mencakup:

- Pembagian penghasilan (semakin kecil pemerataan, berarti semakin sedikit peningkatan kesejahteraan umum)
- Pekerjaan tanpa bayar (pekerjaan rumah tangga, dan sukarela/voluntir)
- Pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan
- Kerusakan/beban lingkungan
- Berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam
- Biaya pemanasan bumi

ISEW menunjukkan, bahwa perekonomian dunia sejak beberapa dekade terakhir secara umum meningkat, namun kesejahteraan umum meningkat tidak seimbang, karena antara lain, kerusakan lingkungan dalam periode tersebut juga meningkat. Dipastikan memang sulit berbagai faktor yang membebani lingkungan dikuantifikasi. Dan, hasil ISEW secara detil bisa pula diragukan. Namun, ia bisa menjadi contoh bagi sebuah pemahaman yang kompleks terkait kemajuan perekonomian, dibandingkan metode pengukuran yang biasa berlaku saat ini seperti yang ditunjukkan lewat PDB.

Bacaan lanjutan:

Michael Dauderstädt (2007), *Soziale Produktivität oder Umverteilung? Herausforderungen für eine Politik der neuen Wertschöpfung*, Berliner Republik 3/2007.

5. PERBANDINGAN PROGRAM EKONOMI PARTAI-PARTAI POLITIK

Oleh Tobias Gombert

Dalam bab ini, akan

- diperbandingkan program dari lima partai politik di *Bundestag* (Parlemen Jerman),
- dianalisis gambaran tujuan berdasarkan model ekonomi terkoordinasi dan tidak terkoordinasi, dan
- ditempatkan posisi partai-partai politik tersebut terkait pertumbuhan berkualitas, serta bagaimana sosdem sebagai model memandangnya.

Partai politik manakah yang paling dipercaya memiliki kompetensi terkait kebijakan ekonomi? Partai mana pula yang paling baik dalam menangani permasalahan pasar kerja? Siapa yang memiliki konsep terbaik dalam bidang sosial-politik? Berbagai pertanyaan tadi akan dipresentasikan dalam setiap analisis menjelang pemilihan umum parlemen di Jerman. Dengan sedikit pengecualian, biasanya partai-partai konservatif dinilai memiliki kompetensi dalam bidang perekonomian, sedangkan kompetensi dalam bidang sosial-politik diperkirakan lebih dimiliki oleh partai-partai kiri. Pembidangan mendasar parta-partai politik ini relatif stabil dari waktu ke waktu dan mendokumentasikan sebuah orientasi umum dalam menilai partai politik. Tetapi, benarkah semua itu? Jawabannya, bisa ya bisa tidak.

Pembidangan tadi, dalam cakupan yang terbatas mencerminkan acuan atau fokus utama dari berbagai partai tersebut. Namun demikian, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga menyesatkan, karena tidak mendefinisikan kompetensi ekonomi dan sosial-politik dan juga tidak menjelaskan keterkaitan antara berbagai kompetensi tersebut. Sebenarnya, sebuah acuan kebijakan ekonomi tidak terbatas dalam bingkai yang sempit, untuk membuktikan tindakan kebijakan ekonomi, melainkan harus jauh lebih luas untuk memperlihatkan keterikatannya dengan aspek sosial-politik dan bidang kebijakan lainnya. Kebijakan ekonomi adalah kebijakan masyarakat – sebuah perekonomian yang berfungsi dengan baik, selalu menjadi bagian dari sistem masyarakat dan hal tersebut harus ikut dipertimbangkan. Bila kita ingin meneliti „Program Ekonomi-Poli-

tik” sebuah partai politik, maka seharusnya dicermati seluruh program serta diterangkan berbagai peran ekonomi yang digambarkan dan sistem perekonomian yang dituju.

Untuk itu, penggunaan “kompas”, akan sangat membantu: Tidak hanya ekonomi yang dituju, melainkan juga titik berangkatnya sebagai orientasi harus diperjelas - seperti yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.

Dan, benar saja, perbedaan antara partai dalam analisis kondisi awal (*das sein*) dan konsep terkait kondisi yang diinginkan (*das sollen*), cukup jelas – seperti yang dicermati dari program-program yang berlaku. Berikut ini, diperkenalkan program dari berbagai partai politik dalam bagian kebijakan ekonomi dan menurut kategori untuk mendeskripsikan perekonomian terkoordinasi dan tidak-terkoordinasi.⁷

5.1. Program Hamburg – Landasan Program SPD (Partai Sosdem Jerman)

Pada tahun 2007, SPD menyepakati Program Hamburg, sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, yaitu Program Godesberg. Intisari dari kebijakan ekonomi dan Program Hamburg, dengan sedikit variasi, tidak banyak beranjak dari Program Godesberger (1959): „Bagi kami berlaku, persaingan sebanyak dimungkinkan, dan regulasi negara sebanyak yang dibutuhkan.“ (S. 43).

Dengan demikian, pemahaman mendasar Program Hamburg adalah ekonomi pasar terkoordinasi, meski melihat relasi antara negara dan pasar bukanlah dua hal yang berdampingan, melainkan sebagai bagian dari kebijakan. Tetapi, pemahaman kebijakan ekonomi nampak jelas berangkat dari motto “regulasi negara” hanya akan berdampak positif sebanyak yang “dibutuhkan” – artinya harus adanya sebuah “keniscayaan” bagi intervensi politik. Tetapi, buat apa sebuah „regulasi negara“ dibutuhkan?

Keniscayaan dan batasan bagi sebuah regulasi negara, didukung oleh dua

7 Untuk itu, kategori yang telah dijelaskan sebelumnya: Kategori „Hubungan antar Pengusaha“, di dalam program-program partai politik atau hanya secara marginal diungkapkan dan karena itu di sini diabaikan.

aspek mendasar berikut ini. Di satu sisi, memantau rusaknya sebuah pasar yang tidak atau kurang diatur. Sebaliknya, pencapaian cita-cita sosdem (halaman 16 dst.), garansinya hanyalah diperoleh dari masyarakat yang aktif dan demokratis dan sebuah negara yang melakukan pengaturan (regulator). Dalam gambaran umum, kerusakan pasar dan gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai memperlihatkan celah dan mandat politik masyarakat yang ditunjukkan oleh SPD dalam programnya.

Dampak positif, tetapi juga rusaknya pasar dirangkum menjadi motif utama Program Hamburg: „Bagi kami, pasar adalah sebuah keniscayaan dan alat yang unggul dari sebetuk perekonomian terkoordinasi. Namun, pasar yang dibiarkan tanpa regulasi, akan menjadi buta secara sosial dan lingkungan. Secara mandiri, pasar tidak mampu untuk menyediakan barang-barang publik dalam porsi yang terukur“ (halaman 17). Tanggung jawab sosial, ekonomi dan ekologi juga tidak bisa dicapai lewat pasar, melainkan hanya mengacu pada kebijakan dan oleh masyarakat. Apalagi, akibat terglobalisasinya pasar, jurang antara yang kaya dan miskin serta krisis ekologi di seluruh dunia, bukan hanya tidak mampu diselesaikan oleh pasar, melainkan diperburuk oleh pasar. Regulasi dan tawar-menawar lewat masyarakat serta pengendalian sangat dibutuhkan, bila menginginkan nilai tambah perekonomian bermanfaat untuk semua.

„Bagi kami, Sosialisme Demokratis tetap menjadi visi tentang masyarakat bebas, adil dan solidaris yang pencapaiannya menjadi tugas berkelanjutan. Prinsip aktivitas kita adalah sosdem“ (halaman 16 dst.). Kondisi saat

Tujuan „persamaan kedudukan“

„Kami menginginkan keterlibatan yang adil dan sejajar dari perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan yang menjamin biaya kehidupan. Pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan, seringkali dibayar lebih rendah. Padahal, pekerjaan yang sama harus dibayar sama [...] Yang dibutuhkan, kerangka undang-undang untuk keterlibatan yang sama oleh perempuan dalam posisi-posisi puncak di perusahaan, birokrasi, IPTEK serta dewan-dewan pemantau.“ (Program Hamburg 2007: 41)

ini, menjadi gambaran tujuan yang diinginkan, di mana nilai-nilai dasar dan perwujudannya yang tanpa batas serta berdampak bagi semua manusia sebagai orientasi, tidak hanya di Jerman melainkan juga di seluruh dunia.

Gambaran terkait tujuan, didukung oleh sebuah pemikiran tentang pembangunan. Tujuan dimaksud, tidak bisa dicapai melulu lewat

aturan negara, melainkan apabila aktor negara dan masyarakat sipil bahu membahu dalam bertindak. „Karena kami berpegang pada tujuan tersebut, maka kami berpegang teguh pada keunggulan demokrasi politik dan melawan sepenuhnya tunduk kepada negara melainkan menjadikan masyarakat sipil sebagai aliansi dan jaringan serta mencakup tindakan manusia yang bebas dan mandiri“ (halaman 17).

Untuk meningkatkan otonomi di tingkat Eropa serta mewujudkannya, kami berpegang pada landasan hukum Eropa dan berunding secara lintas batas demi kesepakatan terkait globalisasi, persamaan gender serta meningkatnya bobot UE sebagai tantangan bagi sebuah kebijakan ekonomi moderen. Bentuk pasar bebas terkoordinasi – dengan mempertimbangkan kerusakan akibat pasar dan gambaran tujuan sosdem – harus terus dikembangkan.

Tujuan „Terlibat dalam Pengambilan Keputusan“

„Ketika negara-negara tidak lagi mampu menetapkan bingkai sosial dan ekologi, maka hal tersebut harus dilakukan oleh UE (Uni Eropa). [...] dan ketika terjadi aktivitas lintas batas, maka hak-hak pekerja tidak boleh berhenti di perbatasan sebuah negara. Karena itu, kami menginginkan keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan Eropa. (Program Hamburg 2007: 26, 28f.)

Sistem keuangan: Pengaruh pasar uang dan modal, dibahas dalam bab khusus pada Program Hamburg. Hal ini mencerminkan meningkatnya arti pendanaan dan perpajakan perusahaan (juga di Jerman): „Kami ingin memanfaatkan potensi pasar modal bagi pertumbuhan berkualitas“ (halaman 46–47). Meskipun demikian, perlu dicermati kelemahan dan meningkatnya risiko krisis: „Ketika pasar uang melulu mencari keuntungan jangka pendek, hal tersebut membahayakan strategi pertumbuhan jangka panjang dari perusahaan dan, dengan demikian, menghancurkan lapangan kerja. Kami juga ingin, dengan pertolongan aturan bursa, memperkuat para investor yang – tidak sekedar mencari keuntungan secepatnya, tetapi memiliki pandangan jauh ke depan. Kami membutuhkan aturan main bagi para investor dan pengelola dana, yang secara sepihak berorientasi keuntungan dengan mengorbankan perusahaan yang secara substansial berinvestasi jangka panjang. Dengan keterkaitan jaringan internasional pasar barang dan pasar uang, sebuah regulasi internasional menjadi semakin penting“ (halaman 47). Di samping itu, karena berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan, keberadaan Sparkassen (bank Simpan-Pin-

jam) dan *Genossenschaftsbanken* (Bank Serikat Pekerja) harus sepenuhnya ditunjang – keduanya adalah faktor mendasar bagi perusahaan kecil-mene-ngh, serta juga memiliki arti sentral bagi perekonomian regional.

Hubungan Kerja: SPD melihat dirinya sebagai bagian dari tradisi gerakan buruh. Karena itu, fokus utama kegiatannya adalah demi tercapainya perbai-kan hak-hak buruh. Untuk itu, dalam regulasi internal tatanan dasar ekonomi, perlu dipastikan berlakunya otonomi dalam perundingan gaji (tarif) dan kese-pakatan bersama dihasilkan harus dipertahankan. Sebuah keputusan antarpihak yang dipindahkan sebatas internal perusahaan, tidak boleh terjadi. Upah minimum harus mendukung otonomi parapihak. Di dalam perusahaan, harus diwujudkan acuan bagi „internal demokrasi“ – penyertaan pengambilan keputusan dalam dewan pertimbangan perusahaan dan keterlibatan pekerja dalam dewan pemantau perlu diperkuat. Dua aspek baru ditampung dalam Program Hamburg, di mana hubungan kerja secara langsung dan tidak lang-sung menguntungkan pekerja. Bagian kepemilikan pekerja dalam kekayaan perusahaan ditingkatkan lewat dana lintas perusahaan. Asuransi pengang-guran harus dibangun lewat asuransi kerja, yang mengamankan pendanaan pendidikan lanjut serta membangun keluarga demi memperkuat hubungan kerja para pekerja dalam berhadapan dengan pengusaha.

Sistem Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Kejuruan Lanjutan: Di satu sisi, dual-sistem pendidikan dengan sekolah sebagai bagian dari tang-gung jawab negara, dan di sisi lain, merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan, perlu dipertahankan. Akan tetapi, sebuah sistem keuangan soli-daristis untuk pendidikan kejuruan, perlu ditunjang. Hal ini, jauh lebih baik dibandingkan praktek aliansi untuk memperluas lapangan kerja. Pendidikan kejuruan, harus tetap (atau, kembali) gratis. Pendidikan lanjutan sebagai pilar ketiga dari pendidikan kejuruan harus diberikan tempat yang terhormat.

Kebijakan Industrial: Sektor-sektor yang perlu memperoleh dukungan ne-gara dan masyarakat, terutama adalah pasar-pasar pionir dan pemberi arah baru, seperti energi terbarukan, jasa dan kesehatan, tapi juga pengrajin lokal. Investasi dalam Infrastruktur menjadi tugas utama yang diperkuat.

Dengan demikian, secara keseluruhan, Program Hamburg merupakan sebuah kebijakan ekonomi berdasarkan pertumbuhan berkualitas, yaitu pemerataan

sosial, keberlanjutan ekologi dan pertumbuhan yang didukung secara bersamaan dan setara.

5.2. Landasan Bagi Jerman – Program Partai CDU

Pada tahun 2007, partai CDU juga menyepakati sebuah program dasar. Pada intinya, ekonomi pasar sosial dipandang sebagai model yang berhasil sekaligus model masa depan: „CDU adalah partai ekonomi pasar sosial. [...] CDU menolak sosialisme dan berbagai bentuk kolektivisme. Hal yang sama, berlaku pula bagi kapitalisme tanpa kendali, yang sepenuhnya percaya pada pasar dan darinya tidak ditemui solusi bagi permasalahan sosial masa kini. Ekonomi pasar bebas, juga berlaku dalam Jerman yang (kembali) bersatu dan menjadi acuan dalam era globalisasi.“ (halaman 46 dst.).

Penolakan terhadap „kolektivisme“, juga tercetus dalam gambaran acuan „kewirausahawan“, yang menjadi titik pusat dan titik masuk ekonomi pasar sosial: „CDU adalah pengikut kewirausahawan yang bebas dan memiliki tanggung jawab sosial. Pengusaha dan pimpinannya menciptakan lapangan kerja yang aman dan mewarnai citra Jerman di dunia berupa nama baik dan identitas budayanya. Agar sukses, para pengusaha membutuhkan ruang gerak dalam kegiatannya serta bingkai kondisi yang sesuai, begitu pula dengan rangsangan berusaha“ (S. 49).

Sampai di sini, terlihat jelas bahwa inti pemikiran CDU berbeda jauh dengan SPD, baik dalam tujuan maupun cara pencapaiannya. Kewirausahawan yang bebas dan bertanggung jawab sosial dan himbuan tanggung jawab moral dan sosial oleh CDU, berhadapan dengan regulasi serta keterlibatan demokratis untuk merealisasi hak-hak dasar bagi semua manusia oleh SPD. Bagi CDU, kesadaran bertanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan pekerja diserahkan sepenuhnya kepada setiap pengusaha, tanpa ada intervensi negara.

Peran politik bagi CDU, juga mengalami degradasi: „ekonomi pasar sosial adalah sebuah tatanan persaingan. Dalam ekonomi pasar sosial, politik adalah kebijakan terkait tatanan.“ (S. 49). Karena itu, tugas negara adalah memastikan kebebasan perusahaan dan kebebasan kontrak, perlindungan terhadap

hambatan pasar dan perlindungan penyalahgunaan kekuasaan lewat perusahaan yang menguasai pasar dan transparansi pasar, serta secara internasional berupa keterbukaan pasar di bawah kondisi persaingan yang jujur (fair). (bandingkan halaman 49 dan 52).

Peran negara dalam relasi terhadap ekonomi pasar, pada dasarnya berorientasi pada pemahaman liberal, meski pada saat yang sama berpegang pada beberapa regulasi.

Sistem Keuangan: Semakin pentingnya artipasar uang dan pasar modal internasional dinilai secara positif sambil menekankan kesempatan Jerman dalam berinvestasi: „Dana-dana lepas yang sedang mencari tempat untuk ditanamkan, seperti misalnya *‘Private-Equity-Fonds’*, bisa ikut memperkuat perusahaan Jerman agar semakin mampu bersaing dan semakin inovatif“ (halaman 52). Menghadapi risiko, terutama akibat penguasaan pasar oleh kelompok-kelompok investor swasta, bagi CDU cukup diantisipasi dengan memanfaatkan lembaga-lembaga internasional dalam “kerangka aturan yang bisa dipercaya” untuk menjaga transparansi. (bandingkan halaman 52).

Hubungan Kerja: Bangunan hubungan kerja CDU, dikembangkan dari etika sosial gereja Kristen (halaman 50). Pada saat yang sama, juga diingatkan tentang kemungkinan-kemungkinan pengembangan individual: „Agar bisa berhasil, perusahaan membutuhkan pekerja berpendidikan baik, kreatif dan penuh motivasi. Sebaliknya, pekerja butuh keterlibatan, tanggung jawab dan ruang gerak, agar mampu secara menyeluruh dan berhasil mengembangkan kemampuannya. Pendidikan dan pendidikan lanjutan, memastikan kemampuan untuk bekerja dan berprestasi. Pada saat yang sama, bagi rencana hidupnya, para pekerja membutuhkan sebuah jaminan hak kerja dan hak sosial yang mendasar. Mereka memiliki hak atas bagian yang cukup dan layak dari kemakmuran masyarakat.“ (halaman 50). Perlindungan kolektif dari hubungan kerja, dipandang kritis. Karena itu, otonomi tarif (dalam merundingkan gaji) memang dipertahankan, namun pihak-pihak yang berunding diminta agar tidak kaku bertahan pada kontrak-kontrak per sektor pekerjaan dan agar „sebagian besar tanggung jawabnya diserahkan kepada perusahaan“ (halaman 58). Lewat „perhimpunan perusahaan untuk pekerjaan“ yang dimungkinkan oleh undang-undang, agar regulasi perusahaan dibandingkan kontrak tarif semakin diperkuat. Bila hal ini berhasil dilakukan, seperti

yang sedang santer didiskusikan di kalangan pakar hukum, maka hal tersebut berarti sebuah revolusi hukum pekerjaan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan didukung, namun lebih untuk menguatkan perusahaan ketimbang untuk tataran perundingan terkait kontrak tarif (gaji).

Sistem Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Kejuruan Lanjutan: CDU juga sepakat dengan dual-sistem dalam pendidikan, karena bermanfaat bagi „keunggulan lokasi dalam persaingan internasional dan terbaik dalam mengatasi pengangguran remaja“ (halaman 38). Pemberi kerja, baik swasta maupun negara, dianjurkan lebih banyak menyediakan tempat pendidikan, meski dengan alasan „rasa tanggung jawab dan [lewat] rangsangan terukur“, bukan karena dipaksa oleh UU/negara (halaman 39). Di perguruan tinggi negeri, diusulkan agar dicoret klausul „iuran yang secara sosial tertanggungkan“.

Secara keseluruhan, CDU mempresentasikan diri sebagai penjaga ekonomi pasar sosial, yang berakar pada gambaran pengusaha yang penuh tanggung jawab. Namun, dalam kebijakan ekonomi banyak bersandar pada pemikiran liberal, misalnya dalam beragam bentuk usulan untuk deregulasi.

5.3. „Masa Depan itu Hijau“ – Program Dasar Partai *Bündnis 90/Die Grünen*

Program partai *Bündnis 90/Die Grünen*, sudah dipresentasikan ke publik sejak tahun 2002. Program ini, relatif paling panjang di antara partai politik yang diperbandingkan dalam buku ini. Intinya adalah, restrukturisasi tatanan ekonomi menjadi pasar bebas sosial dan ekologis, menuju era solar energi. Pengurusan sumberdaya alam, dipandang sebagai permasalahan utama masa depan. Keharusan restrukturisasi, merupakan sebuah proyek yang tidak hanya berupa kebijakan lingkungan, melainkan menjadi sebuah persyaratan dan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari sudut pandang kebijakan masyarakat, *Bündnis 90/Die Grünen* menginginkan pemahaman liberal yang berbeda dengan liberalisme pasar dan pemahaman partai-partai politik lainnya. „Pasar bebas sosial yang ada selama ini yang terlalu berpihak pada (keuntungan) pengusaha, tuntutan-nya tidak adil dan harus secepatnya dikembangkan lebih jauh. Aspek sosial

tidak bisa direduksi hanya sebagai fungsi birokrasi negara. Tanpa kebebasan kekuatan-kekuatan masyarakat, tanpa pengambilan keputusan sendiri oleh warga, tanpa prinsip subsidiaritas, maka solidaritas sosial hanya akan membeku di birokrasi. Kami mendukung masyarakat sipil dengan alat dan sumberdaya negara sambil membatasi (kewenangan) negara. Hal ini membedakan kami dari sosialisme negara, model-model politik konservatif dan pasar liberal.” (halaman 43). Karena itu, *Bündnis 90/Die Grünen* menganut sebuah „kerangka tatanan“, yang menjamin kepentingan ekologi, sosial dan budaya. (halaman 46).

Sistem Keuangan: Sistem keuangan dalam bentuknya saat ini, dinilai secara kritis oleh *Bündnis 90/Die Grünen*. Secara umum, bagi mereka, kekuasaan „para pemain global penguasa pasar“ harus diputus: „Karena itu, di satu sisi, kami mendukung sebuah kerangka tatanan yang demokratis dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kami juga mendukung informasi ekologi, rangsangan ekonomi bagi teknik dan produk ramah lingkungan sebagai kesepakatan dengan Industri“ (halaman 27 dst.). Satu hal yang dianggap sangat penting adalah integrasi pasar: „Celah antara globalisasi perekonomian dan lemahnya pengendalian kebijakan serta integrasi berbagai proses tersebut, harus ditutup. Upaya terluas yang dilakukan UE saat ini terkait tanggung jawab bersama, mengakhiri sebagian kedaulatan negara-negara anggotanya. UE harus meninggalkan keberpihakannya pada kebijakan ekonomi neoliberal dan lebih aktif dalam pembentukan sisi sosial-ekologis dari proses globalisasi“ (halaman 17). Hal tersebut, juga berlanjut dalam perekonomian global. Dituntut pengembangan lanjut lembaga-lembaga internasional dan pemberlakuan aturan yang mengikat serta standar minimal bagi transaksi keuangan. (halaman 59). Peran dari *Sparkassen* dan Bank Perserikatan, berbeda dengan SPD, tidak disebut-sebut, juga meski dukungan terhadap perekonomian regional menjadi fokus utama. (bandingkan halaman 54 dst.).

Hubungan Kerja: Bagi *Bündnis 90/Die Grünen*, dalam hubungan kerja „sebanyak mungkin manusia, harus dimampukan menjadi pelaku yang sadar dalam kehidupan ekonomi“ (halaman 47). Untuk mencapai hal tersebut, tarif otonomi (dalam perundingan antar pihak) harus tetap dipertahankan sambil memperkuat para pihak maupun dewan pertimbangan perusahaan. Pada saat yang sama, partai juga mendukung „meningkatnya diferensiasi pembangunan ekonomi dan struktur pekerjaan, termasuk secara regional, serta

memberikan solusi tarif (gaji) bagi sektor khusus secara berbeda-beda” (halaman 48), meskipun kontrak tarif secara rata, tetap dianggap penting. Dengan demikian, sebenarnya mendekati aliran bermantel kontrak tarif secara merata yang dilengkapi dengan tarif individual dan sektor khusus, serta kontrak tarif secara regional, *Bündnis 90/Die Grünen*, juga mendukung „Kepemilikan masyarakat dalam kekayaan produktif” (halaman 131). Apakah itu terkait regulasi perusahaan atau terkait dana lintas perusahaan, tidak disebutkan secara eksplisit. Mereka juga menuntut, keterlibatan dalam kepemilikan dan pengambilan keputusan, tidak boleh didiskusikan secara terpisah dan bahwa pengambilan keputusan perusahaan „harus disesuaikan dengan perubahan tuntutan masyarakat yang berubah” (halaman 131). Apa saja yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, tidak dijabarkan dalam program.

Sistem Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Kejuruan Lanjutan:

Dalam pendidikan kejuruan, *Bündnis 90/Die Grünen* menekankan bahwa setiap manusia harus memiliki kesempatan dalam sebuah masyarakat belajar, dan menata sendiri riwayat pendidikannya (halaman 99). Untuk itu, terutama memastikan sebuah pendidikan awal dan pendidikan kejuruan lanjutan, semacam „membangun sistem bertahap” (halaman 99). Pendidikan awal berdurasi pendek, dimaksudkan untuk fokus pada (keterampilan profesional dan lintas profesi) sebagai „kualifikasi inti” (halaman 100). Perusahaan memiliki tanggung jawab menyiapkan spesialisasi pekerjaan. Posisi tersebut, dibandingkan dengan SPD dan CDU, tidak begitu jelas diformulasikan: Apakah pendidikan kejuruan tetap berpegang pada dual-sistem dan apakah perusahaan tetap bertanggung jawab (baik dalam pendanaan, maupun terkait kurikulum bersama sekolah kejuruan), masih belum jelas. Lalu, bagaimana menjamin pendanaan dan organisasi kehidupan belajar, juga masih menjadi pertanyaan terbuka. Yang ada, baru berupa rumusan awal terkait keterlibatan pihak-pihak tarif dan bahwa harus ada „keseimbangan antara penggunaan sumber daya swasta dan publik” (halaman 103).

Secara keseluruhan, *Bündnis 90/Die Grünen* memiliki sebuah program yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam relasi antara negara dan pasar, termasuk terkait pertanyaan bagaimana ekonomi pasar seharusnya terkoordinasi, terdapat campuran beberapa aspek liberal (seperti, kerangka tatanan, tetapi juga kepemilikan individual dalam sistem pendidikan) dan sosdem. Bagaimana sebuah model masyarakat yang cair dicapai, masih memerlukan jawaban.

5.4. „Landasan Wiesbaden“ dari Partai Liberal Jerman (FDP)

Dari semua partai politik yang memiliki wakil di parlemen, FDP memiliki program tertua, yaitu „Landasan Wiesbaden“ dari tahun 1997. Sebuah ciri khas FDP ialah keyakinannya terhadap liberalisme: „F. D. P. Adalah partai liberalisme terorganisir dengan keyakinan terhadap akal sehat, pluralisme dan persaingan, yang membedakannya dengan partai-partai lain yang mengambil jalan pencapaian kemajuan lewat kepercayaan kepada negara dan intervensi negara“ (halaman 6). Peran negara menjadi kritik utama sekaligus titik awal pengambilan kebijakan bagi FDP. Sebuah „ekonomi birokrat negara“ (halaman 14) menghalang-halangi perkembangan ekonomi yang bebas dan fleksibel lewat „birokrasi karatan“. „Yang diinginkan kaum liberal, bukan ekonomi negara, melainkan sebuah ekonomi pasar yang membawa hasil sosial dan ekologi terbaik“ (halaman 6). Jalan yang dilihat kaum liberal adalah, prestasi ekonomi (lewat penghilangan intervensiisme negara dan kartel kekuasaan kelompok-kelompok kepentingan), yang dengannya, „kemampuan prestasi sosial“ bisa dicapai (bandingkan halaman 14). Hal ini mencerminkan tuntutan untuk memasukkan klausul swastanisasi dalam konstitusi, dengan formulasi bahwa ekonomi swasta harus diprioritaskan (bandingkan halaman 30). Sebagai acuan, FDP memakai ungkapan „ekonomi pasar sosial-ekologis“, meski defenisinya berbeda dengan CDU di satu sisi, dan *Bündnis 90/Die Grünen* di sisi lain.

Sistem Keuangan: Posisi FDP, bisa ditelisik dari formula pendek berikut: Sistem keuangan dan modal harus bebas. Penyesuaian pasar, dipertahankan lewat kemampuan bersaing. Dari sudut pandang FDP, berarti: „Daripada kepemilikan rakyat, kaum liberal lebih menginginkan sebuah masyarakat (yang terdiri dari) para pemilik. Kesempatan untuk memiliki memotivasi prestasi, menimbulkan keamanan sosial, dan memicu kesediaan untuk bertanggung jawab. Hal tersebut adalah persyaratan bagi terciptanya budaya baru, berupa kesediaan mengambil risiko dan kemandirian“ (halaman 15). Dari situ, bisa ditarik kesimpulan bahwa basis pendanaan modalpara pengusaha, sedapat mungkin ditingkatkan lewat dana swasta, tetapi juga lewat pasar modal dan penghapusan “pembatasan persaingan”. Tugas negara, sekedar mengatur: „Sebuah mata uang Eropa yang stabil dibutuhkan agar perekonomian Jerman dan Eropa secara internasional semakin mampu bersaing. Penyatuan

mata uang, menyempurnakan pasar” (halaman 25). Fokus utama FDP, menciptakan kondisi yang baik bagi para pemodal dan dengan demikian meningkatkan kesediaan mereka berinvestasi.

Hubungan Kerja: FDP merangkum perubahan pemahamannya tentang hubungan kerja dalam sebuah kalimat penuh motivasi: „Pekerja harus menjadi bagian dari pengusaha” (halaman 14). Persentase kepemilikan pribadi atas harta produktif harus secara signifikan ditingkatkan. Sebaliknya, FDP bersikap kritis terkait „Keterlibatan fungsionaris dalam pengambilan keputusan”. Namun, apakah hal tersebut berarti keinginan FDP untuk menghapus, membatasi atau sekedar memberi peranan sampingan dalam pengambilan keputusan kolektif bagi dewan pertimbangan perusahaan atau keterlibatan pekerja dalam dewan pertimbangan, tidak bisa dipastikan. Juga tuntutan keterlibatan pekerja dalam harta produktif, tidak dijelaskan bagaimana kemungkinan para pekerja mempengaruhi keputusan pengusaha dan perusahaan terkait nasib mereka. Inisiatif “menjadi bagian dari pengusaha”, nampaknya lebih berarti bagi “perorangan”. Yang jelas ditolak adalah kesepakatan tarif yang berlaku umum (halaman 14), sementara klausul umum (sebagai undang-undang?) perlu mencantumkan kebebasan perusahaan dalam menentukan bentuk pengorganisasian yang diinginkan terkait keterlibatan pekerja. Usulan-usulan FDP, secara keseluruhan, menginginkan sebuah revolusi dalam bidang hukum kerja di Jerman, sesuatu yang tak bisa disamakan dengan beberapa usulan yang belum rinci. Klausul dalam undang-undang (akan) membahayakan independensi perundingan tarif. Memprioritaskan regulasi perusahaan menunjuk pada pembalikan piramida hukum yang selama ini berlaku, berupa prioritas kontrak tarif sebagai kesepakatan antara perusahaan dan individual berhadapan dengan prinsip “apa yang menguntungkan bagi pekerja, itulah yang akan dipakai”. Sementara bagaimana akumulasi kekuasaan pengusaha dikontrol, masih belum terjawab.

Sistem Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Kejuruan Lanjutan: Pernyataan FDP tentang sistem pendidikan kejuruan dan lanjutannya, lebih bersifat umum. Juga di sini, dituntut „keterbukaan dan persaingan”, sambil mengurangi „birokrasi dan regulasi” serta mendukung dan mempersilahkan masuknya swasta (bandingkan 24). Selain itu, ditekankan perlunya „penyesuaian yang fleksibel dan pengembangan kualifikasi profesional dalam semua bidang” (halaman 14).

Secara keseluruhan program FDP adalah sebuah dukungan terhadap ekonomi pasar bebas tak terkoordinasi. Hampir semua permasalahan, penyebabnya dianggap berada pada kekakuan birokrasi dan negara, sementara kebebasan dan pasar menjadi solusi bagi hampir semua permasalahan. Kebebasan, didefinisikan sebagai kebebasan dari paksaan (negara). Dalam radikalitas liberalisme, program FDP hampir tidak menyisakan ruang bagi keinginan-keinginan lain.

5.5. „Butir-Butir Programatis Terpenting“ Partai „Die Linke“

Sebuah program yang komplis belum dimiliki oleh “Die Linke”, sebuah partai gabungan PDS dan WASG. Meskipun demikian, terdapat sebuah “dokumen programatis pendirian partai” hasil konvensi bersama pada bulan Maret 2007 dan secara formal (sesuai kewajiban yang diatur dalam UU Partai Politik), dipandang sebagai program partai. Namun, dokumen ini, dari segi isi bukanlah sebuah program yang utuh, melainkan baru berupa sekumpulan niat.

Ruh dasar partai „Die Linke“ ialah menjadi alternatif terhadap „kapitalisme yang lepas kendali“, berupa pemberlakuan „pembaruan solidaris dan terciptanya masyarakat demokratis secara konsekuen“ (halaman 1): „Demokrasi, kebebasan, kesetaraan, keadilan, internasionalisme adalah orientasi nilai-nilai dasar kami. [...] Kebebasan dan jaminan sosial, demokrasi dan sosialisme, saling tergantung satu sama lainnya“ (halaman 2). Untuk itu, apa yang dimungkinkan dalam konstitusi, yaitu kepemilikan bersama dalam sektor-sektor kunci perekonomian dimanfaatkan, agar berlandaskan kepemilikan publik dan swasta, dimungkinkan terciptanya sebuah „perekonomian yang demokratis dan efisien“ (halaman 3).

Partai „Die Linke“, mengklaim dirinya berniat melakukan perubahan perspektif dan kebijakan secara menyeluruh. Seberapa jauh “perubahan” dilakukan, tidak bisa dinilai hanya mengacu pada dokumen pendirian partai gabungan ini, sehingga perlu ditunggu sayap politik mana yang berhasil mendominasi dalam menentukan arah partai.

Sistem Keuangan: Dampak pasar uang dan pasar modal internasional, oleh partai „Die Linke“ dinilai sebagai faktor penyebab krisis dan kesenjangan yang mendasar dalam masyarakat saat ini: „Pasar uang menyebabkan arus modal berikut keuntungannya tak mengenal batas dan bersifat global. [...] Kebutuhan akan modal yang berorientasi fleksibilitas lokasi produksi dan pasar kerja, menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat. [...] Kapitalisme neo-liberal menyebabkan de-demokratisasi. Akumulasi kekuasaan mahabesar, terkonsentrasi pada lembaga keuangan internasional, perusahaan trans-nasional, dan pada organisasi supra-nasional, seperti WTO, IMF, Bank Dunia dst. Mereka, sepenuhnya tidak terkontrol secara demokratis“ (halaman 5). Menurut partai „Die Linke“, sistem keuangan harus dibangun kembali. Di satu sisi, mereka menuntut „kontrol demokratis atas pasar uang“ dan, di sisi lain, „desentralisasi kekuasaan ekonomi swasta“, antara lain lewat penajaman hukum kartel (halaman 11). Sistem keuangan juga perlu dilengkapi dengan dukungan terhadap bentuk-bentuk perekonomian solidaris (misalnya, koperasi) (halaman 11) dan pengembangan sektor-sektor publik (halaman 8) serta „program investasi masa depan pendukung lapangan kerja“ (halaman 9 dst.).

Hubungan Kerja: Partai „Die Linke“ memahami istilah „kerja“ tidak sekedar mencari sesuap nasi: „Kami mencita-citakan sebuah masyarakat di mana setiap manusia, lelaki dan perempuan, dapat memiliki pekerjaan yang layak dan aman bagi eksistensinya. Pekerjaan di perusahaan, pekerjaan rumah tangga dan dalam hidup bersama, bekerja membangun masyarakat serta keterlibatan dalam kehidupan kultural dan sosial harus dimungkinkan bagi semua warga negara“ (halaman 7). Terkait pekerjaan di perusahaan, partai „Die Linke“ mengusulkan undang-undang yang lebih tegas dan juga regulasi kontrak tarif terkait hubungan kerja. Dalam mempertahankan otonomi tarif, dituntut sebuah „besaran upah minimum secara undang-undang yang harus bisa memastikan eksistensi“, serta sebuah „perlindungan pemutusan hubungan kerja“, „hak-hak keterlibatan dalam pengambilan keputusan semua pekerja“ dan „Keterikatan hukum dari kontrak-kontrak tarif secara umum“. Agar keterlibatan dalam pengambilan keputusan perusahaan terjamin, diperlukan jumlah wakil pekerja yang cukup signifikan (halaman 13). Hak atas mogok kerja – yang selama ini, karena kewajiban damai tidak diperbolehkan – harus dimungkinkan (halaman 13). Berbagai contoh tersebut, menunjukkan bahwa partai „Die Linke“ mendukung pengendalian perekonomian oleh masyarakat dan negara.

Sistem Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Kejuruan Lanjutan: Dalam bidang pendidikan dan pendidikan lanjutan, “Die Linke” menunjuk pada kondisi ketidaksetaraan dalam masyarakat dan tugas, melakukan restrukturisasi sistem pendidikan menuju keterlibatan warga secara menyeluruh. Tuntutan “hak dasar atas pendidikan”, berlaku pula bagi pendidikan kejuruan: „Mundurinya pengusaha dari tanggungjawabnya terhadap pendidikan kejuruan, harus dihentikan. Kami menuntut ketersediaan tempat pendidikan secara merata dan beragam. Untuk itu, dibutuhkan pendanaan yang dijamin secara undang-undang” (halaman 17). Pendidikan dasar dan lanjutan, harus didukung oleh negara (halaman 17).

Secara keseluruhan, dibandingkan partai-partai politik lainnya, partai „Die Linke” menginginkan peran negara yang lebih besar. Untuk itu, secara mendasar – sejauh yang bisa dipantau – tetap dalam bingkai pemikiran pasar bebas terkoordinasi. Meskipun demikian, tidak ditemukan sebuah pernyataan keyakinan terkait hal tersebut. Dalam dua hal, partai „Die Linke” dinilai sepenuhnya berbeda dibandingkan partai lain. Pertama, sektor-sektor utama perekonomian, perlu dikelola secara kolektif. Seberapa jauh kolektivisme dan dalam bentuk apa yang diinginkan, masih belum terjawab. Terkait hal tersebut, hanya beberapa frase tentang bagaimana keuangan negara bisa ditata untuk mencapai kemakmuran sehingga memungkinkan negara melaksanakan apa yang dituntut darinya. Memang benar bahwa program partai tidak harus memuat perencanaan keuangan dan implementasinya, namun hal tersebut adalah pertanyaan mendasar, ketika terkait dengan penerapan realistis dari berbagai usulan yang diajukan.

5.6. Penilaian Programmenurut Tujuan-Tujuan Sosdem

Sosdem berorientasi pada perwujudan secara formal dan dampak riil dari Pakta Hak-Hak Dasar yang dicetuskan PBB pada tahun 1966. Pakta yang sudah diratifikasi oleh sebagian besar negara-negara anggotanya. Terkait hal tersebut, dalam paparan sebelumnya, terlihat jelas bahwa ekonomi pasar terkoordinasi (seperti yang berlaku di negara-negara Skandinavia), bisa dianggap sebagai yang paling mendekati tuntutan Sosdem.

Program Sosdem tentang kebijakan ekonomi, telah dijelaskan oleh Simon Vaut dan Christian Krell terkait tujuan-tujuannya berupa pertumbuhan, pemerataan sosial dan keberlanjutan. Se jauh ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana partai-partai politik menginginkan keberlanjutan atau perubahan ekonomi pasar terkoordinasi.

Program lima partai politik yang memiliki anggota di parlemen, masih berkuat pada „pernyataan-pernyataan niat“ yang memberikan informasi ketika sebuah partai memiliki kekuasaan politik, ke arah mana sistem ekonomi dan tatanan masyarakat Jerman akan dikembangkan. Se jauh mana partai-partai tersebut akan mempertahankan programnya ketika berkuasa, tentu saja tidak bisa diprediksi dalam buku ini. Tetapi, reaksi dan usulan kebijakan CDU dan FDP terhadap krisis keuangan pada musim gugur 2008, memperlihatkan bahwa arah umum program partai tidak harus sama dengan tindakan politik dan kebijakan konkret. FDP, misalnya menuntut negara yang kuat dan CDU – berlawanan dengan sayap ekonomi liberalnya – mendukung peningkatan besar-besaran jaminan dan kredit.

Secara keseluruhan – dipastikan, tanpa penilaian pribadi – bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Dalam konteks tersebut di atas, CDU mewakili sebuah ekonomi pasar terkoordinasi pada level bawah, dibandingkan posisinya kini. Kritik terhadap pemikiran ekonomi liberal, dikombinasikan dengan spirit kewirausahaan individual. Bentuk-bentuk keterlibatan pengambilan keputusan secara kolektif cenderung ditolak, dikurangi atau fleksibel.

- Dalam programnya, FDP menempatkan dirinya pada ekonomi pasar tidak terkoordinasi dan *lieberal*. Alasan yang membenarkan bahwa model masyarakat yang diperkenalkan FDP ini sebagai sebuah „ekonomi pasar sosial dan ekologis“, tidak bisa ditemukan.
- *Bündnis 90/Die Grünen*, memposisikan diri sebagai pendukung ekonomi pasar terkoordinasi, dengan melakukan restrukturisasi ke arah “masyarakat solar”. Dalam upaya mencapai tujuannya, gabungan partai ini bersandar pada pemikiran liberal, elemen masyarakat sipil dan elemen pajak kolektif. Secara keseluruhan program partai *Bündnis 90/Die Grünen* adalah yang terpanjang, meski terkait pemikiran konkret tentang ekonomi terkoordinasi, masih sangat sedikit.
- Partai „Die Linke“ sangat menekankan regulasi ekonomi dan mendukung sebuah negara yang melindungi individu. Dari dua sisi, program partai ini erada di luar spektrum penilaian: Di satu sisi, program hanya memiliki butir-butir pemikiran yang belum tuntas; di sisi lain, masih belum jelas apakah partai „Die Linke“ bisa dipandang sebagai pendukung sebuah model „ekonomi pasar“?.
- Dalam programnya, SPD secara jelas mendukung ekonomi pasar terkoordinasi dan pengembangannya. Sambil berorientasi pada perluasan dari formulasi hak-hak kebebasan seperti yang tertuang secara komprehensif dalam pakta-pakta PBB. Perhatian juga diberikan pada pengendalian permasalahan sesuai kebutuhan publik, dengan perhatian utama tertuju pada bidang keberlanjutan, internasionalisasi pasar uang, dan fleksibilisasi proses ekonomi serta aspek jaminan sosial.

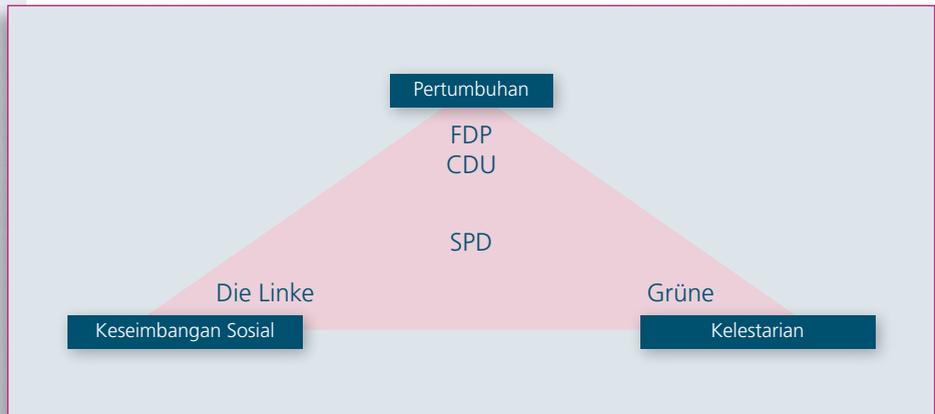
Berdasarkan penilaian terkait tujuan-tujuan ekonomi tersebut, partai-partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen bisa diposisikan sebagai berikut:

CDU dan FDP, memperlihatkan afiliasi yang jelas bertujuan pertumbuhan ekonomi dan cenderung menempatkan tujuan-tujuan lainnya pada posisi sekunder. Penolakan atau setidaknya skeptis ditunjukkan ketika menyangkut ide „pemerataan sosial“.

Bündnis 90/Die Grünen berorientasi pada konsep „restrukturisasi“ menuju pasar bebas sosial dan ekologi, terutama dengan tujuan keberlanjutan ekologis „Pemerataan sosial“, sebagai tujuan, didukung penuh sementara tujuan

„pertumbuhan kualitatif“ bisa dianggap sebagai hal sekunder. Bagi partai „Die Linke“, orientasinya terlihat sangat jelas pada tujuan „pemerataan sosial“.

Sedangkan bagi SPD, terdapat keseimbangan dan kesetaraan orientasi terhadap tiga dimensi tujuan tersebut.



Ilustrasi 8: Skema posisi partai politik sesuai tujuan utama kebijakan ekonomi

Kembali ke pertanyaan awal: Membedakan secara tegas kompetensi sosial-ekonomi partai-partai politik adalah simplifikasi yang berbahaya, dan dalam menilai kebijakan kurang memadai. Analisis program memperlihatkan juga bahwa partai-partai politik memiliki tujuan yang sangat berbeda terkait pengorganisasian ekonomi sebagai bagian dari masyarakat. Baru ketika mencermati kerangka luas tersebut, dimungkinkan untuk memperoleh orientasi dan menentukan peta lengkap berbagai partai politik tersebut.

6. TATANAN EKONOMI: MODEL DARI BEBERAPA NEGARA

Apa saja yang dibahas dalam bab ini?

- Perbandingan berbagai sistem ekonomi berdasarkan tipologi kapitalisme terkoordinasi dan tidak-terkoordinasi yang dijelaskan sebelumnya, sesuai dengan teori yang diperkenalkan oleh David Soskice dan Peter A. Hall.
- Penelitian tentang sistem keuangan, hubungan kerja, sistem pendidikan dan hubungan antarpengusaha.
- Fokus dalam penelitian ini adalah AS, Britania Raya, Jerman, Swedia dan Jepang.
- Dari contoh luas yang diteliti, AS mewakili tipe ideal kapitalisme yang paling tidak-terkoordinasi, sedangkan Swedia mewakili tipe ideal paling terkoordinasi.
- Berbagai model ekonomi tersebut, pada masa-masa tertentu bisa saja hidup berdampingan.

6.1. Amerika Serikat⁸

Oleh Simon Vaut

AS adalah negara yang mewakili tipe ekonomi pasar tidak-terkoordinasi (Meyer 2005: 279 dst.) dan berada dalam tradisi liberalisme pasar, memberi ruang seluasnya bagi individualisme serta skeptis terhadap intervensi negara. Sistem ekonomi AS terutama memiliki tujuan melayani konsumen dan sedapat mungkin memperbanyak kepemilikan - dengan mengorbankan hak-hak dasar sosial (Gilpin 2001: 150).

Untuk beberapa kurun waktu tertentu, penilaian tersebut bersifat relatif. Pada tahun 1930an, misalnya, Presiden Franklin D. Roosevelt dengan „*New Deal*“, meletakkan sebuah program besar ekonomi yang lebih bercirikan perekonomian terkoordinasi. Kebijakan Presiden Lyndon B. Johnson pada tahun 1960an, dengan kampanye „Perang Melawan Kemiskinan“ („*war on poverty*“), juga

*Tipikal ekonomi
pasar tidak
terkoordinasi*

8 Pemaparan tentang AS dan Jerman, sebagian besar mengacu pada tulisan Meyer (2005: 279–282). Untuk itu, kami berterima kasih atas ijin penulisatas publikasinya dalam buku ini.

menempuh jalan yang sama. Meskipun demikian, dalam dua fase tersebut perekonomian AS secara keseluruhan, masih sangat tidak terkoordinasi. Masa ketika perekonomian paling tidak terkoordinasi, terjadi pada era Presiden Ronald Reagan (tahun 1980an) dan George W. Bush.

Sistem Keuangan

Pendanaan perusahaan AS, terutama diperoleh lewat pasar modal. Hal tersebut menjurus pada tingginya transparansi data keuangan, karena perusahaan yang tercatat dalam bursa secara rutin harus mempublikasikan laporan keuangannya. Kepentingan para pemilik saham terkait keuntungan sebesar mungkin, secara signifikan menentukan strategi perusahaan. Hal ini, digambarkan sebagai 'prinsip-nilai-pemegang saham'.

Akses terhadap modal tergantung pada penilaian prospek keuntungan perusahaan lewat para pemegang saham. Penggabungan (*merger*) dan pengambilalihan perusahaan, lebih sedikit diregulasi dibandingkan negara-negara lain. Pengelolaan perusahaan di AS, berdasarkan alasan-alasan tersebut, berada dalam tekanan memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Pembagian keuntungan yang terlalu kecil, bisa menyebabkan di-PHK-nya anggota manajemen, penarikan modal lewat bursa atau pengambilalihan perusahaan oleh pihak lain.

Hubungan Kerja

Serikat pengusaha dan pekerja di AS, lebih berfungsi sebagai organisasi lobi untuk kepentingan sektor masing-masing dibandingkan aktor-aktor yang bertanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kedua organisasi tersebut, dibandingkan dengan ekonomi pasar bebas terkoordinasi secara keseluruhan lemah dan hampir tidak memiliki organisasi atap yang berpengaruh. Meskipun demikian, dalam beberapa sektor terdapat serikat pekerja yang memiliki daya terobos yang sangat efektif dalam mewakili kepentingan partikular. Sebagai contoh, di negara bagian Kalifornia terdapat sebuah serikat pekerja pengawal penjara yang terorganisir secara baik dengan pengaruh yang cukup besar terhadap politik, termasuk dalam hal regulasi lembaga pemasyarakatan. Namun, kepentingan anggota organisasi partikular memang berada di atas kepentingan umum. Perlindungan PHK di AS, dalam undang-undang, nyaris tidak ada. Berdasarkan berbagai alasan, hubungan kerja biasanya berjangka pendek dan ditandai oleh perundingan gaji di

Pembiayaan lewat pasar modal

Tekanan mendulang keuntungan jangka pendek

Serikat pekerja dan pengusaha bertindak tanpa memperhatikan tuntutan masyarakat

Hampir tak ada perlindungan PHK

tingkat perusahaan. Kontrak tarif yang berlaku umum, seperti yang biasanya dilakukan dalam ekonomi terkoordinasi akibat semakin melemahnya serikat pekerja selama beberapa dekade terakhir, jarang dikenal. Menurut Robert Reich, dua faktor berikut menjadi penyebab karamnya serikat pekerja. Pertama, seba-gai dampak menurunnya tingkat pengorganisasian pekerja dari 33% (tahun 1955) menjadi hanya 8% pada tahun 2006 yang secara eksplisit disebabkan oleh kebijakan para pengusaha yang sangat memusuhi serikat pekerja. Kedua, akibat kebijakan pemerintah yang juga semakin tidak ber-sahabat. Presiden Ronald Reagan, misalnya, pada tahun 1981 mengeluarkan aturan larangan bekerja seumur hidup bagi mereka yang mogok kerja (Reich 2008: 108 dst.).

Sistem Pendidikan dan Pengajaran

Di AS, terdapat sebuah pasar kerja fleksibel yang didukung oleh sistem pendidikan yang kebanyakan mengajarkan kualifikasi bersifat umum agar bisa digu-nakan secara lintas perusahaandan sektor. Dengan demikian, para pekerja bisa dengan mudah, sesuai kondisi perekonomian, serta dengan cepat dipe-kerjakan atau di-PHK-kan („*hire and fire*“). Karena relatif tidak ada regulasi dalam bursa lapangan kerja dan sifatnya yang sangat fluktuatif, maka para pekerja di AS cenderung memilih pendidikan umum yang bisa dipakai dalam melamar pekerjaan berikutnya. Dan, karena perkumpulan pengusaha hanya mampu terkoordinasi secara lemah, maka para pengusaha tidak berhasil bekerjasama dalam menyediakan program pendidikan yang sesuai dengan keterampilan industrial yang dibutuhkan. Akibatnya, para pekerja di AS cenderung memilih pendidikan umum yang paling cocok dengan kebutuhan per-ekonomian industri jasa. Bagi banyak pengusaha dan berbagai bidang selain industri jasa, hal tersebut mengakibatkan kelangkaan pekerja terampil.

Kekurangan pengetahuan dalam pendidikan yang dibiayai publik, sebagian bisa ditutupi lewat subsidi dari sektor persenjataan. Berbagai inovasi yang dimanfaatkan oleh sektor sipil, berasal dari perkembangan sektor militer se-perti dalam industri pesawat terbang, teknik satelit, atau teknonologi informasi (Reich 2008).

Relasi Antar Pengusaha

Para pengusaha AS dihadapkan pada kondisi persaingan antar sesama peng-usaha yang lebih ketat dibandingkan dengan pengusaha dalam ekonomi

Lemahnya serikat pekerja akibat kebijakan yang memusuhi serikat pekerja

Kualifikasi umum

Subsidi silang lewat industri persenjataan

Kurangnya jejaring pengusaha

pasar terkoordinasi seperti di Swedia dan Jerman, yang lebih memungkinkan terjalannya kerjasama antar pengusaha, antara pengusaha dengan negara serta dengan serikat pekerja (Hinchmann 2006: 350). Perusahaan, satu dengan lainnya any sedikit yang berjejaring: baik di perbankan maupun jenis perusahaan lainnya, tidak memiliki dewan pengawas. Di AS, ide yang dominan adalah kebebasan bertindak, sehingga negara hanya bisa intervensi pasar untuk mempertahankan kemampuannya berfungsi dan, misalnya, menghindari kemungkinan munculnya kartel. Undang-undang anti-kartel yang paling kentara ialah menghindari kerjasama perusahaan-perusahaan, misalnya dalam kesepakatan mengatur harga.

Rangkuman Terkait AS

Ekonomi pasar AS yang nyaris tidak terkoordinasi, memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk secara fleksibel bereaksi terhadap perkembangan pasar, meski pada saat yang sama meningkatkan tekanan penyesuaian secara cepat pada perubahan pasar. Sistem hubungan kerja AS, dengan demikian, kurang efektif dalam pengembangan strategi produksi yang lengkap dan secara jangka panjang mensyaratkan lapangan pekerjaan yang stabil. Sebaliknya, hal tersebut menguntungkan sektor-sektor inovatif-kreatif yang bergantung pada modal berisiko seperti teknologi informasi dan sektor jasa besar dengan profil pekerja berpendidikan umum bergaji rendah.

Dengan sistem ekonominya, AS secara keseluruhan menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa. Sejak tahun 1990an, pertumbuhan rata-rata ekonomi AS mencapai 3 %, sementara negara-negara anggota UE hanya tumbuh sebesar 2,2%. Namun, keuntungan yang diperoleh selalu dan semakin tidak terbagi rata. Pada tahun 1950an, gaji dewan direksi mencapai 25 kali gaji pekerja pada perusahaan yang sama, kini secara rata-rata perbandingannya telah meningkat tajam menjadi 350 kali lipat (Reich 2008: 144). Di AS, akibat kurangnya belanja publik yang sudah mencapai tingkat kronis, terjadi kondisi berdampingan antara kekayaan pribadi dan kemiskinan publik. Dampaknya, antara lain, infrastruktur publik di AS terbilang buruk dibandingkan negara-negara lain (Hinchmann 2006: 352).

Terpilihnya Barack Obama pada tahun 2008, bersandar pada slogan „Change“ (perubahan). Banyak indikasi yang menunjuk bahwa akan terjadi perubahan kebijakan (Vaut, 2007 dan 2008). Yang menarik, seorang pemikir pionir dari

*Hampir sepenuhnya
ekonomi pasar tak
terkoordinasi*

*Kekayaan pribadi
berdampingan
dengan kemiskinan
umum*

*Pembalikan lewat
terpilihnya Barack
Obama?*

USA

Produk Domestik Bruto per kepala 2007	38.000 €	PDB per kepala dalam standar daya beli (SDB); SDB sesuai daya beli dalam Euro di UE-27 secara rata-rata (sumber: Eurostat)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 1990-2005	2,1%	Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun per kepala (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 277)
Utang negara 2004	63,4%	Persentase utang negara terhadap PDB (sumber: Eurostat)
Necara kinerja 2007	- 5,4%	Saldo dari neraca ekspor dan impor barang dalam % terhadap PDB (sumber: D&B Country Risk Services)
Kuota lapangan kerja 2007	71,7% (65,9%)	Persentase pekerja (perempuan) usia 15–64 tahun terhadap total penduduk (sumber: Eurostat) Kuota pengangguran 2007
Kuota pengangguran 2007	4,6%	Jumlah penganggur terhadap total pekerja (standar internasional) (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan diukur dengan Gini-Koefisien	40,8%	Angka terkait penghasilan yang tidak merata, 100 % = ketidakmerataan maksimal (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 281)
Kesenjangan penghasilan antara lelaki dan perempuan	63%	Penghasilan pekerja perempuan dibandingkan penghasilan pekerja lelaki (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 330)
Indeks kemiskinan	15,4%	Indeks kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (harapan hidup, angka melek huruf, akses ke pelayanan kesehatan, ...), 0 = kemiskinan minimal, 100 = kemiskinan maksimal (sumber: Human Development Report 2007/08, halaman. 241)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	12,4 %	Jumlah pekerja yang terorganisir dalam serikat pekerja (sumber: J. Visser [2006], Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, halaman 38–49)

Partai Demokrat AS, William Galston, sudah sejak bulan Juni 2008 dalam sebuah esainya yang terkenal, „*How Big Government Got Its Groove Back*“, memprediksi bahwa ideologi negara ramping, yang melakukan sedikit regulasi dan intervensi telah berlalu. Kini, dimulai sebuah era baru „*big government*“ dengan regulasi, lebih banyak koordinasi dan intervensi negara yang lebih tinggi (Galston 2008).

6.2. Britania Raya

Oleh Christian Krell

Britania Raya sering disebut sebagai pionir kapitalisme. Di negeri ini, berkembang proses industrialisasi, perdagangan bebas dan liberalisme lebih awal dibandingkan banyak negara lain. Pada saat yang sama, juga lebih awal, terlihat sisi gelap kapitalisme tidak-terkoordinasi dengan sangat jelas. Bukan kebetulan ketika Friedrich Engels menulis tentang kondisi kehidupan dan kerja para buruh yang tidak manusiawi pada pertengahan abad ke-19 dengan memberikan contoh „situasi kelas buruh di Inggris“.

Sejak terbitnya studi Engels tersebut, memang telah terjadi perubahan dalam kapitalisme Britania Raya. Namun, kontinuitas masih terdeteksi. Saat ini, tatanan ekonomi Britania Raya masih sangat liberal. Penelitian komparatif internasional terkait kapitalisme masih mendeskripsikan Britania Raya sebagai ekonomi pasar liberal tidak-terkoordinasi.

Berikut ini, dijelaskan dimensi-dimensi terpenting yang menjadi ciri khas ekonomi Britania Raya.

Sistem Pembiayaan dan Struktur Kepemilikan

Dalam kapitalisme Britania, kondisi keuntungan terbaru sangat menentukan bagi pembiayaan perusahaan. Perusahaan Britania membutuhkan uang “tidak tenang” dari pasar uang dan pasar saham yang dinamis untuk investasinya. Untuk itu, keuntungan besar perusahaan menjadi persyaratan memperoleh akses permodalan. Berbeda dengan apa yang pernah lama berlaku di Jerman, di mana bank (mitra) secara jangka panjang bekerjasama dengan perusahaan dan seringkali memiliki akses terkait strategi dan struktur perusahaan mitranya. Di Kerajaan Britania Raya, para investor dan pendana memu-

Pionir kapitalisme ...

*... dan sisi-sisi
gelapnya*

*Pasar bebas liberal
tidak-terkoordinasi*

*Pembiayaan lewat
pasar uang dan
saham*

tuskan melakukan investasi berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang dipublikasikan. Kriteria terpenting, adalah prospek meraih keuntungan (rentabilitas) sebuah perusahaan.

Struktur kepemilikan di Britania Raya pun sepenuhnya berbeda secara mendasar dibandingkan dengan konstelasi kepemilikan dalam ekonomi terkoordinasi. Sementara dalam perekonomian yang disebut terakhir, keterlibatan para investor – misalnya perbankan, perusahaan lain dan sektor publik – berdasarkan kepentingan dan strategi jangka panjang, yang terjadi di Britania Raya sepenuhnya berbeda. Sekitar 80% pemilik perusahaan adalah investor keuangan dan pasar modal dengan kepentingan utamanya adalah perusahaan yang memiliki profitabilitas setinggi mungkin.

Apa yang disebut sebagai pengambilalihan perusahaan oleh lawan bisnis – termasuk dengan tujuan memperoleh keuntungan secepatnya – karena besarnya pendanaan dari pasar modal dan struktur pasar modal itu sendiri menjadi lebih dimungkinkan dibandingkan dengan ekonomi pasar terkoordinasi.

Di satu sisi, lewat orientasi kuat untuk mencapai keuntungan terkait dengan hirarki internal perusahaan-perusahaan Britania Raya berhasil melakukan restrukturisasi menuju arah baru dan pasar yang menjanjikan keuntungan. Sektor yang kurang menguntungkan, secepatnya ditinggalkan. Di sisi lain, perkembangan ini sekaligus mengarah pada apa yang menjadi ciri khas ekonomi Britania Raya, yaitu „*short-termism*“, sebuah orientasi pada apa yang diperoleh dalam waktu singkat.

Hubungan Kerja

Terdapat masa, ketika serikat pekerja terlihat sangat kuat. Apa yang disebut „*winter of discontent*“, adalah salah satu contoh untuk itu. Tahun 1978/1979, sebuah pemogokan nasional melumpuhkan kehidupan publik Britania Raya. Sampah tidak lagi diangkut, sementara transportasi jarak dekat lumpuh dan mereka yang meninggal dunia, tidak dapat dimakamkan. Namun, kenyataannya fase di mana terjadi pemogokan intensif, bukanlah ungkapan kuatnya serikat pekerja. Serikat pekerja yang kuat dan terorganisasi dengan baik biasanya mampu untuk memenangkan kepentingan pekerja dalam perundingan, tanpa harus melakukan pemogokan. Dengan demikian, sebenarnya „*winter of discontent*“ lebih tepat disebut sebagai ungkapan dari kurang-

*Struktur
kepemilikan:
tingginya saham
investor pasar uang
dan swasta*

*Orientasi pada
capaian jangka
pendek*

*Serikat pekerja yang
seolah-olah kuat*

*Fragmentasi serikat
pekerja*

*Tidak diwajibkan
keberadaan
perwakilan pekerja*

*Lemahnya
pengorganisasian
serikat pekerja*

*Negosiasi gaji di
tingkat perusahaan
sebatas gaji
minimum (upah
minimum)*

*Kurangnya
perlindungan PHK*

*Hirarki ketat
di lingkungan
perusahaan*

nya kemampuan berunding. Serikat pekerja Britania Raya, dalam perbandingan internasional, terbilang lemah. Penyebabnya, adalah terpecah-pecahnya serikat pekerja. Pada tahun 1990an, terdapat lebih dari 300 serikat pekerja. Keterpecahan ini, diorganisir tidak berdasarkan sektor tetapi menurut profesi, sehingga dalam sebuah perusahaan seringkali para pekerjanya diwakili oleh banyak serikat pekerja. Penyebab kedua dari lemahnya serikat pekerja Britania Raya, sesuai dengan ciri khas ekonomi pasar liberal, berupa tiadanya kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dewan pertimbangan atau bentuk lain perwakilan pekerja. Sebetuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan seperti yang berlaku di industri Jerman, tidak dikenal di Britania Raya. Ketiga, hak-hak serikat pekerja di Britania Raya, secara sistematis disunat pada masa pemerintahan konservatif, Perdana Menteri M. Thatcher (1979–1990). Akibatnya, saat ini, tingkat pengorganisasian serikat pekerja sangat rendah. Di Britania Raya, persentase pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja terhadap jumlah total pekerja, hanya sekitar 30 %, di mana sektor publik jauh lebih baik terorganisir dibandingkan pekerja di sektor swasta.

Mirip seperti para pekerja, para pengusaha pun relatif terorganisir dengan buruk. Nyaris tidak ada kekuatan lembaga-lembaga payung untuk mensukseskan apa yang dituju, sementara arti penting perkumpulan pengusaha juga melemah.

Berdasarkan struktur tersebut, maka biasanya perundingan tarif dilakukan di tingkat perusahaan atau sebagai hasil dari proses perundingan individual antara pengusaha dan pekerja. Meskipun demikian, sejak 1999 terdapat kesepakatan umum terkait upah minimum, sebuah batasan terbawah yang tidak boleh dikurangi. Hubungan antara pekerja dan masing-masing pengusaha, lebih banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar dibandingkan dalam ekonomi pasar terkoordinasi. Para pekerja, biasanya pekerja di sebuah perusahaan dalam waktu relatif singkat dan hanya memiliki loyalitas yang lemah. Proses PHK relatif mudah, karena serikat pekerja tidak memiliki kemampuan menghindari terjadinya hal tersebut, selain itu perlindungan PHK juga sangat lemah. Pada saat yang sama, pekerja berkualifikasi baik, akan lebih mudah memperoleh pekerjaan baru di bursa lapangan kerja.

Perusahaan di Britania Raya secara keseluruhan lebih memiliki hirarki yang kuat dibandingkan perusahaan di ekonomi pasar terkoordinasi. Selain domi-

nasi CEO (Chief Executive Officer = ketua dewan direksi), hal tersebut juga terlihat dalam organisasi kerja. Kerja kelompok dari pekerja berkualifikasi tinggi, seperti yang seringkali terjadi di Jerman, sangat jarang terjadi di Britania Raya. Yang umum terjadi adalah, pembagian kerja dilakukan secara sangat konvensional (Wood 2001: 250).

Sistem Pendidikan dan Pendidikan Lanjut

Bursa lapangan kerja Britania Raya, sangat jarang diwarai oleh kualifikasi pekerja sesuai profesi. Penyebabnya dari sudut pandang pengusaha, sangat mudah ditelusuri:

Pertama, karena secara rata-rata lama bekerja para pekerja di sebuah perusahaan relatif singkat, sehingga berisiko tinggi bahwa investasi secara individual pekerja tidak sepadan atau kemungkinan menguntungkan perusahaan yang menjadi saingan. Kedua, akibat bursa lapangan kerja yang fleksibel. Bisa saja karena bursa lapangan kerja yang sangat fleksibel, seorang pekerja berkualifikasi tinggi yang baru direkrut, tidak berapa lama kemudian karena tidak lagi dibutuhkan, kembali dilepas.

Namun, juga di sisi pekerja nyaris tidak ada insentif bagi pengetahuan yang sesuai kebutuhan perusahaan, karena jangka waktu bekerja yang relatif singkat membuat pengetahuan umum tampaknya lebih bermanfaat, juga ketika berganti kerja ke perusahaan atau sektor lain. Dampaknya, produktivitas perusahaan Britania Raya, dibandingkan misalnya dengan perusahaan Jerman, relatif rendah dan ekonomi pasar liberal secara keseluruhan cenderung fokus pada produk sederhana dan standarisasi cara berproduksi.

Hubungan Antar Pengusaha

Hubungan antar pengusaha didasarkan pada relasi pasar, berupa relasi hukum formal dengan segala konsekuensinya. Perusahaan, sangat jarang terhubung satu dengan lainnya. Transfer teknologi terjadi lewat pertukaran oleh individu yang memiliki kualifikasi ilmu dan teknologi tinggi. Selain itu, pertukaran antara ilmuwan dan insinyur dari lembaga penelitian dengan pasar, dan sebaliknya. Hal ini lebih sering terjadi dibandingkan pada ekonomi pasar terkoordinasi. Sebaliknya, penelitian bersama antarperusahaan atau jaringan kerjasama jangka panjang, terbilang jarang.

*Pendidikan penge
tahuan umum*

*Nyaris Tak ada
jejaring pengusaha*

*Sangat mirip
dengan sistem
ekonomi AS*

Penilaian dan Rangkuman

Tipologi kapitalisme Britania Raya, memiliki kedekatan yang jauh lebih besar dengan sistem ekonomi AS dibandingkan perekonomian Eropa Kontinental. Kelebihan kapitalisme Britania Raya, adalah tingkat lapangan kerja yang tinggi dan rendahnya pengangguran. Kelemahannya, seperti sediakala berupa produktivitas perusahaan yang rendah dibandingkan perusahaan AS atau Jerman serta berorientasi keuntungan jangka pendek. Saat ini, ketika ekonomi melambat, terlihat jelas kelemahan dari pasar kerja yang fleksibel: Para pekerja bisa diberhentikan dengan cepat, angka pengangguran pun melonjak.

Dalam memposisikannya, perlu dipertimbangkan bahwa model ini tidak boleh sepenuhnya dinilai secara kaku. Sistem politik Britania Raya dengan aturan mayoritas sederhana dan kerangka kenegaraan yang sentralistis, memungkinkan setiap pemerintahan untuk secara cepat dan mendalam melakukan restrukturisasi.

BRITANIA RAYA

Produk Domestik Bruto per kepala 2007	29.700 €	PDB per kepala dalam standar daya beli (SDB); SDB sesuai daya beli dalam Euro di UE-27 secara rata-rata (sumber: Eurostat)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 1990-2005	2,5 %	Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun per kepala (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 277)
Utang negara 2004	44,2 %	Persentase utang negara terhadap PDB (sumber: Eurostat)
Necara kinerja 2007	- 4,3 %	Saldo dari neraca ekspor dan impor barang dalam % terhadap PDB(sumber: D&B Country Risk Services)
Kuota lapangan kerja 2007	71,5 % (65,5 %)	Persentase pekerja (perempuan)usia 15–64 tahun terhadap total penduduk (sumber: Eurostat) Kuota pengangguran 2007
Kuota pengangguran 2007	5,3 %	Jumlah penganggur terhadap total pekerja (standar internasional) (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan diukur dengan Gini-Koefisien	36 %	Angka terkait penghasilan yang tidak merata, 100 % = ketidakmerataan maksimal (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 281)
Kesenjangan penghasilan antara lelaki dan perempuan	66 %	Penghasilan pekerja perempuan dibandingkan penghasilan pekerja lelaki (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 330)
Indeks kemiskinan	14,8 %	Indeks kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (harapan hidup, angka melek huruf, akses ke pelayanan kesehatan, ...), 0 = kemiskinan minimal, 100 = kemiskinan maksimal (sumber: Human Development Report 2007/08, halaman. 241)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	29,3 %	Jumlah pekerja yang terorganisir dalam serikat pekerja (sumber: J. Visser [2006], Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, halaman 38–49)

6.3. Jerman

Oleh Simon Vaut

*Jerman memiliki
Ekonomi pasar
terkoordinasi*

Jerman dianggap sebagai tipikal ekonomi pasar bebas terkoordinasi (Meyer 2005: 280 dst.) dan cukup lama dipandang sebagai model panutan kombinasi antara ekonomi yang dinamis, stabilitas politik dan keseimbangan sosial (Egle 2006: 273–326). Namun, berbarengan dengan meningkatnya pengangguran dan dimulainya stagnasi ekonomi pada tahun 1990an, Model Jerman mulai kehilangan daya pesonanya dan oleh majalah Inggris „The Economist“ digambarkan sebagai pria sakit dari Eropa. Membaiknya perekonomian Jerman beberapa tahun terakhir, tampaknya telah melemahkan penilaian tersebut. Meskipun demikian, Jerman juga dihadapkan pada ujian terkait krisis pasar uang yang masih berlangsung.

Sistem Keuangan

*Pembiayaan
perusahaan lewat
perbankan*

Di Jerman, secara keseluruhan, peran pasar modal dalam pembiayaan perusahaan tidak terlalu penting. Karena itu, petinggi perusahaan tidak hanya dinilai oleh pasar, melainkan juga lewat bank yang menjadi mitra, begitu pula perusahaan yang bermitra, perwakilan pekerja dan pejabat negara. Hal ini dapat memperkuat pertukaran informasi secara personal serta berkembangnya rasa saling percaya. Pembiayaan perusahaan di Jerman, hampir sepenuhnya lewat kredit perbankan. Untuk memperoleh kredit, diperlukan selain data keuangan perusahaan, juga reputasi baik dan jaringan yang luas. Sebaliknya, para investor memperoleh informasi tentang reputasi dan pengelolaan perusahaan lewat kedekatan hubungan antar investor. Akses terhadap „modal tenang“ yang tidak tergantung pada keuntungan jangka pendek, memungkinkan perusahaan berinvestasi dalam proyek-proyek jangka panjang serta mempertahankan staf yang berkualitas sepanjang masa-masa krisis ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan pengamatan bahwa manajemen di Jerman tidak terlalu sensitif bereaksi terhadap berapa keuntungan yang baru diperoleh atau nilai saham-sesaat. Ketentuan pajak, perundang-undangan dan jaringan keterkaitan perusahaan, mencegah serangan perusahaan pesaing. Namun, keterkaitan erat perusahaan dan perbankan, juga dikritik sebagai „Kartel Bank“ (Bury/Schmidt 1996), karena dengan demikian akses bagi para pendatang baru dipersulit, dan lebih menguntungkan para „insider“. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa relasi industri di Jerman merenggang dan kepemilikan internasional bertambah, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

*Akses ke “modal
tenang”*

Ekskurs: Akhir dari 'Germany Inc'?

Awalnya tidak terlalu menjadi perhatian dalam perdebatan politik di Jerman, namun sejak tahun 1990an, secara perlahan namun konsisten terjadi perubahan mendasar yang bisa digambarkan sebagai punahnya apa yang disebut sebagai 'Germany Inc'. Istilah „Germany Inc” dimaksudkan sebagai sebuah keterkaitan yang secara tradisional sangat dekat antara perbankan dan industri di Jerman. Keterkaitan tersebut bisa dicari akarnya hingga ke masa kekaisaran. Hal tersebut, ke luar, berfungsi untuk melindungi perusahaan Jerman dan, ke dalam, menjaga stabilitasnya. Di bawah tekanan globalisasi, sistem bank mitra dan kepemilikan bersama dalam perusahaan dan perbankan terbukti menjadi rintangan, terutama bila perusahaan Jerman ingin berpartisipasi di tingkat pasar modal global (Egle 2006: 291).

Karena itu, kepemilikan bersama tersebut dalam beberapa tahun terakhir semakin berkurang. Perusahaan Jerman telah melakukan spesialisasi dan internasionalisasi.

Keterikatan antar perusahaan, terutama antara perbankan dan industri di Jerman, cenderung merenggang sejak beberapa tahun terakhir. Proses tersebut, menunjukkan betapa globalisasi telah merubah sistem perekonomian Jerman.

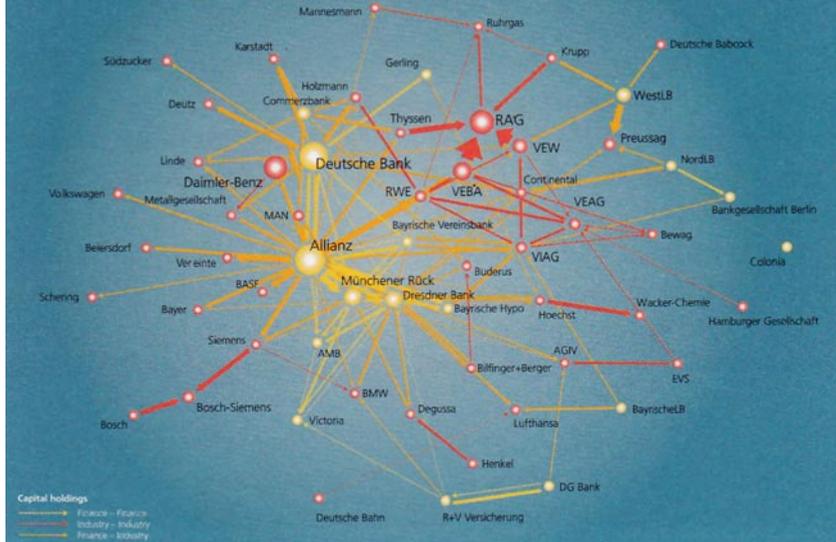
Institut Max-Planck untuk Penelitian Masyarakat dalam publikasinya membuktikan hal tersebut. Pada tahun 1996, jaringan erat antar perusahaan masih berlaku, meski sejak itu keterkaitan permodalan antar perusahaan Jerman menjadi semakin lepas.

Dengan demikian, perusahaan Jerman menjadi semakin terbuka bagi pasar modal internasional, sehingga Jerman telah sedikit bergerak dari model kapitalisme terkoordinasi menuju ke model tidak-terkoordinasi. Pengambilalihan perusahaan Mannesmann yang memiliki tradisi panjang oleh perusahaan komunikasi portabel Britania Raya Vodafone pada tahun 2001, tak terbayangkan pada masa lalu dan dipastikan akan menimbulkan protes. Saat ini, perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam (bursa saham) Dax, mayoritas kepemilikannya adalah asing (internasional), padahal pada awal milenium, jumlahnya hanya tiga perusahaan. Pada kurun waktu tersebut, investasi asing

Apakah aliansi antarperbankan dan industri merenggang?

Tren menuju model tak terkoordinasi

Cross-holdings in Germany 1996



Cross-holdings in Germany 2006



© 2008 Lothar Krempel, Max-Planck-Institut untuk Penelitian Masyarakat, www.mpifg.de/people/lk, Data Monopolkommission <http://www.monopolkommission.de>

langsung meningkat tiga kali lipat. Pada saat yang sama, terjadi peningkatan kepemilikan perusahaan Jerman di pasar internasional.

Penghapusan pajak keuntungan yang membuat penjualan kepemilikan perusahaan sebesar 53%, yang sebelumnya kurang menarik kini memicu penjualan dan menyebabkan merenggangnya keterkaitan modal antara perbankan dan industri Jerman.

Kecenderungan internasionalisasi dan meningkatnya investasi asing langsung masiherus berlangsung. Namun, kini dimulai diskusi tentang kemungkinan membatasi keterbukaan terhadap „*sovereign wealth funds*” (SUN) dan „*Private-Equity-Fonds*”.

Neraca terkait melemahnya „Germany Inc” bersisi ganda. Di satu sisi, keterbukaan bagi modal internasional dan *‘know-how’* telah membawa dampak semakin banyak perusahaan Jerman yang tetap dan semakin mampu bersaing serta meningkatkan posisinya di pasar dunia. Sebaliknya, porsi gaji dibandingkan semua negara Eropa menurun tajam. Dengan demikian, ekspor Jerman dalam satu dekade terakhir meningkat sebesar 50 %, juga jauh di atas negara-negara tetangga (sumber: Economist Intelligence Unit 2006). Pada sisi lainnya, tekanan untuk memperoleh keuntungan secepatnya dan orientasi jangka pendek semakin menguat, hal yang membuat ketidakpastian dalam hubungan kerja.

Risiko semakin banyaknya pengambilalihan perusahaan Jerman oleh komunitas „*Private-Equity*” dan „*Hedge-Fonds*” telah menjadi diskusi luas, terutama dalam memperbandingkannya dengan „serangan hama” yang rakus dan gampang berpindah tempat. Kritik paling santer adalah bahwa komunitas tersebut hanya tertarik pada keberhasilan jangka pendek.

Komite formal yang bertugas mengevaluasi perkembangan perekonomian secara menyeluruh, dalam evaluasi 2005, menulis: „Dalam perdebatan di Jerman, paling utama terkait risiko bagi perusahaan. Yang ditakutkan adalah, para investor yang berorientasi jangka pendek akan membeli sebuah perusahaan, mempreteli dan menghabiskan cadangannya, kemudian kembali menjual sahamnya dan meninggalkan perusahaan dalam kondisi yang lemah.” Sebagai reaksi, pada tahun 2008 diterbitkan Undang-Undang Pembatasan

Risiko, yang mewajibkan para investor untuk memberitahu asal pendanaan serta tujuan-tujuannya ingin membeli (saham) sebuah perusahaan di Jerman. (Sach-verständigenrat 2005: 35)

Otonomi tarif

Hubungan Kerja

Dalam perbandingan internasional, Serikat Pekerja di Jerman memiliki kadar pengorganisasian moderat, yaitu 23 % (untuk tahun 2003, bandingkan halaman 109). Meskipun demikian karena otonomi tarif, serikat pekerja memiliki pengaruh yang kuat atas penetapan tarif (gaji) dan hubungan kerja (Egle 2006: 290). Serikat pekerja dan perkumpulan pengusaha ditempatkan per sektor, misalnya untuk industri metal adaserikat pekerja IG Metall, dan sebaliknya, ada Gesamtmetall sebagai perkumpulan pengusaha. Artinya, koordinasi dalam perundingan tarif, hanya sebatas sektor tersebut, dan bisa dijamin bahwa pekerja di industri yang sama dijamin memiliki gaji yang sama. Lewat gaji yang homogen dari semua perusahaan ini dipastikan tidak ada persaingan dalam mempekerjakan pekerja yang memiliki keterampilan lebih (Hassel 2006: 14).

Perundingan Tarif per sektor

Terlibat ambil keputusan

Di Jerman, pengambilan keputusan terkait pola kerja dan personalia, dalam perbandingan internasional, bisa dikatakan berkembang dengan sangat baik. Undang-Undang terkait urusan perusahaan mengatur ukuran, kewenangan dan independensi dewan pertimbangan perusahaan. Para pemodal, diwajibkan mengikuti aturan terkait keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan bila perusahaannya memiliki pegawai lebih dari 500 orang. Artinya, para pekerja bisa mengirim wakilnya ke dewan pertimbangan.

Arti dari sistem pendidikan dual

Sistem Pendidikan

Sistem produksi di banyak perusahaan Jerman yang bersifat kompleks, seringkali mensyaratkan pekerja yang terdidik dengan baik. Untuk itu, sistem pendidikan dual dengan sifatnya yang sangat dekat dengan praksis dan pengetahuan teknisnya yang mendalam, merupakan sebuah jaminan (Egle 2006: 287). Sistem tersebut, menjadi „Lembaga Inti dari Kapitalisme Jerman“ (Hassel 2006: 13). Dalam masa prakteknya, para murid dibayar rendah, namun dengan pengalaman yang diperoleh hal tersebut memudahkan para remaja berketerampilan untuk langsung terjun ke dalam pasar kerja. Hal yang membuat Jerman, dibandingkan dengan semua negara anggota OECD, memiliki

paling sedikit penganggur remaja - sebagai bagian dari keseluruhan penganggur dewasa (Hassel 2006: 15).

Dengan kualifikasi yang relatif tinggi, para pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perundingan, dibandingkan dengan sejawat mereka di negara-negara dimana pendidikan bersifat umum sehingga membuat pertukaran pekerja jauh lebih mudah. Berkat cara produksi berorientasi kualitas, terbentuk ketergantungan terhadap pekerja yang memiliki keterampilan spesifik. Untuk melindungi tuntutan yang semakin meluas dari para pekerja serta melindungi pembajakan pekerja berkualitas oleh perusahaan lain, maka perusahaan Jerman telah mengorganisir perundingan tarif yang terkoordinasi antara pengusaha dan serikat pekerja dalam sebuah sistem relasi industrial.

Dengan demikian, terjadi relatif persamaan gaji dengan keterampilan yang mirip dalam semua sektor industri. Hal ini mempersulit pembajakan pekerja terdidik dalam sektor industri spesifik.

Namun, sistem pendidikan dual terancam oleh tiga alasan berikut. Pertama, ketergantungan pada kondisi ekonomi. Dalam fase ekonomi membaik, perusahaan dengan senang hati mempekerjakan tenaga murah dan fleksibel. Namun, pada masa ekonomi sedang stagnan, tempat pendidikan (magang) di perusahaan akan terbatas. Bila kondisi ini berlanjut, mereka yang tidak memiliki tempat dalam pendidikan seakan menjadi kumpulan gelombang yang memperkuat persaingan dalam memperebutkan tempat pada tahun-tahun berikutnya. Dan, ketiga, nilai pakai pengetahuan dan apa yang dipelajari semakin pendek. Nyaris tak ada pendidikan yang bertahan seumur hidup. Sebuah jawaban atas tantangan terkait dunia pekerjaan yang berubah cepat di Jerman dengan kondisi pendidikan lanjutan yang kurang berkembang, masih belum ditemukan.

Hubungan Antar Perusahaan

Manajemen perusahaan besar Jerman jarang memiliki kemungkinan mengambil keputusan secara unilateral (sepihak). Sebaliknya, dibutuhkan persetujuan dari dewan pertimbangan dan jaringannya, yang diwakili oleh selain perbankan dan perusahaan lainnya, juga pekerja dan (pejabat) negara. Karena itu, yang berperan bukanlah kepentingan keuntungan jangka pendek, melainkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan masyarakat.

*Membahayakan
sistem pendidikan*

*Berbagai
kepentingan
pengambil
keputusan dalam
pucuk pimpinan
perusahaan*

Peran negara dalam kebijakan ekonomi di Jerman usai Perang Dunia II, bisa dideskripsikan sebagai hal yang mungkin dan mampu dilakukan oleh negara. Meskipun kemungkinan negara mengintervensi dalam proses ekonomi, dibatasi oleh sistem federalisme dan oleh beberapa lembaga independen seperti Bundesbank (Bank Sentral) dan Bundeskartellamt (Badan Kartel Federal), tetapi negara telah berhasil mengembangkannya, lewat dukungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan perusahaan publik yang mandiri dan diperkuat dengan perangkat yang dibutuhkan – termasuk secara konstitusional – untuk meregulasi dan mengelola kebijakan ekonomiyang di negara lain dilakukan langsung oleh negara atau dilepas kepada pasar. Bank Sentral Eropa (ECB) dan independensi moneternya serta Komisaris Persaingan Eropa, mengikuti prinsip-prinsip ekonomi-politik yang berlaku di Jerman, dan karena itu bagi Jerman adalah sebuah bentuk keberlanjutan. Lebih dari itu, negara memberikan porsi Produk Sosial Bruto yang cukup besar untuk sistem pengamanan sosial dan mengikuti arahan konstitusi, berupa „kondisi kehidupan yang setara“ di semua negara bagian, di mana negara mengembangkan sebuah sistem pemerataan regional (Streeck 1995).

Penilaian

Sistem ekonomi Jerman adalah jalan tengah antara ekonomi pasar Anglo-Saxon dan negara kesejahteraan Skandinavia (Schmidt 2000).

Di Jerman, lebih berlaku hubungan kerja jangka panjang. Rata-rata pekerja bertahan hingga lebih dari sepuluh tahun dalam sebuah perusahaan, dibandingkan dengan Britania Raya yang hanya delapan tahun dan, tujuh tahun di AS (Streeck 1995). Hubungan kerja yang kooperatif serta tingkat kualifikasi pekerja yang tinggi berdampak pada peningkatan produktivitas, dan memungkinkan para pekerja terampil dibayar mahal serta pengurangan jam kerja (Hassel 2006).

Karena itu, perbedaan gaji di Jerman relatif tidak terlalu besar dan para pekerja terampil, berbeda dengan banyak negara lain, termasuk ke dalam kelompok kelas menengah. Kelas menengah di Jerman terbilang besar, yaitu 66% dari total penduduk, jauh di atas Britania Raya (26%) dan AS (44%) (Rössel 2005).

JERMAN

Produk Domestik Bruto per kepala 2007	28.600 €	PDB per kepala dalam standar daya beli (SDB); SDB sesuai daya beli dalam Euro di UE-27 secara rata-rata (sumber: Eurostat)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 1990-2005	1,4 %	Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun per kepala (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 277)
Utang negara 2004	65,1 %	Persentase utang negara terhadap PDB (sumber: Eurostat)
Necara kinerja 2007	7,6 %	Saldo dari neraca ekspor dan impor barang dalam % terhadap PDB (sumber: D&B Country Risk Services)
Kuota lapangan kerja 2007	69,4 % (64 %)	Persentase pekerja (perempuan) usia 15–64 tahun terhadap total penduduk (sumber: Eurostat) Kuota pengangguran 2007
Kuota pengangguran 2007	8,4 %	Jumlah penganggur terhadap total pekerja (standar internasional) (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan diukur dengan Gini-Koefisien	28,3 %	Angka terkait penghasilan yang tidak merata, 100 % = ketidakmerataan maksimal (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 281)
Kesenjangan penghasilan antara lelaki dan perempuan	58 %	Penghasilan pekerja perempuan dibandingkan penghasilan pekerja lelaki (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 330)
Indeks kemiskinan	10,3 %	Indeks kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (harapan hidup, angka melek huruf, akses ke pelayanan kesehatan, ...), 0 = kemiskinan minimal, 100 = kemiskinan maksimal (sumber: Human Development Report 2007/08, halaman. 241)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	22,6 %	Jumlah pekerja yang terorganisir dalam serikat pekerja (sumber: J. Visser [2006], Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, halaman 38–49)

Akibat krisis ekonomi sejak tahun 1990an, Model Jerman pun menjadi sasaran kritik. Terutama pada Pemilu Parlemen tahun 2005, terjadi perdebatan tajam mengacu pada kampanye negatif kelompok konservatif. Menurut kelompok konservatif, Jerman tidak lagi memiliki daya saing internasional. Namun, meski dipenuhi segala bentuk kampanye hitam tersebut, secara berkala Jerman ternyata telah membuktikan kemampuan bersaingnya yang tinggi sebagai negara berstatus juara dunia ekspor. Hal ini, antara lain disebabkan oleh tingginya barang-barang industri yang kompleks seperti industri otomotif dan rekayasa industri. Lapangan kerja sektor industri Jerman, secara konstan berkisar sekitar 10% di atas negara-negara anggota OECD lainnya (Egle 2006: 292).

6.4. Jepang

Oleh Werner Pascha

Jepang adalah contoh sebuah ekonomi pasar terkoordinasi. Dalam spektrum luas perekonomian terkoordinasi, Jepang oleh Hall/Soskice (2001: 34), dikategorikan sebagai contoh negara industri berorientasi kelompok. Artinya, bahwa koordinasi kegiatan ekonomi dilakukan lewat perusahaan besar lintas sektor, apa yang di Jepang disebut sebagai Keiretsu.

Mirip seperti Jerman, Jepang pasca Perang Dunia II menjadi panutan sebagai negara yang pada saat bersamaan mencapai kemakmuran ekonomi dan kesetaraan sosial (Kevenhörster/Pascha/Shire 2003).

Namun setidaknya sejak krisis ekonomi tahun 1990an, anggapan tersebut pecah bak gelembung sabun. Pencetus krisis ekonomi, sebagai tahap akhir dari sebuah „ekonomi gelembung“ (*bubble economy*) yaitu pecahnya gelembung spekulasi. Prosesnya dimulai dari reformasi menuju pasar liberal, awalnya sedikit demi sedikit kemudian semakin banyak, terutama di masa pemerintahan Perdana Menteri Koizumi (2001–2006).

Sistem Keuangan

Sistem keuangan Jepang pasca Perang Dunia II berorientasi perbankan. Alat pendanaan terpenting perusahaan selama puluhan tahun adalah kredit perbankan.

*Jepang: cukup lama
Sebagai model
Kemakmuran dan
pemerataan sosial*

*Pendanaan
perusahaan lewat
perbankan*

Sedangkan, akibat kekurangan modal, perbankan pada masa-masa awal usai Perang Dunia II, dalam jumlah yang besar tergantung pada kredit dari Bank Sentral. Lewat Bank Sentral, pemerintah secara langsung berhubungan dengan perbankan dan berperan besar terhadap kebijakan dan pengelolaan semua perusahaan.

Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan besar memperoleh keuntungan dari sistem ini. Negara memberikan persyaratan bunga ringan bagi perusahaan dalam mensukseskan arahan strateginya. Dampaknya berupa tingginya tingkat investasi dan pertumbuhan yang juga menguntungkan para pekerja (Aoki/Saxonhouse 2000).

Sejak tahun 1970an, terjadi berbagai perubahan. Perusahaan dan perbankan berkat internasionalisasi dan liberalisasi bisa melepaskan diri dari keterkaitan erat dengan negara. Terutama perusahaan-perusahaan besar, memiliki kesempatan memperoleh pendanaan dari pasar modal, sebagai dampak perubahan pada akhir tahun 1980an (Amyx, 2004). Tahun 1997 diluncurkan sebuah paket program berjudul „Big Bang“ yang dimaksudkan untuk mengatasi dampak negatif pecahnya gelembung keuangan Jepang. Lewat keterbukaan dan transparansi, perekonomian Jepang diharapkan menjadi lebih atraktif. Baru sejak tahun 2003, dampak lanjut dari pecahnya gelembung terhadap perbankan bisa diatasi.

Hubungan Kerja

Sejak sebelum perang dunia, telah terlihat tanda-tanda hubungan kerja jangka panjang dalam sistem pekerjaan di Jepang, hal yang kemudian mekar berkembang pasca Perang Dunia II (Demes 1998). Kenaikan gaji secara rutin, pembagian bonus yang dikaitkan dengan capaian perusahaan, tunjangan sosial yang menarik serta kemungkinan bagi peningkatan karir bermaksud untuk meningkatkan loyalitas pekerja pada perusahaan.

Sistem ini memungkinkan perusahaan bergerak secara fleksibel serta memiliki staf jangka panjang yang tertarik pada keberhasilan perusahaan. Namun, yang memperoleh manfaat utamanya lelaki, pekerja reguler dari perusahaan besar yang secara total hanya mencakup sepertiga total pekerja Jepang.

*Relasi hubungan
kerja jangka
panjang ...*

... dengan sisi
gelapnya

Sisi gelapnya adalah tingginya ketergantungan pekerja terhadap perusahaan. Pengalaman kerja sangat terkait dengan satu perusahaan. Kurangnya mobilitas ke berbagai perusahaan, tingginya lembur dan pemindahan tempat kerja yang kurang ramah terhadap kondisi keluarga pekerja, hampir dipastikan menjadi sebuah keniscayaan.

Namun, ada positifnya yaitu bahwa perbedaan penghasilan di Jepang tidak begitu besar, termasuk antara manajer puncak dan pekerja biasa.

Serikat kerja
perusahaan

Pasca Perang Dunia II, serikat pekerja berhasil menancapkan kukunya di Jepang. Meskipun selalu ada saja konflik, namun pimpinan perusahaan dan serikat pekerja perusahaan seringkali memiliki visi yang sama. Perwakilan kepentingan pekerja di perusahaan kecil atau dari pekerja musiman, biasanya sulit terwakili. Kini, secara keseluruhan, peran serikat pekerja akibat semakin beragamnya hubungan kerja dan kepentingan pekerja semakin surut.

Demikian pula dengan sistem hubungan kerja jangka panjang berada dalam kondisi mundur (Haak 2006). Dalam dekade 1990an yang sering dilanda krisis, pekerja berusia lanjut, pekerja bergaji besar dan mereka yang memiliki hubungan kerja tidak tetap, misalnya pekerja paruh waktu atau pekerja pinjaman, semakin dipentingkan. Karena itu, rata-rata gaji sejak tahun 2003 meski perekonomian membaik, hampir tidak ada peningkatan.

Sistem Pendidikan

Sejak akhir abad ke-19 negara membangun sistem pendidikan berikut Umum segala perangkatnya. Saat ini, hampir semua siswa remaja menikmati lebih dari 9 tahun wajib belajar. Cukup lama, yang menjadi tujuan pendidikan adalah mengajarkan kerja keras dan memiliki mental tahan uji serta keterampilan sosial dan pengetahuan utama, bukan mendorong kreativitas kemandirian pribadi (Münch/Eswein 1998). Dengan demikian, para alumni paling cocok bagi perusahaan yang bersedia menanggung pendidikan lanjut terkait keterampilan khusus yang dibutuhkan.

Pendidikan di
sekolah negeri ...

... dan spesialisasi
diperusahaan

Di perusahaan, biasanya diberlakukan berbagai „job rotation“, „training on the job“, namun keterampilan yang diperoleh sangat spesifik sesuai perusahaan tempatnya kerja, sehingga perpindahan perusahaan nyaris tidak dimungkinkan. Sebuah ciri khas sistem pendidikan Jepang lainnya, para

remaja „diseleksi“ terkait prestasi dalam keterampilan. Berdasarkan fungsi penjaringan ini, perusahaan-perusahaan yang memberikan gaji terbaik bisa mengidentifikasi pelamar terbaik, sedangkan lulusan yang kurang baik terpaksa menerima pekerjaan yang juga kurang bergengsi.

Sejak beberapa tahun terakhir, meningkat keprihatinan bahwa semakin banyak pekerja yang meskipun rajin namun kurang kreatif, dan karena itu tidak cocok untuk menempati posisi puncak bagi kemajuan perusahaan secara teknis organisatoris. Selain itu, perhatian yang terlalu ditujukan kepada pekerja baru berusia muda, tidak lagi sesuai dengan kenyataan Jepang sebagai sebuah masyarakat yang secara cepat beranjak tua. Karena itu, sekolah dan perguruan tinggi juga mengembangkan kreativitas dan individualitas serta membuka lowongan ekstra bagi generasi tua. Lebih dari itu, perusahaan-perusahaan Jepang berupaya untuk melepaskan diri dari bentuk-bentuk penerimaan pegawai secara tradisional serta persyaratan kualifikasi internal yang usang. Meskipun demikian, penerimaan tamatan luar negeri, serta pengakuan perempuan berkualifikasi tinggi dalam posisi tinggi manajemen, masih merupakan tantangan besar yang perlu diatasi.

Hubungan Antar Perusahaan

Perusahaan-perusahaan Jepang memiliki keterhubungan yang kompleks. Sebagian pengamat menjulukinya sebagai sebuah perekonomian jaringan (Lincoln/Gerlach 2004). Perusahaan gabungan yang dibangun secara horisontal seperti Mitsubishi atau Sumitomo, berasal dari perusahaan berbagai sektoryang terjalin lewat pertukaran personal, modal dan mekanisme lainnya. Dalam persaingan dengan kelompok-kelompok perusahaan lain, mereka memiliki keuntungan kompetisi tanpa harus kehilangan spesialisasi tradisional yang dimiliki.

Kelompok-kelompok perusahaan yang dibangun secara vertikal membangun hubungan sepanjang jaringan produk. Sementara perusahaan induk, misalnya Toyota, pada perakitan akhir memastikan kualitas produk serta bertanggungjawab atas strategi perusahaan. Satu tataran di bawah itu, sekelompok perusahaan pemasok bertanggungjawab atas pembuatan sistem komponen utama. Sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya, yang kebanyakan adalah pemasok kecil membuat komponen-komponen tunggal. Piramida pemasok tersebut mencapai tingkat fleksibilitas dan keterampilan beragam yang tinggi,

meskipun terutama perusahaan-perusahaan di tingkat terendah pada masa-masa sulit harus menanggung beban yang lebih berat.

Hubungan lainnya berasal dari sistem pendanaan berorientasi kredit, antara perbankan dan perusahaan. Pasca Perang Dunia II, bank-bank di Jepang memiliki fungsi pengawasan sebagai bank mitra utama, dan karena itu seringkali lebih penting dibandingkan pemegang saham. Di satu sisi secara internal, sistem pengendalian perusahaan di Jepang diwarnai oleh para manajer sesuai hirarki. Di sisi lain, secara eksternal lewat perbankan (Dirks/Otto 1998). Ketika sebuah perusahaan berada dalam kesulitan, perbankan diharapkan membantunya untuk menghindari terjadinya krisis sistemik. Sebagai ganjaran, negara memberikan garansi eksistensi, termasuk bagi bank terlemah. Lewat hubungan personal antara bankir dan pengusaha - sebagian juga dengan pejabat pemerintah terkait, dimungkinkan penetapan sebuah strategi jangka panjang. Namun, sebaliknya, kondisi tersebut memungkinkan terjadinya kesepakatan bermasalah hingga ke praktek korupsi.

Kini, sistem ini berada dalam tekanan berat. Ketergantungan yang semakin dalam terhadap pasar modal memaksa perusahaan untuk melakukan transparansi dalam relasi dan pengarahannya. Dengan demikian ada bahaya bahwa perusahaan Jepang harus beraksi secepatnya seperti banyak perusahaan di Barat dan akan kehilangan kekuatan berupa kerjasama secara jangka panjang berbasis kepercayaan.

Penilaian

Kapitalisme terkoordinasi berorientasi kelompok di Jepang pasca Perang Dunia II sangat pas dalam mengembangkan sektor industri secara optimal. Yang berhasil dicapai adalah perbaikan standardisasi produk industri secara bertahap dan dalam jumlah besar dengan kualitas yang baik serta peningkatan produktivitas untuk bersaing di pasar dunia. Pendanaan dan kontrol lewat perbankan memungkinkan penerapan strategi jangka panjang. Kelompok-kelompok perusahaan kuat mengorganisir sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan strategi tersebut. Para pekerja yang rajin, mensukseskan strategi yang dicanangkan. Sistem pendidikan memiliki tugas untuk menyediakan pekerja terampil dalam jumlah besar.

JEPANG

Produk Domestik Bruto per kepala 2007	27.900 €	PDB per kepala dalam standar daya beli (SDB); SDB sesuai daya beli dalam Euro di UE-27 secara rata-rata (sumber: Eurostat)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 1990-2005	0,8 %	Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun per kepala (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 277)
Utang negara 2004	164 %	Persentase utang negara terhadap PDB (sumber: Eurostat)
Necara kinerja 2007	4,9 %	Saldo dari neraca ekspor dan impor barang dalam % terhadap PDB (sumber: D&B Country Risk Services)
Kuota lapangan kerja 2007	70,6 % (59,4 %)	Persentase pekerja (perempuan) usia 15–64 tahun terhadap total penduduk (sumber: Eurostat) Kuota pengangguran 2007
Kuota pengangguran 2007	3,9 %	Jumlah penganggur terhadap total pekerja (standar internasional) (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan diukur dengan Gini-Koefisien	24,9 %	Angka terkait penghasilan yang tidak merata, 100 % = ketidakmerataan maksimal (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 281)
Kesenjangan penghasilan antara lelaki dan perempuan	45 %	Penghasilan pekerja perempuan dibandingkan penghasilan pekerja lelaki (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 330)
Indeks kemiskinan	11,7 %	Indeks kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (harapan hidup, angka melek huruf, akses ke pelayanan kesehatan, ...), 0 = kemiskinan minimal, 100 = kemiskinan maksimal (sumber: Human Development Report 2007/08, halaman. 241)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	19,7 %	Jumlah pekerja yang terorganisir dalam serikat pekerja (sumber: J. Visser [2006], Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, halaman 38–49)

Mekanisme ini menimbulkan masalah sosial dan politis, seperti perbedaan antara perusahaan besar dan kecil, kurangnya kesempatan berkembang secara individual serta relatif rawan teradap korupsi, meski secara menyeluruh sebagian besar warga memperoleh keuntungan dari mekarnya perekonomian.

Namun, dalam melajunya proses internasionalisasi dan kemajuan teknis-organisasional, sistem ini telah mencapai titik batasnya. Pemerataan sosial tidak mencukupi sehingga menempatkan pemerintah dalam tekanan berat – sebuah alasan penting terjadinya kondisi pemerintahan yang labil usai lengsernya reformasi pasar oleh Perdana Menteri Koizumi.

Saat ini, muncul pertanyaan seberapa jauh sistem perekonomian Jepang akan bergerak menuju arah model tak terkoordinasi ala Anglo-Amerika (Dore 2000, Pascha 2004, Streeck/Yamamura 2003). Namun, tampaknya, Jepang tidak akan beralih menempuh jalan kapitalisme tidak-terkoordinasi. Indikasi terkuat adalah perkembangan dalam pajak perusahaan. Terutama, karena jarang terjadinya pendanaan berorientasi pasar modal serta kebijakan perekrutan terbuka terkait pasar. Di banyak perusahaan, yang lebih banyak mendominasi adalah bentuk-bentuk transisi, misalnya keterkaitan sebuah kebijakan perekrutan terbuka lebih menyerupai model tradisional pasca perang (Aoki/Jackson/Miyajima 2007).

Transisi tersebut, masih belum menemukan sebuah sistem yang secara menyeluruh telah terbentuk.

6.5. Swedia

Oleh Erik Gurgsdies

Model Rehn-Meidner

Kebijakan ekonomi Swedia berbasis kepada apa yang dinamakan Model Rehn-Meidner. Nama ini terkenal merujuk pada dua ekonom serikat pekerja Gösta Rehn dan Rudolf Meidner. Pada tahun 1951, keduanya mengembangkan model makro ekonomi yang menyelaraskan lapangan kerja penuh dengan sebuah „kebijakan gaji solidaris“, tanpa menekan (proses) inflasioner.

Pemikiran mendasarnya adalah bahwa (lapangan) pekerjaan penuh tidak akan tercapai lewat tingginya permintaan dalam makro ekonomi, baik akibat perkembangan ekonomi dunia yang membaik ataupun lewat program konyunktur domestik. Karena berbagai cabang ekonomi bertumbuh dengan kecepatan yang berbeda, maka permintaan pasar yang tinggi dan berkelanjutan akan menyebabkan beberapa sektor mengalami kekurangan tenaga kerja. Namun, agar pertumbuhan bisa terus dipicu, akan dicari pekerja dari sektor lainnya. Untuk menjaga terpenuhinya pekerjaan, diperlukan penawaran gaji yang saling melebihi antar sektor, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan harga di sektor-sektor tertentu. Untuk menyeimbangkan turunnya daya beli, terjadi kenaikan gaji di semua sektor lainnya yang kemudian memicu kenaikan harga serta perkembangan inflasioner dalam perekonomian secara menyeluruh.

Kebijakan Gaji Solidaris

Selain itu, yang menyulitkan adalah ngototnya serikat pekerja Swedia sejak akhir Perang Dunia II, mengusung apa yang disebut „kebijakan gaji solidaris“. Hal tersebut, memiliki dua tujuan. Di satu sisi, mengupayakan berlakunya prinsip „gaji yang sama bagi pekerjaan yang sama“, dan berorientasi pada pengembangan produktivitas kerja rata-rata. Di sisi lain, secara umum memperkecil perbedaan gaji antara berbagai jenis pekerjaan. Syarat bagi tercapainya tujuan-tujuan tersebut adalah prioritas dari perundingan gaji secara sentral ketimbang dilakukan dalam berbagai tingkat.

Untuk menghindari bahwa gaji (lewat „kebijakan gaji solidaris“) akibat inflasi kembali kehilangan nilainya, maka dalam Model Rehn-Meidner diberlakukan sebuah kebijakan keuangan publik yang ketat berupa pembatasan surplus anggaran permintaan publik (*demand*) dalam perekonomian makro.

*Kerja penuh dengan
„kebijakan upah
solidaris“*

*Kelebihan dan
kekurangan model
Rehn-Meidner*

Tekanan terhadap produktivitas perusahaan

Konsep kebijakan ekonomi seperti ini, memaksa perusahaan berproduktivitas rendah bertahan dari dua sisi. Pertama, terhadap buruknya struktur biaya dan harga dibarengi oleh permintaan yang biasa-biasa saja, dihadapkan pada permasalahan penjualan. Kedua, terkait „kebijakan gaji solidaritas“ yang sudah bermasalah terkait kondisi biaya dan persaingan, dipertajam ketika di semua sektor dan semua perusahaan menaikkan upah seirama dengan peningkatan produktivitas kerja rata-rata.

Keuntungan perusahaan

Sebagai gambaran terbalik, yaitu perusahaan dengan produktivitas tinggi, diuntungkan dari dua sisi. Di satu sisi, berkat kondisi biaya produksi yang rendah dan dengan demikian memungkinkan pengaturan harga yang terjangkau akibat banyaknya permintaan. Di sisi lain, kesepakatan tarif yang berorientasi pada produktivitas rata-rata, membuat perusahaan berproduktivitas tinggi dengan sengaja tidak bersedia membagi ruang gerak distribusinya, meski hal ini berarti perusahaan-perusahaan tersebut tidak memperoleh suntikan modal untuk membuka lapangan kerja baru berproduktivitas tinggi.

Pengangguran dipahami secara ofensif sebagai tugas penyesuaian oleh sektor publik (pemerintah)

Pecundang dari kombinasi antara kebijakan keuangan publik yang restriktif dan „kebijakan gaji solidaritas“ adalah perusahaan-perusahaan dengan produktivitas rendah, termasuk para pekerjanya. Namun, pengangguran yang diakibatkannya tidak secara defensif dipahami sebagai persoalan publik, melainkan secara ofensif sebagai tugas penyesuaian publik. Karena itu, selanjutnya, secara terus menerus dibangun dan dikembangkan “bursa lapangan kerja yang selektif” sesuai kebutuhan. Lewat pendidikan yang luas serta dukungan pindah lokasi, dicarilah mereka yang menganggur serta pribadi yang baru pertama kalinya atau setelah masa vakum kembali mencari pekerjaan agar memiliki kualifikasi bagi kegiatan produktif yang artinya pekerjaan bergaji lebih baik.

Model yang memperoleh pengakuan luas

Dalam Model Rehn-Meidner, “kebijakan fiskal restriktif”, “kebijakan gaji solidaritas” dan “kebijakan bursa lapangan kerja selektif” berdampak pada terjadinya pembaruan dan penyesuaian struktural secara terus menerus terhadap perekonomian Swedia. Model tersebut berfungsi sejak tahun 1960an – sedikit banyak – sebagai jalur kebijakan ekonomi Swedia. Secara keseluruhan, model ekonomi Swedia memberikan sebuah „keutuhan konseptual serta pengakuan politik luas, yang pencapaiannya jauh dibandingkan negara-negara yang dibahas dalam buku ini“ (Scharpf 1987: 119). Sebuah pernyataan

yang juga sesuai dengan temuan Fritz W. Scharpf pada tahun 1987, terkait sebuah perbandingan kebijakan ekonomi Sosialdemokrasi Jerman, Britania Raya, Austria dan Swedia. Sebuah penilaian yang masih berlaku hingga kini. Dengan pasar domestiknya yang kurang dari 10 juta jiwa, Swedia tidak hanya berhasil mempertahankan perekonomian yang sangat kuat dalam persaingan di tingkat global dengan segala persoalannya, tetapi mampu mengintensifikasi perdagangan produk dan terakhir juga dalam sektor jasa. Saat ini, separuh dari Bruto Domestik Produk Swedia diekspor.

Sistem Keuangan dan Struktur Kepemilikan

Pendanaan perusahaan di Swedia terdiri dari berbagai unsur yang berbeda. Pertama, secara kental pendanaan bertumpu pada sistem perbankan yang menjadi mitra perusahaan. Selain itu, terdapat unsur pendanaan yang berasal dari pasar saham. Namun, di sini terdapat keistimewaan yang perlu diperhatikan, bahwa perusahaan-perusahaan di Swedia memiliki saham lintas perusahaan. Karena itu, yang menjadi ciri khas pendanaan perusahaan secara menyeluruh adalah sebuah persektif berjangka panjang. Sistem pendanaan di Swedia, mirip dengan apa yang lama menjadi ciri khas Jerman dengan julukan „Kapitalisme Rhein“.

Sistem Pendidikan

Sudah sejak awal, Swedia memahami bahwa dalam perekonomian dunia yang terglobalisasi, pengembangan „sumber daya“ terpenting bagi sebuah ekonomi yang memiliki daya saing tinggi adalah pendidikan. Pendidikan kejuruan di Swedia dilakukan di tingkat sekolah lanjutan atas umum. Semua murid secara sukarela mengikuti pendidikan tersebut. Selain jalan akademis, terdapat 14 program nasional yang menawarkan pendidikan kejuruan spesifik.

Kebijakan pendidikan mendasar di Swedia, dahulu dan sekarang, sejauh mungkin menghindari kebuntuan pendidikan. Karena itu, pendidikan kejuruan spesifik juga dipenuhi oleh pelajaran umum, sehingga lulusannya juga bisa memiliki akses ke pendidikan lanjutan umum. Pada tahun 2006, persentase lulusan yang memiliki ijazah persamaan mencapai angka 94,6 %.

Ciri khas Swedia lainnya adalah berbagai kemungkinan untuk kembali ke bangku pendidikan sepanjang masa kehidupan profesional. Karena, seperti terpantau, tujuan kebijakan ekonomi dan pendidikan Swedia tidak sekedar

*Tidak tergantung
pada pasar modal*

*Menghindari
kebuntuan
pendidikan*

memperkuat perlindungan lapangan kerja tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan tersebut bertujuan memampukan orang perorang menempati tempat kerja yang secara internasional berdayasaing tinggi. Dengan demikian, sistem pendidikan Swedia menyediakan mata pelajaran umum dan kejuruan bagi seluruh masyarakat.

Hubungan Kerja

Pemerintahan sosdem di Swedia yang bertahan sangat lama, berhasil meyakinkan para pengusaha dalam kesepakatan Saltsjöbaden pada tahun 1938, untuk mengakui serikat pekerja sebagai mitra sejajar dalam perundingan.

Dengan kesepakatan tersebut, negara sedapat mungkin tidak terlibat dalam berbagai aturan kerja. Hal tersebut berhasil dilakukan selama lebih dari 30 tahun. Bursa kerja, dengan demikian, menjadi tenang karena perkembangan gaji secara sentral diatur dalam kontrak tarif. Hampir tidak ada undang-undang terkait bursa pekerjaan.

Setelah fase kerjasama(sejak awal 1970an hingga 1998), muncul fase konfrontasi. Sistem sentral dalam perundingan gaji, secara perlahan menghilang. Terutama lewat keanggotaan Swedia dalam UE, terdapat paksaan untuk stabilisasi yang kemudian memunculkan pertimbangan semua pihak terkait keharusan untuk menemukan sebuah landasan baru bagi perundingan tarif. Lewat dorongan pemerintahan sosdem, pada tahun 1998 tercapai kesepakatan antara serikat pekerja industri terpenting dengan pengusaha tentang apa yang disebut Kontrak Tarif Industri.

Kontrak tersebut berangkat dari pilar dasar berikut ini. Pertama, berdasarkan aturan kerja di mana pekerja tanpa kontrak dan dengan demikian rawan konflik, agar sedapat mungkin dihindari. Berdasarkan alasan tersebut, perlu dimulai perundingan kontrak baru sebelum berakhirnya kontrak lama. Kedua, perundingan tersebut memanfaatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah yang mempengaruhi terjadinya kesepakatan sesuai „arahan UE“. Terakhir, menghidupkan kembali pemahaman terkait arahan fungsi gaji yang mampu bersaing dalam bidang-bidang yang berorientasi ekspor. Bagian-bagian terpenting dari kesepakatan ini, kemudian ditiru dalam kesepakatan pada sektor publik.

*Serikat pekerja dan
Pengusaha yang
setara*

Menghindari konflik

*Ketersambungan
perusahaan*

Serikat pekerja di Swedia memiliki posisi yang sangat kuat dengan tingkat pengorganisasian, yang (saat ini) mencapai angka lebih dari 70 %. Bahwa pengambilan keputusan internal perusahaan juga diorganisir oleh serikat pekerja, adalah sesuatu yang sangat lumrah. Selain serikat pekerja, campur tangan dewan pertimbangan perusahaan seperti yang berlaku di Jerman, tidak dikenal di Swedia.

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat perusahaan – juga berbeda dengan Jerman, karena tidak terlembagakan secara undang-undang.

Swedia mengambil jalan lain, yaitu serikat pekerja memiliki hak melakukan perundingan pada semua jenis persoalan terkait keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan. Ketika terjadi kebuntuan tentang keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan sewaktu berlakunya kontrak tarif, maka pekerja memiliki hak untuk melakukan mogok kerja.

Hubungan Antar Perusahaan

Di Swedia, bukan hanya serikat pekerja, tetapi perkumpulan pengusaha juga menunjukkan tingkat pengorganisasian yang tinggi. Kemitraan yang kuat antara dua kelompok kepentingan ini merupakan persyaratan bagi keberhasilan kesepakatan antara dua pihak ini. Yang juga menjadi ciri khas Swedia adalah kuatnya ketersambungan modal antarperusahaan. Selain relasi pasar, berbagai jaringan informasi pengusaha mendukung terjadinya kerjasama antar perusahaan, seperti kesediaan saling memberikan modal dan transfer teknologi.

Penilaian

Dibandingkan dengan negara yang dibahas dalam buku ini, Swedia mendekati tipe ideal sebuah ekonomi pasar terkoordinasi. Ekonomi Swedia diwarnai oleh kerjasama intensif antara pengusaha dan pekerja dalam pembentukan kerangka tarif, sebagai pihak yang terkait pasar lapangan kerja keduanya terikat dengan tugas pendidikan kejuruan publik. Campuran pendanaan perusahaan yang berasal sistem perbankan mitra, kepemilikan saham bersama dan jaringan informasi perusahaan lewat penyediaan modal sendiri dan jaringan informasi tersebut dimanfaatkan untuk tujuan transfer teknologi serta mendukung kerjasama antar perusahaan.

*Nyaris sebagai tipe
Ideal ekonomi pasar
terkoordinasi*

Swedia sangat menarik, karena lewat sistem ekonomi pasar terkoordinasi dan negara kesejahteraan yang kental, berhasil menggabungkan tingkat pertumbuhan tinggi, pembagian kemakmuran yang adil dan rendahnya tingkat pengangguran. Dengan demikian, dibandingkan AS, Britania Raya, Jerman dan Jepang – Swedia paling dekat dengan berbagai tuntutan sosdem.

SWEDIA

Produk Domestik Bruto per kepala 2007	30.400 €	PDB per kepala dalam standar daya beli (SDB); SDB sesuai daya beli dalam Euro di UE-27 secara rata-rata (sumber: Eurostat)
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 1990-2005	2,1 %	Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun per kepala (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 277)
Utang negara 2004	40,4%	Persentase utang negara terhadap PDB (sumber: Eurostat)
Necara kinerja 2007	8,5 %	Saldo dari neraca ekspor dan impor barang dalam % terhadap PDB(sumber: D&B Country Risk Services)
Kuota lapangan kerja 2007	74,2 % (71,8 %)	Persentase pekerja (perempuan)usia 15–64 tahun terhadap total penduduk (sumber: Eurostat) Kuota pengangguran 2007
Kuota pengangguran 2007	6,1 %	Jumlah penganggur terhadap total pekerja (standar internasional) (sumber: Eurostat)
Kesenjangan penghasilan diukur dengan Gini-Koefisien	25 %	Angka terkait penghasilan yang tidak merata, 100 % = ketidakmerataan maksimal (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 281)
Kesenjangan penghasilan antara lelaki dan perempuan	81 %	Penghasilan pekerja perempuan dibandingkan penghasilan pekerja lelaki (sumber: Human Development Index 2007/08, halaman 330)
Indeks kemiskinan	6,3 %	Indeks kemiskinan terdiri dari berbagai indikator (harapan hidup, angka melek huruf, akses ke pelayanan kesehatan, ...), 0 = kemiskinan minimal, 100 = kemiskinan maksimal (sumber: Human Development Report 2007/08, halaman. 241)
Tingkat pengorganisasian serikat pekerja 2003	78 %	Jumlah pekerja yang terorganisir dalam serikat pekerja (sumber: J. Visser [2006], Union Membership Statistics in 24 Countries, Monthly Labor Review, vol. 129, no. 1, halaman 38–49)

7. KEBIJAKAN EKONOMI KONKRET: CONTOH-CONTOH DARI PRAKSIS

Psikolog sosial Kurt Lewin, terkenal dengan ucapannya „Tiada yang begitu praktis dari pada sebuah teori yang baik“. Untuk menjabarkan relevansi praktis dari teori-teori yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, agar memperjelas pertanyaan tentang perekonomian sosdem, maka dalam seluruh teks dijalin berbagai penggalan praksis sebagai contoh.

Dalam bab terakhir ini, akan dilengkapi contoh-contoh praktis dari kontroversi di bidang politik. Hal tersebut untuk memperjelas bagaimana cerminan dari nilai-nilai dasar sosdem dalam agenda-agenda kebijakan ekonomi politik keseharian terpantulkan dan bagaimana prinsip-prinsip kebijakan politiknya ditegakkan.

Dalam serial buku bacaan ini, tak ada satupun buku yang memiliki fokus bahasan tentang kebijakan pasar kerja. Karena, topik ini adalah bidang politik sentral dari Sosdem sebagai topik lintas batas yang dicermati dalam setiap buku dari serial buku bacaan sosdem. Tentu saja, kebijakan pasar kerja dalam buku yang sedang Anda baca terkait „Ekonomi dan sosdem“ memiliki bobot yang sangat penting. Karena itu, cukup adil bila berikut ini akan dipaparkan dua contoh dari praksis terkait „pekerjaan yang layak“ dan tentang „upah minimum“.

Berbagai tulisan berikut adalah kumpulan karangan dari sejumlah penulis dengan berbagai sudut pandang. Contoh-contoh ini tidak bisa menjadi jawaban tuntas atas pertanyaan terkait kondisi yang terus berubah, melainkan sekedar mencoba memberikan ide dan merangsang pemikiran ke depan.

Dalam bab ini, beberapa contoh dari praksis terkait kebijakan industrial ekologis, tentang bagaimana lewat dukungan negara dilahirkan pasar pendukung inovasi, pertumbuhan serta membuka lapangan kerja. Selain itu, dalam kondisi apa pengambilan kredit bagi anggaran belanja publik untuk sebuah kebijakan investasi bermanfaat. Terkait swastanisasi, apa saja keuntungannya, kebijakan seperti apa yang harus diadakan serta dalam kasus apa saja swastanisasi harus dihandari. Sedangkan tentang pekerjaan dan keterlibatan

dalam pengambilan keputusan, bagaimana dua hal tersebut bisa saling terkait satu dengan lainnya, menjadi isu utama sosdem. Dan terakhir, tentang keharusan adanya undang-undang tentang upah minimum untuk meredam hubungan kerja yang buruk, terutama berkaitan dengan aspek gender.

7.1. Kebijakan Industri Ekologis: Kebijakan Pertumbuhan Berkelanjutan⁹

Oleh Peter Franz, Florian Mayer dan Stefan Tidow

Ekologi menjadi pendorong ekonomi abad ke-21. Permintaan terhadap energi dan sumberdaya alam yang meningkat sejak beberapa tahun terakhir, dipastikan akan terus meningkat. Dalam empat dekade ke depan, sekitar enam miliar penduduk bumi akan bertambah menjadi sekitar sembilan miliar. Jumlah mereka yang hidup dalam masyarakat industrial, akan meningkat tiga kali lipat menjadi empat miliar jiwa. Karena itu, kebutuhan terhadap barang konsumsi yang diproduksi secara industrial akan meningkat tajam. Menurut perkiraan, hanya untuk Brasilia, Rusia dan China saja, dalam waktu tiga tahun ke depan kelompok kelas menengah yang konsumtif dan memiliki daya beli tinggi akan meningkat dua kali lipat. Namun, sumberdaya alam planet bumi seperti halnya dengan areal untuk pembangunan dan pertanian, semakin terbatas. Udara dan air adalah sumberdaya yang sangat berharga. Selain itu, energi bukannya tanpa batas, paling tidak energi konvensional yang saat ini penggunaannya masih menjadi bagian yang dominan.

Singkatnya: Tantangan ekonomi dan ekologi, semakin terikat satu dengan lainnya. Masa ketika ekonomi dan lingkungan dikonsepsikan sebagai dua hal yang dapat bertolak belakang, telah berlalu. Karena, apa yang secara ekologis diharuskan, juga semakin kuat menjadi tuntutan ekonomis, dan hal tersebut tidak hanya dilihat dari sudut pandang makro ekonomi tetapi juga mengacu pada sudut pandang ekonomi perusahaan. Sir Nicholas Stern, mantan kepala ekonom Bank Dunia, memprediksi bahwa biaya ekonomi dari perubahan iklim yang tak terkendali, bisa mencapai angka hingga 20 % dari penghasilan bruto global.

9 Informasi lanjut tentang keterkaitan erat antara ekonomi dan ekologi pertamakali disuguhkan dalam 'Berita Ekonomi Lingkungan' pada tahun 2009, sebuah publikasi bersama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Lingkungan Hidup: www.umweltwirtschaftsbericht.de

Perubahan relasi antara ekonomi dan ekologi tersebut, memiliki dampak langsung terhadap politik. Sedikit mempertajam, bisa dikatakan bahwa kebijakan lingkungan juga semakin menjadi kebijakan ekonomi. Strategi kebijakan industri yang ekologis berkat perkembangan tersebut, menjadikan pertanyaan terkait sumberdaya dan energi menjadi pertanyaan kunci ekonomi, lingkungan dan sosial, baik di tingkat nasional maupun global.

► Kebijakan Pertumbuhan Berkelanjutan Menjadi Agenda Bagi Pertumbuhan dan Pekerjaan

Kebijakan industri ekologis terkait erat dengan sebuah strategi modernisasi ekonomi-ekologi bagi keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut memang tidak memberikan jawaban ideologis terhadap tantangan masa kini, melainkan sekedar merancang sebuah jalan pragmatis dan berorientasi tujuan.

Semua tadi, pada dasarnya berkaitan dengan dua hal berikut. Pertama, keniscayaan untuk melakukan restrukturisasi ekonomi agraria berkelanjutan. Hal ini adalah pertanyaan tentang struktur produksi. Artinya, berkaitan dengan efisiensi energi dan sumber daya. Untuk itu, diperlukan tidak sekedar perilaku efisiensi melainkan juga berpaling kepada sumber daya baru yang sedang berkembang. Bahan bakar, bukan hanya bisa berpaling dari minyak bumi ke biogas, tetapi pembalikan juga harus terjadi dengan plastik dan bahan baku moderen lainnya. Tentu saja, hal ini juga berkaitan dengan kebijakan energi untuk memanfaatkan dengan lebih baik apa yang disebut sumber energi terbarukan, seperti matahari, angin, air, panas bumi dan biogas. Hanya dengan demikian, kita bisa keluar dari dilema struktural keterbatasan sumberdaya dan meningkatnya permintaan dan penggunaan sumber daya. Namun, kedua, kebijakan industri ekologis tidak hanya menginginkan restrukturisasi, melainkan juga memanfaatkan kesempatan tersebut secara optimal bagi perekonomian. Karena di mana-mana di seluruh dunia, energi dan sumberdaya alam semakin mahal dan terbatas, sementara dalam teknologi hijau terdapat potensi yang sangat besar serta menjadi arahan pasar masa depan. Teknologi lingkungan yang efisien menjadi teknologi kunci ke depan.

Saat ini saja, menurut para penasehat bisnis, volume teknologi lingkungan di pasar dunia mencapai angka sekitar 1.000 miliar Euro. Hingga tahun 2020, Jumlah tersebut diperkirakan akan melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi lebih dari 2.000 miliar Euro. Saat ini, Jerman adalah juara dunia eksportir

produk ramah lingkungan. Selain itu, di banyak bidang teknologi, Jerman juga menempati urutan pertama dunia. Hal tersebut adalah kondisi penyesuaian yang baik untuk memperoleh keuntungan dari pasar hijau di masa depan. Tentu saja, apabila Jerman secara teknologis berhasil mempertahankan posisi puncaknya. Namun, pengalaman mengajarkan bahwa ambisi kebijakan lingkungan yang menjadi pemicu modernisasi tersebut akan berhasil, hampir sepenuhnya tergantung pada penetapan kualitas tinggi atas proses produksi dan hasilnya.

Kebijakan industri ekologis juga akan memadukan dua dimensi tersebut secara lebih ketat. Untuk itu, dibutuhkan sebuah negara yang merumuskan tujuan-tujuan berkualitas serta menetapkan kerangka persyaratan yang tepat. Negara harus menjadi pionir, dan bila diperlukan juga berjalan di depan. Pasar memang semakin bereaksi terhadap perubahan realitas, namun masih saja terlalu lambat. Selama ini, paling tidak, pasar masih belum cukup mengantisipasi tantangan maupun peluang. Dan, apabila kita serius mempertimbangkan temuan ilmiah terkait perubahan iklim, maka hanya tersisa beberapa tahun untuk menetapkan posisi perubahan. Dengan kata lain, hanya tersisa sedikit waktu untuk dihabiskan dengan perdebatan tanpa hasil terkait kebijakan dan tatanan. Dalam tarik-menarik antara kegagalan pasar dan negara, diperlukan berbagai instrumen dan inisiatif kebijakan untuk memadukan secara cerdas kebijakan lingkungan yang inovatif. Untuk itu, negara harus memanfaatkan perangkat politik-ekonomi dan mempertemukan keduanya agar memicu inovasi, memanfaatkan teknologi lingkungan yang efisien serta memberikan stimulasi kepada masyarakat dan perekonomian dalam proses restrukturisasi energi dan sumber daya yang efisien dan pada saat yang sama memicu pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja.

➤ Prinsip-prinsip Kebijakan Industri Ekologis

Pendekatan kebijakan industri ekologis ditandai oleh keterkaitan berbagai aspek berikut:

1. Mengkombinasikan secara cerdas alat dari sisi permintaan dan penawaran. Seringkali, kebijakan berorientasi permintaan dan penawaran digambarkan sebagai dua sisi yang bertolak belakang. Padahal, penelitian terkait inovasi menunjukkan bahwa baru ketika bingkai periyasaratan kebijakan penawaran yang baik dan aktifnya permintaan yang saling mendukung merupakan per-

syarat terbaik untuk melahirkan terobosan teknologi inovatif dan kemudian dipasarkan dengan berhasil. Hal tersebut hanya akan terjadi bila politik secara berimbang mengantisipasi sisi permintaan dan penawaran.

2. Kerangka persyaratan sama pentingnya dengan ambisi penetapan tujuan. Perusahaan harus mengetahui, di mana posisi mereka. Politik tidak boleh bertindak semena-mena, namun pada saat yang sama kepastian perencanaan tidak boleh mengarah pada kondisi di mana perusahaan merasa puas pada keberhasilan masa lalunya atau tidak berani menjawab “tantangan masa depan”. Para pesaing, tidaklah tidur. Bahkan perekonomian Asia, mulai membanjiri pasar. Penentuan ambisi tujuan yang ingin dicapai, yang jauh hari diungkapkan dan secara cermat diperhitungkan, adalah bagian penting sebuah kebijakan yang menyeimbangkan perencanaan dan dinamika pasar. Sebuah contoh lainnya adalah pendekatan ‘Top-Runner’ yang selalu berorientasi pada kondisi teknologi terbaik yang dimiliki, termasuk memproduksi sesuatu yang baru.

3. Harga harus mengatakan kebenaran, tanpa merendahkan kemampuan persaingan. Harga adalah pengukur keterbatasan yang penting, yang sama sekali tidak boleh menutup kebenaran ekologis. Internalisasi sumberdaya eksternal serta pasar (ramah lingkungan) yang berfungsi adalah fokus sebuah kebijakan ekologis. Sebuah penetapan „harga yang benar“ di dalam praktiknya, bukanlah sesuatu yang tidak mempertimbangkan persyaratan persaingan internasional atau hitung-hitungan rumit terkait harga untuk beberapa waktu ke depan.

4. Penelitian harus terbuka terhadap teknologi dan pada saat yang sama terarah pada tujuan untuk mendukung kemajuan serta merekomendasikan pencerahan dan rambu-rambu. Tak seorang pun mengetahui saat ini, solusi teknologi manakah yang unggul di masa depan. Karena itu, politik juga harus secara mendasar terbuka pada teknologi dan tidak boleh mengambil risiko berlebihan. Sebuah kebijakan menggenjot teknologi (“*technology forcing*”), karena itu berangkat dari ambisi berbagai tujuan namun tidak memberikan strategi penyelesaian untuk pengamankantujuan-tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, tidak ada teknologi yang sangat menjanjikan potensi penyelesaian permasalahan, yang bisa dikembangkan oleh pasar sendirian. Penelitian oleh negara dan kebijakan teknologi juga harus melakukan hal tersebut, dan

pada saat yang sama mendukung proyek-proyek eksperimentasi pionir serta proyek-proyek dengan daya pencerahan simbolis.

5. Berbagai pendekatan horisontal dan kebijakan sektoral harus saling melengkapi. Kerangka persyaratannya harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh perekonomian menempuh arah inovasi ekologis. Ini bukan sekedar pertanyaan terkait regulasi kebijakan lingkungan hidup, melainkan juga terbentuknya kebijakan persaingan, perpajakan dan ekonomi. Untuk itu, selain kemampuan kinerja, diperlukan infrastruktur modern dan ramah lingkungan serta pekerja yang berkemampuan baik. Dimensi horisontal adalah sesuatu yang penting. Tetapi, selalu saja ada bidang-bidang di mana perubahan struktural juga harus didorong secara sektoral. Di sini berlaku, teknologi dan industri kunci secara tepat arah perlu didukung. Struktur pasar tidak hanya berfungsi lewat rambu-rambu atau pengendalian persaingan internasional. Karena di sini, kepentingan strategis jangka panjang juga ikut berperan.

Sebuah perubahan masyarakat industrial berorientasi sumberdaya tidak hanya membutuhkan perusahaan yang inovatif dan negara yang bertindak sebagai pionir. Hal tersebut juga membutuhkan pekerja yang berprestasi baik serta memiliki pekerjaan yang juga layak serta konsumen yang aktif yang memberikan dorongan modernisasi penting "dari bawah". Terakhir, semuanya terkait dengan sebuah „*New Deal*“ dari semua aktor untuk mengatasi tantangan sebuah dunia dalam perubahan, menata jalan berlandaskan strategi modernisasi bersifat ekologis-ekonomis.

Arena politik dan ekonomi telah berubah drastis. Kerangka persyaratan menunjukkan bahwa ekonomi dan ekologi semakin terkait satu dengan lainnya. Jerman, sebagai sebuah lokasi bermasa depan baik membutuhkan sebuah produksi industri yang ramah lingkungan dan ramah sosial dengan produk dan jasa berkelanjutan, berangkat dari kemampuan dan pendidikan yang baik para pekerjanya. Kebijakan industri ekologis akan membuka jalan untuk pencapaian tersebut.

7.2. Kebijakan Anggaran: Apa Saja Utang Kita kepada Jerman

Oleh Michael Dauderstädt¹⁰

Utang Jerman lebih dari 1,5 triliun Euro. Cicilannya menghabiskan hasil pungutan pajak yang sangat besar, atau membuat utang baru. Bahkan utang ini diperkirakan akan membebani generasi masa depan. Karena itu dalam diskusi-diskusi publik, diajukan berbagai konsep pemikiran dan usulan untuk menghentikan peningkatan utang negara - kata kuncinya, „Rem Utang“. Konsep-konsep tersebut sesuai dengan filsafat dasar pakta stabilitas dan pertumbuhan Eropa yang juga berangkat dari asumsi bahwa, secara jangka panjang dalam melewati siklus konjungtur, sebaiknya tidak ada utang baru. Sebuah kebijakan keuangan yang cerdas, tidak menghalang-halangi perbaikan dan investasi, juga pengurangan utang sambil tidak menambah beban utang.

Baik secara politik maupun ekonomi, dua dimensi utang negara perlu dibedakan, yaitu kerugian akibat memburuknya perekonomian dan utang jangka pendek untuk investasi yang memicu pertumbuhan. Kebanyakan ekonom pada intinya sepakat atas pembedaan dua dimensi tersebut, meski bukan pada cakupannya.

► Pertumbuhan Lewat Utang?

Ketika pertumbuhan melambat pendapatan negara pun menurun, sementara pada saat yang sama pengeluaran terutama asuransi pengangguran meningkat. Meski terjadi defisit, umumnya, permintaan tetap masih stabil. Sebagai stabilisator otomatis, konsep konsolidasi moderen serta pakta stabilitas dan pertumbuhan Eropa, dianggap sangat bermanfaat. Di Jerman, undang-undang untuk stabilitas dan pertumbuhan dari tahun 1967, sudah mengantisipasi kebijakan anggaran anti-siklus, meski secara *de facto* terjadi sebuah kebijakan pro-siklus.¹¹ Pada masa memburuknya perekonomian, kebijakan anggaran terkait meningkatnya defisit seringkali bereaksi panik dengan mencoba menghemat, padahal biasanya berdampak memperpanjang dan memperparah resesi. Sebaliknya, ketika ekonomi membaik, tidak dilakukan konsolidasi yang menyebabkan meningkatnya total utang.

¹⁰ Makalah ini, adalah ringkasan dan sambil mempertimbangkan krisis keuangan 2008 erupakan revisi dari versi judul WISO „Apa Utang kami kepada Jerman“, Agustus 2007

¹¹ Demikianlah penilaian yang menghancurkan dari Solow/Wyplosz (2007).

Sebuah kebijakan perekonomian yang aktif, harus menentukan pengeluaran negara agar berdampak anti-siklus. Pada kasus ideal, dalam resesi terjadi peningkatan belanja, termasuk ketika terjadi peningkatan defisit dan utang sebagai kompensasi terhadap permintaan sektor swasta yang melemah. Untuk itu, dari sudut pandang ekonomi sama saja apakah investasi dari negara ataukah berupa konsumsi masyarakat, meski tentu saja benar bahwa investasi lebih membawa dampak pertumbuhan berkelanjutan. Dalam masa “booming”, belanja negara harus diturunkan untuk menghentikan memanasnya perekonomian yang tidak diinginkan dan untuk mengkonsolidasi pendapatan negara.

Di Jerman, UUD (Pasal 115) menentukan bingkai kebijakan ekonomi. Pengambilan kredit oleh negara hanya boleh dilakukan untuk mendanai investasi. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa beban anggaran untuk pengeluaran yang manfaatnya tersebar selama kurun waktu yang lama ke depan tidak boleh dilakukan hanya dalam satu tahun anggaran. Lebih luas berarti, apa yang bermanfaat bagi generasi masa depan tidak boleh sepenuhnya menjadi beban masyarakat saat ini. Dengan demikian, anggaran belanja negara memakai logika rumah tangga atau perusahaan yang berutang untuk mendanai investasi yang membawa manfaat di masa depan atau menghemat biaya - misalnya, dengan membangun atau membeli rumah yang menghasilkan bila disewakan atau menghemat pengeluaran sewa bila dihuni sendiri.

Dalam kasus negara, logika tersebut lebih kompleks: Apa yang menaikkan penghasilan atau menurunkan pengeluaran negara di masa depan? Pada akhirnya, semua upaya meningkatkan pertumbuhan menghasilkan peningkatan penghasilan. Hal tersebut berarti lebih banyak daripada apa yang dimaksudkan dalam istilah „investasi barang”. Beban belanja untuk menghindari pengeluaran masa depan, harus dianggap sebagai investasi - misalnya, program imunisasi yang menyehatkan masyarakat.

Tetapi, mengapa utang bisa bermanfaat? Setiap proses pertumbuhan biasanya memanfaatkan pendanaan lewat kredit, yang berarti utang. Baik oleh negara, maupun oleh swasta. Karena penghasilan yang diperoleh, seringkali hanya cukup untuk membiayai produksi yang sedang berjalan, maka kebutuhan produksi lewat pengambilan kredit untuk mendanai investasi tambahan diperlukan untuk penambahan produksi. Ketika perusahaan, misalnya karena pesimisme akibat resesi tidak berutang, maka demi proses pertum-

buhan negaralah yang harus melakukan hal tersebut. Sebaliknya, dalam fase optimisme akibat ekonomi yang sedang 'booming' - misalnya, di AS hingga tahun 2007 –kredit diberikan bagi semua yang memiliki kesempatan memacu pertumbuhan di sektor riil.

Dalam sistem ini, kebijakan keuangan bertugas memberikan persetujuan pemberian kredit yang dibatasi sesuai ukuran realistis. Utang yang berlebihan - terlepas, apakah itu oleh negara, perusahaan atau rumah tangga, menyebabkan penggelembungan harga aset atau permintaan yang inflasioner sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan yang tidak riil serta melejitnya harga akibat stagnasi penawaran.

➤ Berapa Banyak Utang Adalah Terlalu Banyak Utang?

Namun, pertanyaannya seberapa tinggi bukit utang bisa ditumpuk? Banyak fase pertumbuhan, termasuk dalam perekonomian dunia terbaru berakhir dalam krisis utang, meski seringkali bukan krisis negara melainkan akibat ulah pasar uang yang kebablasan. Tidak selamanya jelas, apakah penyebabnya adalah meningkatnya harga kepemilikan - seperti properti, saham dan lainnya, yang seringkali melewati batasan realistis atautkah akibat ulah para spekulan. Selain itu, juga tidak jelas apakah penyebabnya ekonomi riil atautkah berbagai faktor bebas diluar kegiatan produksi yang sebenarnya menentukan seberapa besar ruang gerak dalam sistem masih tersisa. Untuk mengetahui hal tersebut, inflasi dan neraca perdagangan luar negeri menjadi dua indikator terpenting. Sebagai pembelajaran - setelah Krisis Asia 1997, dan dot.com -Blase 2000, termasuk krisis keuangan musim gugur 2008, kita semua menjadi lebih pintar untuk tidak melakukannya lagi. Namun, siapa yang berani 'mencekik' *booming* yang sedang terjadi, padahal kondisi tersebut menciptakan lapangan kerja dan penghasilan tambahan, hanya karena harga sedikit meningkat dan neraca pembayaran mendekati angka merah?

Terlepas dari besaran kredit, berdasarkan alasan kebijakan ekonomi atau untuk investasi publik, banyak yang mencemaskan jumlah total utang itu sendiri. Hal ini membatasi kemampuan bergerak negara karena sebagian besar penerimaannya harus dipakai untuk melunasi cicilan pokok utang plus bunganya. Lebih dari itu, utang negara lebih menguntungkan para pemilik modal yang meminjamkan uangnya kepada negara serta memperoleh penghasilan dari bunga yang sebagian besar dibayar oleh masyarakat sebagai pembayar pajak.

Akhirnya, dan ini menjadi argumen yang paling sering dikemukakan, bahwa utang membebani anak-cucu kita – generasi masa depan.

➤ Masa Depan Si Miskin versus Si Kaya, Ditentukan Saat Ini?

Apakah utang benar-benar membebani generasi masa depan? Meskipun layak menjadi pertimbangan, namun secara keseluruhan asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar. Selain utang, generasi masa depan juga mewarisi berbagai pembangunan masa kini. Utang negara tidak bertumpu pada jumlah beban antar generasi, melainkan terkait distribusinya bagi beberapa generasi masa depan. Semua pembayar pajak yang, pada masanya, mengalami jatuh tempo pembayaran utang berhadapan dengan kreditor masing-masing, yaitu lembaga atau swasta yang memberikan pinjaman kepada negara.

Secara jangka panjang, jumlah beban yang harus dipikul oleh negara dan pembayar pajak akibat besaran utang tertentu, tergantung sepenuhnya pada perbandingan antara besaran bunga utang yang menjadi beban dan angka pertumbuhan nominal. Bila pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan suku bunga, berarti beban utang negara (sebagai bagian dari PDB) relatif menurun. Kondisi turunnya beban utang seperti itu, terjadi pada fase pertumbuhan panjang tahun 1950 hingga 1975, sebuah kondisi yang semakin jarang terjadi. Namun, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga tinggi, terutama menguntungkan kepentingan para pemilik modal.

Bila ingin melakukan sesuatu bagi kemakmuran generasi anak-cucu kita, maka sebaiknya dihindari penumpukan (surat) utang yang membebani mereka dengan kewajiban membayar cicilannya. Sebaliknya, harus diambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas generasi masa depan, seperti investasi dalam bidang infrastruktur dan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Bila harus menahan diri dari sikap konsumtif yang membawa manfaat, maka sebaiknya dilakukan dalam bentuk penghematan sumberdaya alam, karena meningkatnya biaya akibat kerusakan lingkungan (termasuk, perlindungan dari meningkatnya permukaan air laut) mengakibatkan turunnya produktivitas. Sementara itu, dengan latarbelakang timpangnya pemerataan, rumah tangga kaya yang berhemat disertai menurunnya investasi riil bisa berdampak padamenyusutnya cadangan devisa.

Dalam perekonomian domestik, negara tidak bisa membawa kemakmuran bagi masa depan ketika memperbanyak dukungan bagi para pemodal atau ketika menumpuk utang yang artinya mendorong kemiskinan ke masa depan. Hal tersebut hanya akan berhasil apabila membuat utang luar negeri atau berinvestasi di luar negeri. Utang luar negeri, mensyaratkan kita memperbanyak ekspor dibandingkan impor untuk melayani para kreditor. Investasi di luar negeri, seperti yang dilakukan Jerman beberapa tahun terakhir, bisa menguap atau merosot nilainya bila terjadi krisis pasar uang, seperti yang menimpa banyak investor pada tahun 2008. Tetapi, surplus ekspor Jerman tidak dianggap sebagai beban, melainkan dipandang sebagai tujuan kebijakan ekonomi.

► Penghematan Belanja Publik Yang Membuat Marah Swasta?

Dari semua itu, tidaklah penting apakah utang oleh negara, perusahaan atau rumah tangga. Benar bahwa di Jerman, yang diperhitungkan adalah utang negara, sedangkan penumpukan utang perusahaan (terutama perusahaan swasta) dianggap sebagai sebuah kebajikan. Padahal, generasi masa depan mewarisi tidak hanya 1,5 triliun Euro utang negara berisiko rendah, melainkan juga 2,5 triliun Euro yang berpotensi risiko tinggi dari perusahaan swasta.

Kenyataan bahwa utang swasta cukup lama dianggap sebagai kurang bermasalah, setidaknya berkat swastanisasi awal sektor publik seperti pos, telekomunikasi, kereta api dan jalan tol, di mana kredit yang dipakai tidak lagi menjadi utang negara tetapi menjadi investasi yang berbuah manis. Namun kini, yang membayar bunga utang bukan lagi pembayar pajak, tetapi pelanggan dan –seperti yang sering terjadi adalah para pekerja dibebani dengan kenaikan harga seperti sewa rumah dan pengurangan gaji untuk menaikkan keuntungan. Padahal, juga bagi sektor swasta berlaku bahwa kemakmuran sejati hanya akan terjadi lewat peningkatan produktivitas riil.

Bila itu yang terjadi, masyarakat berutang budi pada (pemerintah) Jerman berkat keberanian untuk mengambil utang jangka panjang yang diperlukan untuk memicu pertumbuhan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai investasi dalam bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia. Dukungan bagi negara-negara lain terkait surplus dalam ekspor yang banyak memperoleh pujian atau untuk generasi masa depan lewat tunjangan modal hanya akan bernilai apabila generasi masa depan di dalam dan di luar negeri bisa memanfaatkannya.

7.3. Risiko dan Kesempatan Lewat Swastanisasi

Oleh Simon Vaut

Swastanisasi aset publik menjadi perdebatan atau bahkan konflik ekonomi-politik luas dengan isu pokoknya relasi antara negara dan swasta. Perdebatan panas tentang swastanisasi perusahaan Kereta Api Jerman memperjelas bahwa isu ini lebih dari sekedar keputusan politik, karena dalam perdebatan terjadi pertukaran argumentasi mempertimbangkan secara mendasar kesejahteraan umum, tunjangan kehidupan masyarakat dan kewajiban negara. Bahwa pro-kontra terkait swastanisasi kereta api juga terjadi di internal SPD, menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan bagaimana sebaiknya relasi (ekonomi) swasta dan negara bagi Sosdem tidaklah sederhana melainkan memerlukan pertimbangan yang kompleks.

Sebuah deskripsi beragam terkait swastanisasi di manca negara, dilakukan lewat penelitian di bawah pimpinan ilmuwan dan politisi Ernst Ulrich von Weizsäcker dari *Club of Rome*¹² dalam buku berjudul „Batasan Swastanisasi“. Pemaparan berikut ini, terutama bertumpu pada laporan tersebut.

Club of Rome, dalam laporannya, di satu sisi, berargumentasi menentang ideologi swastanisasi yang tidak kritis. Pada saat yang sama, kritik juga diajukan terhadap posisi yang sepenuhnya percaya dan tidak kritis terhadap negara dan merekomendasikan sedapat mungkin aset publik tetap berada di tangan negara.

Namun, sebuah jalan tengah sangat bergantung pada kondisi sebuah sektor serta konstelasi para pelakunya, yaitu swasta, kemitraan publik-swasta atau sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Berbagai bentuk swastanisasi dan konstelasi pelaku berikut ini, dimungkinkan:

12 *Club of Rome* adalah sebuah organisasi internasional para ilmuwan yang mencermati permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan ekonomi. *Club of Rome* menjadi terkenal lewat studi yang dipublikasikan tahun 1972 berjudul „Batasan Pertumbuhan“, di mana pertumbuhan penduduk, pencemaran lingkungan hidup, dan akhir dari cadangan sumberdaya dijadikan sebagai agenda pekerjaan rumah global dan nampaknya telah mempengaruhi gerakan lingkungan hidup global.

- Negara terjun dalam persaingan dengan pihak swasta, namun mayoritas sahamnya, masih milik publik (pemerintah pusat). Contohnya, perusahaan Kereta Api Jerman yang sejak 1994 sebagian sahamnya telah diswastanisasi sebagai perusahaan terbatas, yang kini berada dalam persaingan ketat dengan pihak lain.
- Pendelegasian tugas. Artinya, negara memberikan tugas kepada pihak swasta dan (kemudian) membelinya kembali. Percetakan Negara adalah sebuah contoh. Setelah beberapa tahun dikelola swasta, dibeli kembali oleh negara dengan alasan keamanan.
- Kemitraan publik-swasta (PPP). Ini adalah solusi kooperatif, di mana para pelaku, yaitu negara dan swasta bekerjasama.
- Swastanisasi sepenuhnya. Penjualan aset publik sepenuhnya, dimana negara sekedar berfungsi mengatur dan mempengaruhi apa yang terjadi di pasar.

Relasi antara aturan negara dan kebebasan ekonomi, antara keamanan dan inovasi harus selalu terus diperbaharui. Kerangka persyaratannya bisa juga dirubah dalam perjalanan waktu. Swastanisasi dan liberalisasi sektor telekomunikasi bisa secara garis besar dianggap sebagai contoh swastanisasi yang baik. Lewat persaingan, harga menjadi semakin murah, sementara inovasi dalam sektor ini terus meningkat dan lewat swastanisasi uang mengalir ke kas negara. Persyaratan bagi perkembangan ini, berbagai perusahaan bisa memanfaatkan jaringan telepon yang ada. Hal yang baru dimungkinkan secara teknis sejak akhir abad ke-20. Sebelum itu, swastanisasi tidak akan menyebabkan persaingan, karena yang terjadi hanyalah pergantian dari monopoli negara ke monopoli swasta.

Pendulum antara negara dan swasta berayun ke sana ke mari dengan waktu. Pada abad ke-19 dan 20, negara dari waktu ke waktu semakin mengambil tanggung jawab dan persentase negara di hampir semua sektor meningkat. Dalam sektor komunikasi lewat produksi energi hingga ke cabang-cabang industri seperti pada produksi baja dan otomotif yang tadinya berada di tangan negara kemudian sebagian atau sepenuhnya diswastanisasi. Pada perempat terakhir abad lalu, pendulum berayun secara jelas ke arah swastanisasi.

Siapakah motor penggeraknya? Di level internasional, Bank Dunia dan IMF berperan sangat signifikan lewat Konsensus Washington. Dalam arahan kebijakan perekonomian, kedua lembaga ini menuntut mundurnya negara dan menimbulkan gelombang deregulasi dan swastanisasi di seluruh dunia. Seandainya kita mengajarkan kakatua agar bisa mengatakan „swastanisasi“, maka pada tahun 1980an dan 1990an sebagian besar nasehat Bank Dunia dan IMF bisa didelegasikan kepada kakatua, tulis penerima Hadiah Nobel dan mantan Ekonom Kepala Bank Dunia, Joseph E. Stiglitz (Stiglitz 2002: 78-81). Masalah Konsensus Washington, menurut Stiglitz, karena melihat privatisasi demi swastanisasi (Selbstzweck'), bukannya secara teliti diuji dalam sektor dan konteks apa saja hal tersebut cocok dan dengan konstelasi pelaku seperti apa sebuah pertumbuhan berkelanjutan serta distribusi dan pelayanan berkeadilan bisa dicapai. Dampak swastanisasi, tergantung pada sektor ekonomi dan kondisi yang mendominasinya. Swastanisasi bisa saja berhasil di sebuah negara namun gagal di negara lain.

Faktor-faktor berikut ini, termasuk paling relevan terkait dampak swastanisasi:

- Apakah dimungkinkan bersaing dalam sektor tertentu ataukah hanya terjadi pergantian monopoli negara oleh monopoli swasta? Terutama pada apa yang disebut sebagai jaringan industri, hal tersebut hanya bisa terjadi secara bersyarat, misalnya dalam satu jalur perkerataan (api) persaingan hanya mungkin dilakukan secara terbatas. Dengan membangun rel paralel terhadap jalur yang sama, dipastikan akan tidak menguntungkan. Sementara pada rel yang sama, kereta api tidak mungkin saling mendahului. Yang juga masuk dalam industri jaringan, adalah pemasok air, gas dan listrik. Bila sektor ini diswastanisasi, maka para pihak harus diregulasi agar tidak tanpa batas memanfaatkan kekuasaannya atas pasar.
- Terdapatkah bahaya bahwa para konsumen tergesur aksesnya dari barang dan jasa penting? Misalnya, mereka yang tinggal di daerah terpencil, terkait jasa kantor pos atau orang miskin dari jaringan listrik?
- Apakah terdapat kebutuhan perlindungan khusus dari negara? Percetakan negara, misalnya, setelah diswastanisasi total kembali dibeli negara karena dokumen yang diproduksi dan data yang dikelola dianggap sensitif.

Neraca swastanisasi dan nasionalisasi sangat beragam. Hasilnya, sangat tergantung pada jenis sektor dan bentuk kebijakan. Dalam laporan „Batasan Swastanisasi“, diteliti dan dinilai berbagai kasus swastanisasi di Jerman dan negara-negara lain dengan berbagai hasil, positif maupun negatif. Berikut ini, paparan temuan terkait dampak positif yang dilanjutkan paparan tentang risiko swastanisasi sesuai dengan analisa *Club of Rome*.

Ketika swastanisasi menimbulkan persaingan dalam sebuah sektor, maka biasanya berdampak pada perbaikan orientasi konsumen. Perusahaan swasta yang terlibat persaingan sangat bergantung pada kepuasan pelanggan dan untuk bisa bertahan di pasar harus bersikap inovatif serta efisien. Sektor telekomunikasi bisa menjadi contoh bagi sebuah sektor di mana persaingan antar perusahaan swasta memicu inovasi dan perluasan pasar yang sulit dibayangkan terjadi lewat monopoli negara. Perusahaan negara yang memegang hak monopoli karena itu tak perlu terjun dalam kondisi persaingan, cenderung untuk bekerja dengan biaya besar dan relatif tertutup terhadap pembaharuan. Pengurangan biaya produksi serta peningkatan kualitas pelayanan, juga tidak menjadi sebuah keharusan. Sementara sisi buruk perusahaan swasta adalah kecenderungan “menggusur” pelanggan dari kelompok yang tidak menjanjikan keuntungan. Artinya, terdapat kecenderungan untuk „memilih pelanggan“. Pelayanan pengiriman surat kepada mereka yang hidup di daerah terpencil, adalah sebuah contoh tentang hal yang oleh perusahaan swasta dipandang sebagai tidak menguntungkan.

Swastanisasi bisa sangat berguna ketika negara untuk investasi tidak memiliki dana sementara investor swasta (termasuk, swasta internasional) siap untuk menyediakan modal. Hal tersebut seringkali terjadi di negara-negara miskin, di mana sebagian dari barang dan jasa untuk kebutuhan dasar seperti (ekonomi) air minum kemudian diserahkan kepada investor swasta. Namun, perbaikan pelayanan, biasanya hanya diberikan kepada pelanggan kaya sehingga mempertajam ketidakadilan.

Permasalahan yang sering muncul dalam swastanisasi adalah aturan investasi. Di bawah tekanan bertindak, sebuah negara yang tidak berpengalaman terkait persyaratan penjualan aset, bakal menanggung kerugian besar. Berhadapan dengan perusahaan internasional berpengalaman, negara-negara bekas komunis, misalnya, seringkali menyepakati regulasi harga dan kualitas

yang tidak realistis. Di negara-negara tersebut, perusahaan energi kemudian dijual dengan harga jauh di bawah nilai yang layak.

Di atas telah dipaparkan berbagai permasalahan yang bermunculan apabila tidak cukup terjadi persaingan dan terbentuk monopoli swasta, misalnya pada jaringan industri tanpa alternatif (seperti penyediaan air dan jaringan listrik). Hal tersebut tidak menghasilkan inovasi maupun keuntungan. Karena, monopoli swasta, biasanya lebih merugikan dibandingkan monopoli oleh negara.

Risiko selanjutnya adalah sebuah pergeseran risiko dan biaya ekstrem. Setelah penjualan ke investor swasta, yang biasanya terjadi adalah bahwa risiko omset dibebankan kepada negara. Hal ini terjadi, misalnya bila biaya akibat dampak eksternal (seperti dampak ekologis) dibebankan ke pundak publik, sedangkan keuntungan perusahaan tetap menjadi milik swasta. Salah satu contoh adalah biaya dampak energi nuklir.

Permasalahan lainnya terkait investor swasta, bisa berupa ketidakpedulian terhadap kualitas jangka panjang dan aspek keberkelanjutan, yang dalam beberapa kasus berdampak pada rusaknya infrastruktur yang pernah dibangun dengan dana publik. Sebuah contoh terkenal untuk itu adalah kereta api Britania Raya. Setelah swastanisasi, para investor membiarkan memburuknya jaringan rel kereta api hingga terjadi kecelakaan, sebelum jaringan tersebut kembali dinasionalisasi.

Seringkali, kondisi fiskal menjadi alasan utama swastanisasi. Penerimaan dari penjualan aset publik, diharapkan bisa menutup lobang dalam anggaran belanja negara. Hal ini, bisa berdampak positif dalam beberapa bidang. Kota Dresden, misalnya, telah menjual 100.000 apartemen miliknya, sehingga menjadi satu-satunya kota besar di Jerman yang tidak memiliki utang. Penghematan sebesar 80 juta Euro per tahun, yang sebelumnya harus dipakai untuk membayar bunga bank setelah dipotong perbedaan antara sewa dan pemeliharaan, bisa diinvestasikan untuk pengeluaran publik lainnya seperti pendidikan.

Club of Rome mengusulkan sebuah daftar penilaian swastanisasi. Awalnya, alasan-alasan privatisasi harus didiskusikan secara terbuka, untuk menghindari terjadinya swastanisasi hanya demi swastanisasi *an sich*.

Selanjutnya, diperlukan bingkai regulasi yang bisa dipercaya yang mencantumkan secara jelas tujuan bagi investor. Berangkat dari landasan ideologi, pada jasa di mana negara telah melakukannya dengan baik, lewat kontrol secara demokratis oleh para pejabat terkait, tidak perlu ada swastanisasi.

Ketika negara tidak lagi sebagai pemilik, ia harus menanamkan pengaruhnya atas pasar lewat regulasi. Barang publik dan pelayanan kehidupan harus dilindungi. Swastanisasi hal-hal tersebut harus diuji secara cermat. Selain itu, diperlukan pakta sosial untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Kota Dresden yang menjual propertinya dengan mempertahankan hak perlindungan bagi penyewa, menjadi contoh yang baik. Transparansi dalam swastanisasi dan tender yang adil perlu selalu dipantau, baik itu swastanisasi dalam bentuk kerjasama antara negara dan swasta serta jalan ketiga dalam bentuk kemitraan publik-swasta.

7.4. Kebijakan tentang Pekerjaan yang Layak dan Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Oleh Wolfgang Schroeder

Setiap masyarakat memiliki pemahamannya tentang pekerjaan. Begitu pula terdapat berbagai pemikiran tentang pekerjaan serta apa yang dipahami terkait pekerjaan yang layak. Bagaimana pekerjaan saat ini diorganisir? Bagaimana kita bekerja di masa depan? Apa makna pekerjaan dalam kehidupan kita dan untuk kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat? Apakah polarisasi hubungan kerja di dalam sebuah sistem penggajian yang tidak pasti (*prekär*)¹³ dan pengalaman kerja yang membuat frustrasi, di satu sisi, serta upah tinggi dalam situasi pekerjaan berkualitas dan memuaskan di sisi lain, adalah sebuah fenomena sementara? Ataukah semua itu, adalah awal dari sebuah perkembangan yang tidak sehat? Berbagai pertanyaan tersebut memiliki nilai aktualitas yang tinggi. Tanpa memberikan perhatian atasnya, tidak mungkin dikembangkan sebuah perencanaan masa depan, baik yang bersifat individual maupun masyarakat. Mereka yang mewakili asumsi „akhir dari pekerjaan“, tidak lagi terdengar bersuara. Mereka pernah berargumentasi, bahwa dalam sebuah masyarakat moderen, pekerjaan dalam perusahaan dan bekerja penuh waktu, tidak dimungkinkan. Asumsi tersebut, paling tidak terbantahkan lewat kondisi di negara-negara Skandinavia yang mampu mengkombinasikan tingkat pemenuhan lapangan kerja dan standar sosial yang tinggi. Juga di Jerman, setelah usai masa stagnasi ekonomi, tingkat pengangguran bisa menurun dengan cukup signifikan. Meskipun demikian, dengan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang mendalam, isu pengangguran kembali aktual. Meski, pada saat yang sama, ketakutan terhadap „sebuah masyarakat hiperkerja yang fleksibel“, juga menjadi hal yang aktual. Kenyataannya kini, peningkatan produktivitas telah memungkinkan bahwa dibutuhkan pekerjaan yang jauh lebih sedikit untuk menghasilkan Produk Sosial Bruto (BSP) beberapa kali lipat dibandingkan 40 tahun lalu. Meskipun demikian, hal tersebut hanyalah satu sisi dari perdebatan tentang transformasi pekerjaan.

¹³ Kata „*prekär*“ berasal dari Bahasa Latin yang berarti kira-kira „diperoleh lewat permintaan“ atau „tidak pasti“.

► Perubahan Dalam Organisasi Pekerjaan

Meskipun pekerjaan mewarnai keseharian para pekerja, namun topik perdebatan masyarakat terkait pekerjaan hanya terjadi pada tahapan dan konstelasi tertentu. Pekerjaan industrial terkait erat dengan ban berjalan serta menuruti “perintah” mesin. Meskipun organisasi pekerjaan *a la Taylor* - yang ditandai oleh mesin, kontrol dan standarisasi diperhitungkan secara ilmiah - tidak menjadi kenyataan bagi semua, namun hal tersebut bagi banyak pekerja mempengaruhi seluruh kehidupannya, termasuk setelah jam kerja. Sejarah gerakan buruh, terutama sejarah serikat pekerja, tidak dapat dipahami tanpa mencermati organisasi pekerjaan *a la Taylor* dan kondisi pekerja di perusahaan rakasa.

Di samping *Taylorisme*, sejak tahun 1980an, berkembang *Toyotisme*¹⁴, model produksi inovatif yang kedua. Model produksi ini dinamakan sesuai dengan organisasi kerja berbentuk kerja kelompok pada produsen otomotif Toyota, dengan tujuan, menghilangkan kelemahan pembagian kerja yang kaku dan lebih memungkinkan penguatan integrasi pekerja dengan kemampuan secara lebih menyeluruh. Sebuah aspek lain yang juga menjadi perhatian utama kebijakan perusahaan dan serikat pekerja adalah humanisasi pekerjaan pabrik. Perhatian terkait hal tersebut, berdampak pada perbaikan kondisi pekerjaan dengan menghubungkan kualitas pekerjaan dan kehidupan, perbaikan kesehatan pekerja serta secara tak langsung meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Tempat di mana terjadi inovasi organisasi kerja terbaik sering kali adalah pabrik otomotif. Sebuah impuls penting terkait bentuk-bentuk baru kerja kelompok, berasal dari pabrik Volvo di Swedia. Juga penemuan bentuk baru kerja tim independen pada awal 1980an dan berbagai konsep produksi baru lainnya, terkait erat dengan industri oto-

Taylorisme berasal dari pemikiran Frederick Taylor (1856-1915). Tujuannya adalah mengorganisir pekerjaan seefisien mungkin. Untuk itu, ia berpendapat bahwa pekerja memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan berfungsinya mesin, dan mencoba mengatur agenda sebuah pabrik dalam pekerjaan ban berjalan yang mekanistik.

14 Dinamakan menurut model produksi pembuat otomotif Toyota, yang mengaitkan produktivitas produksi massal dengan kualitas penyelesaian akhir perbengkelan.

motif. Dengan kerja kelompok yang memiliki (sebagian) otonomi diharapkan akan tercipta kondisi kerja yang beragam, menarik dan kualifikasi yang lebih kaya di mana para pekerja memiliki ruang gerak individual yang lebih besar terkait beban kerja dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang relevan. Tampaknya, kerja kelompok independen akan menjadi simbol (dunia kerja) baru.

Ketika kerja standar di ban berjalan (Taylorisme) menemukan keterbatasannya, kemunculan wacana terkait perbaikan kondisi kerja yang dalam perkembangannya menuju ke kerja kelompok yang relatif otonom mendekati gambaran ideal sebuah „pekerjaan yang layak“. Dalam perbandingan internasional, proses ini mengalami perluasan besar di Jerman sehingga beberapa pengamat bahkan menyebutnya sebagai jalan spesifik Jerman. Dimensi kualitatifnya berakar pada sistem pendidikan dual dan dikembangkan lewat kerja (magang) kejuruan. Berdasarkan hal tersebut, terjadi harmonisasi aspek humanisasi dan rasionalisasi. Hal yang juga merupakan basis produktif bagi proyek spesialisasi fleksibel dalam industri berorientasi ekspor. Namun, sejak pertengahan 1990an ciri khas kerja industri ini kembali dipertanyakan terkait efisiensi dan kelayakannya, akibat tekanan ekonomi-finansial di satu sisi, serta hasil kerja kelompok yang berbeda-beda, ada yang positif ada pula yang negatif, di sisi lain.

Kini, muncul kekecewaan. Meski kerja kelompok telah berkembang luas, namun harapan terjadinya humanisasi dunia kerja, belum terpenuhi. Bahkan, sebaliknya yang terjadi. Dengan alasan menata kondisi kerja agar menjadi layak, dalam banyak sektor kerja kelompok telah dihapus dan diganti dengan standardisasi kerja. Dengan demikian, dalam dunia industri saat ini terdapat berbagai rejim kerja yang berbeda yang bersaing dalam upaya mencapai produktivitas tertinggi.

Dengan memudarnya citra kerja industri dalam perusahaan besar, muncul jenis pekerjaan baru dalam diskusi publik, yaitu pekerjaan jasa berorientasi ilmiah yang fleksibel. Asumsinya, individu yang bekerja dalam bidang ini memiliki independensi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Mereka bukan pekerja di perusahaan besar, tetapi aktif di perusahaan-perusahaan kecil dengan tanggung jawab yang lebih besar terhadap hasil pekerjaan masing-masing. Semakin meluasnya jenis pekerjaan ini, diprediksi bahwa rejim waktu kerja yang

mapan akan segera berakhir. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah pengurangan waktu kerja melainkan terwujudnya ungkapan “pekerjaan tanpa akhir”. Sebagai contoh, dalam era e-mail dan telepon genggam, diharapkan dari banyak pekerja, bahwa mereka selalu siap dihubungi, juga di luar waktu kerja yang diatur dalam undang-undang. Dalam perdebatan tentang kesempatan dan risiko perkembangan ini, kualifikasi pekerja serta independensinya memainkan peran menentukan. Pada sisi risiko, didiskusikan tentang bentuk-bentuk baru stres, seperti ‘*Burn-out-Syndroms*’- kelelahan psikis akibat pekerjaan. Terjadi kontradiksi antara pengurusan manusia secara psikis dan janji kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak didiskusikan apakah dimungkinkan sebuah *genre* pekerjaan baru, yaitu „pekerja pengusaha” di mana seorang pekerja juga bertanggungjawab atas „*employability*” dirinya sendiri. Sebuah proses perkembangan dari pekerja pemakan gaji proletariat ke pekerja profesional menjadi pekerja pengusaha. Pekerja pengusaha memiliki tiga ciri khas, yaitu kualifikasi individual, otokontrol yang sistematis terhadap pekerjaan serta bahaya penindasan diri sendiri tanpa kondisi pengamanan yang memadai. Karena pekerja pengusaha adalah sebuah konstruksi sosial yang menapaki sebuah tangga perekonomian berbasis pasar, sosiolog Voss/Pongratz memprediksi terbentuknya sebuah relasi kekuasaan baru dalam internal perusahaan. „Kontradiksi antara modal dan kerja dalam perusahaan kapitalistis tidak akan menghilang lewat jenis pekerja pengusaha, melainkan lewat transformasi lewat kontradiksi antara perusahaan berbeda jenis” (Voss/Pongratz 2003: 32). Meskipun, seperti yang secara tepat dikatakan oleh para pengamat bahwa jenis ini sama sekali belum berperan menentukan, namun berbagai ciri khas menonjolnya sudah mulai merambah dunia pekerjaan.

Tantangan terbesar dalam kebijakan menyediakan pekerjaan yang layak saat ini adalah peningkatan tajam dari para pekerja dalam situasi tempat kerja yang buruk. Persoalan paling utama adalah mencari jalan untuk keluar dari kondisi tersebut, yang dari waktu ke waktu, semakin sulit. Bagi proyek sosdem, sebuah pekerjaan yang layak bagi pekerja didasari pada dua alasan berikut. Pertama, kondisi pekerjaan yang buruk, perlu dimanusiakan. Kedua, mereka yang bekerja di sektor ini perlu dibantu untuk keluar dari kondisi buruk untuk selanjutnya bisa mengembangkan diri.

► Pelaku dan Pelaksanaan dalam Pengambilan Keputusan

Dengan berkurangnya arti dari tatanan kerja industrial, berbagai tuntutan baru dimunculkan kepada para pengambil keputusan kebijakan pekerjaan yang layak. Di samping, serikat pekerja dan pengusaha serta negara, yang menjadi pilar penting lainnya dari model Jerman adalah kebijakan pekerjaan yang layak. Prosesnya bergerak di sekitar pertanyaan kunci tentang kondisi pekerjaan hingga tahun 1980an dalam kerangka perundingan antar perusahaan serta berbagai standar resmi. Sejauh ini, di Jerman telah terbentuk sebuah tatanan sosial perusahaan yang relatif berorientasi pada seperangkat aturan antar perusahaan. Model Jerman mengizinkan berbagai konstelasi tindakan internal perusahaan serta sebetuk relasi antar perusahaan yang berbeda. Meskipun demikian, hal tersebut dibatasi oleh bingkai kondisional tertentu. Misalnya, pimpinan perusahaan bidang (kebijakan) personalia harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan dewan pertimbangan perusahaan bersamaan dengan regulasi antar perusahaan. Sebaliknya dewan pertimbangan perusahaan memiliki fungsi mewakili kepentingan pekerja sekaligus ikut bertanggungjawab atas produktivitas dan keberhasilan ekonomi perusahaan. Model keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kerjasama antar pihak, secara gamblang dirumuskan undang-undang perusahaan: „Pengusaha dan Dewan Pertimbangan Perusahaan bekerja sesuai kontrak tarif yang berlaku sambil bersinergi dengan perwakilan serikat pekerja serta perkumpulan pengusaha demi kemakmuran pekerja dan perusahaan (Pasal 2, ayat 1 Undang-Undang Perusahaan).

Model perwakilan kepentingan di Jerman memisahkan secara formal antara dewan pertimbangan perusahaan dan serikat pekerja, yang artinya, anggota dewan pertimbangan tidak harus merupakan anggota serikat pekerja dan serikat pekerja tidak memiliki pengaruh langsung dan otomatis terhadap dewan pertimbangan. Mencermati pemisahan formal tersebut, merupakan prestasi besar model Jerman ketika tidak terjadi persaingan berarti antara dewan pertimbangan dan serikat pekerja. Yang terjadi, lebih berupa sebuah hubungan kerja hari per hari. Sejak enam dekade, lebih dari 70% dewan pertimbangan perusahaan pada saat yang sama juga anggota serikat pekerja dan menempati posisi terhormat dalam serikat pekerja. Sementara dewan pertimbangan harus berperan dalam medan penuh ketegangan antara pekerja, pimpinan perusahaan dan serikat pekerja sebagai „instansi perbatasan“ (Fürstenberg 2000 [1958]), maka pemimpin (eksekutif) perusahaan harus berperan bagai

pendulum antara pekerja, dewan pertimbangan dan kepentingan para pemilik atau apa yang diarahkan pimpinan serta perkumpulan pengusaha. Penyelesaian perbedaan kepentingan antara dewan pertimbangan dan pimpinan perusahaan berorientasi pada kepentingan internal. Konflik terbuka merupakan pengecualian. Ketika muncul konflik terbuka terkait kebijakan pemerataan dan rancangan, seringkali disebabkan oleh adanya keterlibatan pihak luar perusahaan. Dewan pertimbangan dan pimpinan perusahaan, adalah pelaku terpenting dalam arena perhimpunan masing-masing. Mereka memiliki karakter hukum yang berbeda dan, biasanya, juga memiliki sumber daya kekuasaan yang tidak sama, sehingga seringkali bukanlah pelaku yang sama kuat dalam bidang kebijakan terkait relasi industrial. Para pelaku terkait kebijakan tarif bekerja sesuai keputusan organisasi, mengikuti sebetuk kelembagaan yang tumbuh secara historis dan selama ini mendukung modus kooperatif.

➤ Tantangan bagi Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Saat ini, model pembagian kerja internal perusahaan lewat dewan pertimbangan serta keterlibatan terbatas dalam persoalan ekonomi lewat perwakilan dalam perusahaan dan serikat pekerja, dihadapkan pada berbagai tantangan baru.

1. Merenggangnya Perekat antara Aktor Pengambilan Keputusan Bersama.

Kesepakatan pengambilan keputusan antar perusahaan dalam bidang kebijakan lapangan kerja lewat internal perusahaan, sama sekali bukanlah sesuatu yang lumrah terjadi, melainkan sebuah ungkapan dari perilaku dewasa melewati proses sejarah dan perimbangan berbagai kekuatan politik. Kesepakatan tersebut diterapkan ketika pimpinan perusahaan melihat kesempatan menerapkan kebijakan tarif tanpa mengganggu perdamaian dalam perusahaan serta kinerja ekonominya. Hal tersebut, semakin sering dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Bagi proyek sosdem, adalah jelas bahwa keterlibatan para pekerja bukanlah pertanyaan terkait sesuatu yang menguntungkan, tetapi sebuah hak dasar yang tersurat dalam undang-undang tentang keterlibatan yang sama sekali tidak boleh dinegosiasikan.

Berkaitan dengan legitimitas dan akseptansi kebijakan antar perusahaan, hal yang penting adalah bahwa para pelaku perusahaan di tingkat organisasi memperjuangkan pengaruh dan kepentingan masing-masing. Hal tersebut,

biasanya merupakan persyaratan bagi organisasi untuk memperoleh loyalitas dan tanggung jawab karyawannya. Tadisi merupakan perekat penting yang mewarnai dimensi kebijakan relasi industrial. Namun sejak 20 tahun terakhir, hal tersebut dengan cepat telah kehilangan maknanya. Padahal, melewati beberapa dekade mayoritas perusahaan Jerman telah berlaku pembagian tugas yang secara mendasar tidak dipertanyakan dan diwariskan antar gene-rasi. Perekat kultural-tradisional antara perkumpulan dan perserikatan serta para pelaku dalam perusahaan ini, tampaknya mulai kehilangan pengaruhnya. Sejak tahun 1980an terlihat kecenderungan bahwa kekuatan pengaturan oleh perkumpulan telah melemah. Manajemen dan dewan pertimbangan perusahaan seringkali menempuh jalan sendiri-sendiri. Selain itu, dalam mengungkapkan kegelisahan terkait keputusan perkumpulan, tak jarang dengan cara penolakan.

2. Dewan Pertimbangan Perusahaan adalah Mitra Dialog dan Perwakilan Kepentingan semua Pekerja.

Sebuah tantangan besar adalah perwakilan kepentingan yang memiliki hak sejajar bagi pekerja inti dan pekerja pinggiran. Struktur pekerja perusahaan sejak beberapa tahun terakhir telah berubah secara signifikan. Jumlah pekerja jangka pendek, paruh waktu dan pekerja pinjaman telah meningkat tajam. Hal ini bisa menjadi potensi konflik di perusahaan, sekaligus menjadi masalah bagi keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait perundingan dan solidaritas. Dewan pertimbangan mewakili pekerja yang selalu berubah-ubah, memiliki permasalahan yang rumit untuk berhasil mewakili kelompok-kelompok pekerja yang memiliki jaminan kerja yang buruk dibandingkan pekerja tetap.

3. Model Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan, dipertentangkan dengan bentuk-bentuk Tanggung Jawab Perusahaan yang semakin rapuh.

Pada saat diterbitkannya undang-undang perusahaan, para pengambil keputusan perusahaan adalah mereka yang sekaligus menanggung risiko ekonomi. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan oleh dewan pertimbangan, memang dibatasi pada isu organisasi perusahaan dan personalia. Namun lebih dari itu, biasanya juga terlibat dalam mendiskusikan keputusan ekonomi yang bisa saja menjadi keputusan. Akan tetapi, lewat internasionalisasi modal dan pemisahan antara kepemilikan dan pelaksanaan perusahaan, keputusan eko-

nomi telah diformulasi sebelumnya meski bertentangan dengan kepentingan pekerja atau bahkan kepentingan perusahaan itu sendiri, tanpa ada kemungkinan ikut mempengaruhi keputusan tersebut sejak awal. Sebagai pertimbangan terhadap kerugian ekonomi bagi para pekerja, bisa saja dilakukan perundingan lewat dewan pertimbangan, namun akibat perkembangan terbaru dan “arahan berorientasi pasar modal” dari perusahaan, maka model keterlibatan dalam pengambilan keputusan dihadapkan pada tantangan baru.

4. Internasionalisasi Perusahaan menuntut Internasionalisasi Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan.

Satu dari alasan utama pemburukan kondisi pekerjaan, adalah terkait persaingan lokasi atau bahkan tak jarang juga antara pabrik dan perusahaan induknya. Yang terjadi, misalnya, kontrak terkait model mobil baru disebar-kan dalam jaringan perusahaan dan dengan demikian persaingan antar lokasi dimanfaatkan untuk menurunkan biaya upah dan tunjangan sosial. Meskipun demikian, ada pengalaman positif pertama terkait solidaritas. Misalnya, antara cabang-cabang General Motors di Eropa, ketika kantor pusat mengancam akan menutup beberapa lokasi di Eropa. Terbentuknya komite penasehat perusahaan di tingkat Eropa, menjadi lembaga supra nasional pertama yang penting dengan kompetensi yang sangat bermanfaat. Juga dalam hal ini, diperlukan perbaikan hukum untuk memungkinkan perwakilan pekerja memiliki suara yang sejajar. Sebuah gelanggang berikutnya terkait keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan adalah perusahaan terbatas Eropa. Dalam hal ini, juga perlu dikembangkan strategi dan konsep untuk memanfaatkan kesempatan dan meminimalisasi risiko. Logikanya, sederhana. Untuk memastikan hak-hak dalam pengambilan keputusan, diharuskan penguatan kerja sama Eropa dengan melibatkan berbagai pelaku pada semua level. Semakin mulus hal tersebut dilakukan, hasil yang dicapai pun akan semakin memuaskan.

7.5. Perdebatan tentang Upah Minimum

Oleh Claudia Weinkopf¹⁵

Apakah meningkatnya porsi upah rendah adalah sebuah permasalahan, juga sebuah sinyal untuk segera mengambil langkah kebijakan yang dibutuhkan, ataukah merupakan bagian dari strategi yang ampuh dalam upaya mengurangi pengangguran? Jawaban atas pertanyaan ini, di Jerman, selalu menimbulkan polemik. Meskipun banyak studi dalam beberapa tahun terakhir sepakat bahwa porsi penerima gaji rendah di Jerman sudah mencapai jumlah yang signifikan (vgl. z. B. Schäfer 2003, Rhein/Gartner/Krug 2005, Goebel/Krause/Schupp 2005, Eichhorst u. a. 2005), masih saja ada tuntutan untuk memperluas pekerjaan bergaji rendah, bahkan ada suara yang mengusulkan „formalisasi“ pekerjaan bergaji rendah.¹⁶

Secara keseluruhan, perdebatan belakang ini lebih fokus pada pertanyaan apakah tanggung jawab (harus melulu dari) negara untuk menaikkan gaji rendah agar dalam konteks rumah tangga bisa dipastikan bahwa penghasilan yang diperoleh mencukupi kebutuhan pokok, ataukah lewat perundangan dipastikan bahwa perusahaan tidak bisa menekan gaji kurang dari batas yang ditentukan. Berikut ini, dicermati keabsahan dan dikomentari dari perspektif keadilan gender.

Pembela pekerjaan bergaji rendah seringkali mengajukan argumentasi bahwa hal tersebut menjadi semacam batu loncatan bagi pekerjaan bergaji lebih baik. Namun, beberapa studi terbaru meredam optimisme tersebut. Apa yang

15 Makalah ini hampir identik dengan versi berjudul „Debat politis terkait upah rendah dan upah minimum–komentar dari perspektif gender“ sebagai sebuah tulisan dalam buku „Gaji rendah dan minimum. Sebuah analisis dari perspektif gender“, diterbitkan dalam: Friederike Maier, Angela Fiedler (Hg.) (2008), Kondisi menyimpang yang dibakukan. Analisis ekonomi tentang relasi perempuan-lelaki, telah dipublikasikan. Kami berterima kasih kepada penerbit 'edition sigma', Berlin, dan penulis atas ijinnya.

16 Kutipan yang pas untuk itu, sulit ditemukan. Dalam banyak publikasi relevan, tuntutan pekerjaan bergaji rendah sedikit banyak menjadi kontroversi. Sehingga, muncul suara berkaitan dengan keharusan perbaikan standar gaji, ijin bagi gaji yang memperkuat persaingan bagi pekerjaan yang memerlukan kualifikasi rendah, penerapan kembali "ketentuan jarak maksimal antargaji" atau juga mempersempit „kesenjangan pelayanan“ lewat perbandingan dengan AS. Sebagai contoh, adalah kutipan dari evaluasi tahunan 2006/2007 yang dilakukan oleh dewan pertimbangan ahli: „Tetapi, dalam bidang pelayanan publik terbuka banyak kesempatan kerja seperti yang diperlihatkan oleh pengalaman negara-negara, misalnya AS, begitu pula pelajaran dari pengalaman masa lalu Jerman di mana banyak tempat pekerjaan dengan gaji rendah di bidang pelayanan kemudian terhapuskan akibat tingginya gaji“ (Sachver-ständigenrat 2006: 370).

disebut „mobilitas maju“berangkat dari pekerjaan bergaji rendah di Jerman yang beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan (vgl.Rhein/Gartner/Krug 2005). Hal ini, membenarkan penilaian IAQ yang menggunakan data-data dari Lembaga Federal untuk Pekerjaan (disingkat BA): “kami menelusuri pertanyaan berapa besar porsi pekerja penuh waktu yang pada tahun 1988, memperoleh upah rendah yang hingga tahun 2003, berhasil meningkatkan perolehan upah (di atas garis upah minimum). Rata-rata, 34,4 % - atau sekitar sepertiga pekerja yang pada tahun 2003 masih bekerja –berhasil mencapai peningkatan tersebut. Mengacu pada kelompok pekerjaan, porsi ma-sing-masing sangat berbeda.Paling berhasil, adalah kelompok usia muda (di bawah 25 tahun: 62,3 %), mereka yang berkualifikasi tinggi (dengan ijazah akademik: 53,6 %) serta laki-laki (50,4 %), telah berhasil menggapai pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik. Sebaliknya, hanya sekitar seperempat kaum perempuan yang berhasil keluar dari sektor bergaji rendah (27,1 %) (Bosch/Kalina 2007: 45).

Perdebatan paling banyak berkaitan dengan penilaian tentang upah rendah ditilik dari perspektif sosial-politik.Di satu pihak, terdapat argumentasi bahwa pendapatan dari pekerjaan penuh waktu harus bisa memenuhi pengamanan eksistensi. Tidak boleh ada yang miskin meski telah bekerja penuh waktu. Di pihak lain, ada yang mengatakan bahwa pekerjaan bergaji rendah, tidak secara otomatis menyebabkan kemiskinan. Ada pula yang mewakili pendapat bahwa mereka yang melakukan pekerjaan bergaji rendah, hanyalah untuk memperoleh “pendapatan tambahan” (bandingkan, misalnya Brenke/Eichhorst 2007). Dalam dua sudut pandang tersebut, terdapat kesamaan pendapat bahwa upah rendah bagi perempuan tidak terlalu bermasalah. Bagi mereka yang mendukung upah minimum, perhatian utama adalah ayah sebagai kepala keluarga, yang meski telah bekerja penuh waktu (termasuk, melakukan lembur) masih saja berpendapatan rendah, sehingga tidak mampu memberi makan yang cukup dan layak bagi keluarganya. Untuk perempuan, permasalahan tersebut dianggap kurang signifikan, seperti dalam pernyataan berikut. Ketika sangat banyak yang bekerja paruh waktu atau memiliki ‘mini-jobs’, maka kemungkinan besar mayoritasnya adalah perempuan „yang bekerja untuk memperoleh penghasilan tambahan“, yang meski gajinya rendah tidak akan jatuh miskin karena masih ada suami atau partner yang bergaji lebih baik.

Dalam pertimbangan seperti itu, yang benar hanyalah bahwa tidak semua yang bergaji rendah adalah miskin karena dalam rumah tangga terdapat beberapa anggota keluarga yang penghasilan sehingga bila dijumlah mencukupi jumlah di atas batas kemiskinan. Namun, dalam kenyataan kemiskinan terutama disebabkan oleh pengangguran atau karena tidak bekerja, dan hanya sebagian saja diakibatkan oleh penghasilan yang rendah. Meskipun demikian, jumlah orang miskin yang bekerja di sektor bergaji rendah di Jerman pada akhir 1990an mencapai angka 41%, di atas rata-rata UE yang berjumlah 37% (Marlier/Ponthieux 2000). Juga asumsi bahwa perempuan bergaji rendah dalam rumah tangga aman, tampaknya perlu dipertanyakan. Menurut sebuah analisis dari Becker (2006a), yang – memang – hanya mengacu pada mereka yang bekerja penuh waktu, persentase pekerja perempuan dalam konteks rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 19%, hanya sedikit di bawah laki-laki (22%). Selain itu, pengamatan yang terbatas pada konteks rumah tangga, tidak mempertimbangkan bahwa klaim terhadap tunjangan sosial seperti pensiun atau tunjangan pengangguran mengacu pada jumlah penghasilan seseorang. Selain itu, harus dipertimbangkan bahwa pengamanan lewat partner (misalnya, dalam rumah tangga), tidak harus selamanya bersifat stabil. Pengangguran, pisah hidup atau cerai, dapat secara signifikan merubah kondisi sebelumnya.

Mereka yang menentang pemberlakuan undang-undang upah minimum, banyak mengajukan alasan bahwa gaji rendah adalah ungkapan kurangnya produktivitas. Hal tersebut, dinilai akan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja bagi mereka yang memiliki kualifikasi rendah akan semakin memburuk. Namun, di Jerman, mereka yang bergaji rendah sebagian besar bukan karena memiliki kualifikasi rendah, karena sekitar tiga perempat dari mereka memiliki ijazah pendidikan kejuruan atau bahkan memiliki ijazah universitas atau sekolah tinggi. Juga, dampak terhadap lapangan kerja dari upah minimum, banyak diperdebatkan. Di Britania Raya, misalnya, ketika diberlakukan undang-undang upah minimum pada tahun 1999, dicekaskan akan berdampak pada berkurangnya lapangan kerja secara signifikan. Namun ternyata, dalam beberapa tahun terakhir, meski terjadi peningkatan gaji, lapangan kerja bertumbuh dengan pesat (Bosch/Weinkopf 2006a). Pada tahun 2006 di AS, sebanyak 650 ekonom (termasuk, 5 pemegang Hadiah Nobel), menuntut peningkatan upah minimum secara signifikan (Economic Policy Institute 2006). Di sektor ekonomi Jerman, sikap yang lebih kompleks

seperti itu, belum berakar. Mayoritas profesor ekonomi Jerman masih berpegang pada pandangan bahwa gaji rendah per se, memiliki dampak buruk bagi lapangan pekerjaan. President "Centre for European Economy Research" (ZEW), Wolfgang Franz, dalam sebuah pernyataan pers pada tanggal 12. April 2005, mengatakan: „Hampir tak ada satu pun permasalahan makro ekonomi yang memiliki kesepakatan luas, seperti yang terjadi pada pandangan tentang buruknya dampak pemberlakuan upah minimum“ (dikutip dari Schulten 2005: 190).

Argumentasi yang mirip, diajukan oleh Perhimpunan Ekonomi Bavaria (2006: 7) terkait pengalaman dengan upah minimum yang diatur undang-undang di negara lain. Pernyataannya: „Informasi tentang dampak positif di pasar kerja, ternyata tidak ada.“¹⁷

Namun sebenarnya, dampak pekerjaan dengan upah minimal secara teoretis tidak bisa dipastikan. Berbagai studi yang ada, juga memiliki temuan yang berbeda-beda (bandingkan Bosch/Weinkopf 2006b). Untuk itu, sebagai contoh yang sesuai adalah pernyataan *The Council of Economic Advisers* (lembaga AS yang mirip dengan Komite Penilaian perkembangan Makro Ekonomi di Jerman) dalam laporan tahunannya kepada presiden pada tahun 1999: „*The weight of evidence suggests that modest increases in the minimum wage have had little or no effect on employment.*“ (dikutip dari Schulten 2005: 198)

Dalam sebuah evaluasi yang dilakukan Bofinger dkk. (2006), juga ditemui bahwa „studi empirik tidak memperlihatkan gambaran serupa, sehingga tidak bisa diasumsikan bahwa upah minimum secara umum merusak pekerjaan. Hal ini berlaku, paling tidak, sepanjang jumlah yang dipilih cukup moderat.“

Dari sudut pandang kami, dua alasan penting berikut ini mendukung penerapan upah minimum yang diatur dalam undang-undang di Jerman, yaitu

17 Di sini juga ada pernyataan (yang salah) bahwa upah minimum di Britania Raya dan Irlandia, tidak berlaku bagi „mereka yang berkualifikasi rendah“ (lihat: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft 2006: 8). Kenyataannya, di Britania Raya dalam masa penyesuaian kerja, hingga enam bulan di mana kualifikasi ditetapkan, diberikan gaji yang sedikit lebih rendah dari upah minimum (bandingkan: Bosch/Weinkopf 2006b: 36 dst.). Hal ini sama sekali bukan sebuah aturan umum bagi mereka yang berkualifikasi rendah.

menghindari terjadinya dumping upah yang semakin menjalar di Jerman dan – terkait erat dengannya – semakin meningkatnya subsidi penghasilan rendah dalam kerangka pengamanan (kebutuhan) dasar. Meningkatnya jumlah upah rendah di Jerman menunjukkan pada kenyataan bahwa sistem tarif yang cukup lama pada tingkat sektoral diamankan lewat standar minimal, tidak lagi memiliki pengamanan yang ampuh melawan upah rendah dan terendah. Keterkaitan tarif, baik di bagian Timur dan Barat Jerman berlaku surut, meskipun demikian sebagian tarif upah sangatlah rendah (bandingkan Deutscher Bundestag, 2004).

Saat ini, menurut catatan kami, sekitar 5,5 juta pekerja di Jerman memiliki upah lebih rendah dari 7,50 Euro bruto per jam yang merupakan tuntutan serikat pekerja bagi upah minimum yang diatur secara undang-undang (2006). Sekitar dua pertiga darinya adalah perempuan (atau 19,8% dari semua pekerja perempuan di Jerman). Bahkan sekitar 1,9 juta pekerja memperoleh upah kurang dari 5 (lima) Euro (Kalina/Weinkopf 2008). Jumlah tersebut sama dengan 33% rata-rata upah per jam di Jerman. Dengan demikian, upah yang diterima tersebut lebih rendah dibandingkan apa yang diijinkan di AS, di mana – dalam perbandingan internasional, sebenarnya lebih bersifat simbolis – upah minimum resmi dipatok dan dalam waktu dekat akan ditingkatkan secara signifikan.

Di UE, 20 dari 27 negara anggota memiliki undang-undang upah minimum dan negara lainnya memiliki mekanisme untuk menjamin upah yang lebih tinggi dibandingkan di Jerman. Negara-negara seperti Perancis, Belanda, Britania Raya, Belgia, Luxemburg dan Irlandia, pada Musim Gugur 2007, memiliki upah minimum sekitar delapan Euro.

Bahkan di kubu pengusaha, secara tradisional, dengan pengecualian industri properti, campur tangan negara dalam menetapkan upah ditolak. Saat ini, ada tuntutan bagi pemberlakuan standar upah minimum, untuk menghindari terjadinya 'dumping' upah. Yang paling aktif di sini adalah organisasi di bidang pembersihan bangunan dan kerja paruh waktu - dua sektor dengan proporsi mayoritas perempuan di antara para pekerjanya. Sektor pembersihan bangunan, baru-baru ini, dimasukkan dalam undang-undang asuransi pekerja. Artinya, kontrak upah umumnya mengikat dan berlaku sama seperti pekerja asing. Juga, dua dari tiga perkumpulan pengusaha yang besar dalam

sektor paruh kerja menuntut pemberlakuan upah minimum untuk membatasi 'dumping' gaji yang terus meningkat dan untuk memastikan bahwa para pekerja asing yang di masa mendatang diramal akan bakal banyak memasuki pasar kerja Jerman, wajib mengikuti aturan dalam undang-undang pekerja asing untuk menjaga standar minimal yang berlaku (bandingkan, secara lebih lengkap Weinkopf 2006).

Berikut ini, sebuah alasan untuk memformalkan upah minimum terkait dengan landasan pembiayaan sebuah negara sosial. Perusahaan di Jerman selama ini akan mengambil alih jaminan bagi upah minimum, misalnya lewat klaim atas uang pengangguran, bila kebutuhan anggaran rumah tangga tidak bisa tercukupi lewat penghasilan sendiri.

Pada bulan Oktober 2006, menurut data Departemen Tenaga Kerja, terdapat 20,9% pekerja yang membutuhkan tunjangan asuransi dasar (1,117 juta dari total 5,339 juta pekerja). Mayoritas para pekerja penerima tambahan tunjangan untuk memenuhi kewajiban asuransi sosial ini, berjumlah 11,3% atau 601.533 orang dari seluruh penerima tunjangan. Bahkan sebanyak 440.055 orang (atau 8,3% dari penikmat tunjangan dasar) adalah pekerja penuh waktu. Jumlah pekerja perempuan, sebesar 48,4% dari total mereka yang wajib memiliki asuransi sosial, dan 55,1% adalah mereka yang hanya bekerja sewaktu-waktu. Sebuah studi dari Becker (2006b), bahkan menemukan lebih banyak lagi pekerja yang sebenarnya membutuhkan tunjangan negara, meski hingga kini tidak mengklaim hak mereka. Pemberlakuan upah minimum berdasarkan undang-undang tidaklah mubazir, karena selain gaji per jam yang kecil juga ada kerja paruh waktu dan jumlah anggota keluarga yang berperan dalam penghitungannya, sementara beban pendanaannya akan jauh berkurang dan penurunan gaji dengan membebarkannya pada negara bisa dihindarkan.

Penikmat tunjangan dasar, yang hanya sewaktu-waktu bekerja, seringkali dituduh bahwa mereka hanya "mengoptimalkan" penghasilannya lewat kombinasi antara bantuan langsung tunai dan penghasilannya dari bekerja-artinya, sama banyaknya apabila bekerja penuh („Tarnkappen-jobs" –bandingkan dengan Grabowsky dkk, 2006). Padahal, belum dipertimbangkan bahwa meningkatnya 'mini jobs' juga disebabkan oleh perubahan strategi personal dan tidak semata-mata bahwa hal tersebut ditentukan oleh para

pekerja secara bebas. Dalam pekerjaan pembersihan bangunan, misalnya, kewajiban asuransi sosial kerja paruh dan penuh waktu, saat ini, hanya diberikan untuk pimpinan (Hieming dkk, 2005, Jaehrling/Wein-kopf 2006). Sejauh ini, tampaknya juga perlu dipertanyakan apakah perlu dilakukan perubahan penghitungan penghasilan kerja terkait jumlah tunjangan dasar yang selama ini menguntungkan pekerja bergaji lebih tinggi, seperti yang diusulkan oleh Bofinger dkk (2006). Yang paling dirugikan selama ini adalah mereka yang memiliki gaji rendah, (bandingkan dengan IMK-WSI-Arbeitskreis Kombilohn 2007), di mana perempuan secara proporsional paling dirugikan.

Secara umum menurut pandangan kami, standar minimal terkait penggajian di Jerman adalah sebuah keharusan. Dalam berbagai varian yang secara mendasar tersedia, maka dari perspektif perempuan pemberlakuan sebuah upah minimum adalah solusi terbaik karena dengan begitu sebuah batasan gaji yang terikat hukum untuk segala bidang pekerjaan telah ditetapkan. Upah minimum dalam sebuah perundingan, bukanlah sebuah alternatif, paling banter hanya sebagai pendukung karena persyaratan yang diperlukan bagi sebuah kesepakatan yang kemudian memiliki dasar hukum hanya terdapat di beberapa sektor industri, jadi tidak berlaku umum. Sektor-sektor yang porsi pekerja perempuannya sangat besar, seringkali tidak memiliki keniscayaan tersebut.

Yang pasti, upah minimum yang dijamin undang-undang tidak secara otomatis menjadi pengamanan eksistensi perempuan, karena seringkali gaji sebesar 7,50 Euro per jam, tidak mencukupi melihat kenyataan banyak perempuan di Jerman bekerja paruh waktu atau memiliki pekerjaan kecil (mini-job).

8. BERPIKIR KE DEPAN

Buku-buku bacaan sosdem memberikan sebuah orientasi (kompas) terkait pertanyaan dasar sosdem dan butir-butir orientasi dalam berbagai bidang politik. Namun, buku-buku bacaan itu tidak bisa dan tidak ingin memberikan jawaban yang berlaku final dan abadi. Jalan sosdem –sebagai ide dan sebagai langkah politik–harus selalu dipertimbangkan ulang, disesuaikan dan dipikirkan kembali, agar berhasil.

Juga sebagai kesimpulan, buku ini sepakat dengan himbauan tadi dan karena itu terutama mengundang para pembaca untuk terus berpikir, bagaimana kebijakan ekonomi sosdem bisa berhasil dan, terutama, apa saja tantangannya dalam abad ke-21.

Saat ini, tantangan utama dari kebijakan ekonomi sosdem adalah, memasyarakatkan sebuah keseimbangan baru antara negara dan pasar. Program Hamburg dari Partai Sosdem Jerman (SPD), dalam kaitan ini, menawarkan sebuah sentuhan penting:

„Bagi kami, pasar adalah sebuah keniscayaan dan sebagai alat, lebih unggul dibandingkan bentuk koordinasi ekonomi lainnya. Namun, pasar yang dibiarkan tanpa koordinasi, buta secara sosial dan ekologis. Ia sendiri tidak mampu menyediakan layanan publik secara layak. Agar pasar bisa mengembangkan sisi positifnya, diperlukan aturan dari sebuah negara yang mampu memberikan sanksi berupa undang-undang dan pembentukan harga yang adil.“ (Program Hamburg 2007: 17)

Mengatasi berbagai tantangan baru, sosdem harus selalu berkembang. Dengan kesadaran terkait landasannya dan pandangan yang jernih terhadap realitas, hal tersebut bisa dilakukan.

Hal itu juga berlaku bagi kebijakan ekonomi sosdem. Buku ini ingin memperjelas bahwa dari nilai-nilai dasar sosdem, dikonkretkan dalam Pakta Hak Dasar PBB, muncul sebuah profil ekonomi-politik sosdem yang jelas. Sebuah kompas bagi kebijakan ekonomi yang moderen, terikat dengan prinsip-prinsip pertumbuhan, keseimbangan sosial dan kelestarian alam (*sustainability*).

DAFTAR PUSTAKA

Jennifer Amyx (2004), *Japan's Financial Crisis: Institutional Rigidity and Reluctant Change*, Princeton.

Masahiko Aoki und Gary R. Saxonhouse (2000), *Finance, Governance, and Competitiveness in Japan*, Oxford.

Masahiko Aoki, Gregory Jackson, Hideaki Miyajima (Hg.) (2007), *Corporate Governance in Japan: Institutional Change and Organizational Diversity*, Oxford.

Ernst Baier u. a. (2002), *Lebens- und Arbeitsbedingungen des Industrieproletariats*, Duisburg.

Irene Becker (2006a), Mindestlöhne – ein Instrument (auch) zur Förderung der Gender-Gerechtigkeit?, in: Gabriele Sterkel, Thorsten Schulten, Jörg Wiedemuth (Hg.), *Mindestlöhne gegen Sozialdumping. Rahmenbedingungen – Erfahrungen – Strategien*, Hamburg, S. 61–79.

Irene Becker (2006b), Armut in Deutschland: Bevölkerungsgruppen unterhalb der ALG-II-Grenze. Johann-Wolfgang-Goethe-Universität. Arbeitspapier des Projektes „Soziale Gerechtigkeit“, Nr. 3, Frankfurt am Main.

Peter Bofinger (2007), *Grundzüge der Volkswirtschaftslehre*, 2. Aufl., München.

Peter Bofinger, Martin Dietz, Sascha Genders, Ulrich Walwei (2006), Vorrang für das reguläre Arbeitsverhältnis: ein Konzept für die Existenzsichernde Beschäftigung im Niedriglohnbereich. Gutachten für das Sächsische Ministerium für Wirtschaft und Arbeit (SWMA), o. O.

Gerhard Bosch und Thorsten Kalina (2007), Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland, in: Gerhard Bosch, Claudia Weinkopf (Hg.), *Arbeit für wenig Geld: Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland*, Frankfurt am Main, S. 20–105.

Gerhard Bosch und Claudia Weinkopf (2006a), Mindestlöhne in Großbritannien – ein geglücktes Realexperiment, in: *WSI-Mitteilungen*, 3, S. 125–130.

Gerhard Bosch und Claudia Weinkopf (unter Mitarbeit von Thorsten Kalina) (2006b), *Gesetzliche Mindestlöhne auch in Deutschland? Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Gesprächskreis Arbeit und Qualifizierung*, Bonn.

Karl Brenke und Werner Eichhorst (2007), Mindestlohn für Deutschland nicht sinnvoll, in: *DIW-Wochenbericht*, 9, S. 121–131.

Bundesagentur für Arbeit (2006), *Beschäftigung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen*, Oktober 2006, Nürnberg.

Bündnis 90/Die Grünen (2002), *Die Zukunft ist Grün, Grundsatzprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN*, beschlossen auf der Bundesdelegiertenkonferenz am 15.–17. März 2002 in Berlin.

Hans Martin Bury und Thomas Schmidt (1996), *Das Bankenkartell: die Verflechtung von Geld, Macht und Politik*, München.

CDU (2007), *Freiheit und Sicherheit. Grundsätze für Deutschland, Grundsatzprogramm der CDU*, beschlossen auf dem 21. Parteitag am 3.–4. Dezember 2007 in Hannover.

Hansgeorg Conert (2002), *Vom Handelskapital zur Globalisierung. Entwicklung und Kritik der kapitalistischen Ökonomie*, 2., überarbeitete Aufl., Münster.

Herman Daly und John Cobb (1989), *For the Common Good*, Boston.

Michael Dauderstadt (2007), *Aufschwung 2007: die Verantwortung der Lohnpolitik*, WISO-direkt, Analysen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, Bonn.

Helmut Demes (1998), Arbeitsmarkt und Beschäftigung, in: *Deutsches Institut für Japanstudien (Hg.), Die Wirtschaft Japans. Strukturen zwischen Kontinuität und Wandel*, Berlin, S. 135–164.

Deutscher Bundestag (1998), *Abschlussbericht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“*, Deutscher Bundestag: Drucksache 13/11200 vom 26. Juni 1998, Berlin.

Deutscher Bundestag (2004), *Wandel der Arbeitswelt und Modernisierung des Arbeitsrechts*, Deutscher Bundestag: Drucksache 15/2932, Berlin.

Die Linke (2007), *Programmatische Eckpunkte. Programmatisches Gründungsdokument der Partei Die Linke, beschlossen durch die Parteitage von WASG und Linkspartei*. PDS am 24. und 25. Mai 2007 in Dortmund.

Daniel Dirks und Silke-Susann Otto (1998), *Das „japanische Unternehmen“*, in: *Deutsches Institut für Japanstudien (Hg.), Die Wirtschaft Japans. Strukturen zwischen Kontinuität und Wandel*, Berlin, S. 211–244.

Ronald Dore (2000), *Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism: Japan and Germany versus the Anglo-Saxons*, Oxford.

Ronald Dore, William Lazonick, Mary O'Sullivan (1999), *Varieties of Capitalism in the Twentieth Century*, in: *Oxford Review of Economic Policy*, vol. 15, S. 102–120.

Economic Policy Institute (2006), *EPI on the Minimum Wage*, EPI News, October 27, 2006, Washington, D. C.

Christoph Egle (2006), *Deutschland: der blockierte Musterknabe*, in: *Thomas Meyer (Hg.), Praxis der Sozialen Demokratie*, Wiesbaden, S. 273–326.

Werner Eichhorst, Hermann Gartner, Gerhard Krug, Thomas Rhein, Eberhard Wiedemann (2005), *Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland und im internationalen Vergleich*, in: *Jutta Allmendinger, Werner Eichhorst, Ulrich Walwei (Hg.), IAB Handbuch Arbeitsmarkt. Analysen, Daten, Fakten*, Nürnberg, S. 107–142.

Friedrich Engels (1988), *Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (Anti-Dühring)*, Karl Marx und Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), Band 27, Berlin.

FDP (1997), *Wiesbadener Grundsätze. Für die liberale Bürgergesellschaft*, beschlossen auf dem Bundesparteitag der F.D.P. am 24. Mai 1997 in Wiesbaden.

Milton Friedman (1973), *Capitalism and Freedom*, Chicago.

Bacaan lanjutan:
Sebuah pilihan kometer literatur lanjutan ditawarkan oleh ' Internetpräsenz der Akademie für Soziale Demokratie': www.fes-soziale-demokratie.de/materialien Studi aktual ekonomi-politik dan analisis, dapat ditemui dalam publikasi divisi Ekonomi- dan Sosialpolitik dari Friedrich-Ebert-Stiftung: www.fes.de/wiso

Thomas L. Friedman (2005), *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*, New York.

Friedrich Fürstenberg (2000 [1958]), *Der Betriebsrat als Grenzinstitution*, in: Friedrich Fürstenberg (Hg.), *Arbeitsbeziehungen im gesellschaftlichen Wandel*, München/Mering.

Sigmar Gabriel (2008), *Links neu denken. Politik für die Mehrheit*, München.

William A. Galston (2008), *How Big Government Got Its Groove Back*, in: *American Prospect*, vol. 19, no. 6, Washington, D. C., S. 23–26.

Heide Gerstenberger (2006), *Die subjektlose Gewalt. Theorie der Entstehung bürgerlicher Staatsgewalt*, 2. Aufl., Münster.

Robert Gilpin (2001), *Global Political Economy: Understanding the International Economy Order*, Princeton/Oxford.

Jan Goebel, Peter Krause, Jürgen Schupp (2005), *Mehr Armut durch steigende Arbeitslosigkeit*, in: *DIW-Wochenbericht*, 10, S. 725–730.

Fabian Grabowsky, Alexander Neubacher, Michael Sauga (2006), *Die große Flut. Dank Hartz-Reformen haben Hunderttausende Niedrigverdiener neuerdings Anspruch auf staatliche Hilfe – darunter auch viele Selbstständige*, in: *Der Spiegel*, 19, S. 66–68.

René Haak (Hg.) (2006), *The Changing Structure of Labour in Japan*, London.

Peter A. Hall und David Soskice (Hg.) (2001), *Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, New York/Oxford.

Hamburger Programm (2007), *Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands*, beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD am 28. Oktober 2007.

Volker Happe, Gustav Horn, Kim Otto (2009), *Das Wirtschaftslexikon. Begriffe. Zahlen. Zusammenhänge*, Verlag J.H.W. Dietz Nachf., Bonn (erscheint im Frühjahr 2009).

Anke Hassel (2006), *Die Schwächen des deutschen Kapitalismus*, in: Volker Berghahn, Sigurt Vitols (Hg.), *Gibt es einen deutschen Kapitalismus? Die soziale Marktwirtschaft im Weltsystem*, Frankfurt am Main, S. 200–214.

Volker Hauff (Hg.) (1987), *Unsere gemeinsame Zukunft: der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung*, Greven.

Gustav W. Heinemann (1972), *Grußwort auf dem IG-Metall-Kongress „Qualität des Lebens“ am 11. April 1972 in Oberhausen*, in: IG Metall (Hg.), *Aufgabe Zukunft*, Band 1: *Qualität des Lebens. Beiträge zur vierten internationalen Arbeitsstagung der Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik Deutschland*, 11. bis 14. April 1972 in Oberhausen, Frankfurt am Main, S. 14–17.

Michael Heinrich (2004), *Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung*, 1. Aufl., Stuttgart.

Bettina Hieming, Karen Jaehrling, Thorsten Kalina, Achim Vanselow, Claudia Weinkopf (2005), *Stellenbesetzung im Bereich „einfacher“ Dienstleistungen. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit*, Nr. 550, Berlin.

Lew Hinchmann (2006), *USA: Residual Welfare Society and Libertarian Democracy*, in: Thomas Meyer (Hg.), *Praxis der Sozialen Demokratie*, Wiesbaden, S. 327–373.

Gustav Horn (2005), *Die deutsche Krankheit: Sparwut und Sozialabbau*, München.

IMK-WSI-Arbeitskreis Kombilohn (2007), *Was tun im Niedriglohnbereich? Eine kritische Auseinandersetzung mit einem neueren Kombilohnkonzept*, IMK-Report, Nr. 18, Düsseldorf.

Thorsten Kalina und Claudia Weinkopf (2008), *Neue Berechnung des IAQ zu Niedriglöhnen in Deutschland. 2006 arbeiteten 5,5 Millionen Beschäftigte für Bruttostundenlöhne unter 7,50 €* Manuskript, Gelsenkirchen.

Paul Kevenhörster, Werner Pascha, Karen Shire (2003), *Japan: Wirtschaft – Gesellschaft – Politik*, Wiesbaden.

John Maynard Keynes (1966), *Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes*, München/Leipzig.

James R. Lincoln und Michael L. Gerlach (2004), *Japan's Network Economy: Structure, Persistence, and Change*, Cambridge.

Eric Marlier und Sophie Ponthieux (2000), *Low-Wage Employment in EU Countries*, European Commission, Statistical Office: *Statistics in Focus/Population and Social Conditions*, 11/2000, Luxemburg.

Karl Marx (1991), *Kritik der politischen Ökonomie*, Karl Marx und Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), Band 10, Berlin.

Karl Marx und Friedrich Engels (1987), *Manifest der Kommunistischen Partei*, Berlin (West).

Donella Meadows u. a. (1972), *Die Grenzen des Wachstums – Berichte des Club of Rome zur Lage der Menschheit*, München.

Wolfgang Merkel u. a. (2003), *Defekte Demokratie*, Band 1: *Theorie*, Opladen.

Thomas Meyer (Hg.) (2006), *Praxis der Sozialen Demokratie*, 1. Aufl., Wiesbaden.

Thomas Meyer und Nicole Breyer (Mitarbeiter) (2005), *Die Zukunft der Sozialen Demokratie*, Bonn.

Alfred Müller-Armack (1947), *Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft*, Hamburg.

Joachim Münch und Mikiko Eswein (1998), *Bildung, Öffentlichkeit und Arbeit in Japan. Mythos und Wirklichkeit*, Berlin.

Werner Pascha (Hg.) (2004), *Systemic Change in the Japanese and German Economies. Convergence and Differentiation as a Dual Challenge*, London/New York.

Matthias Platzeck, Peer Steinbrück, Frank-Walter Steinmeier (2007), *Auf der Höhe der Zeit*, Berlin.

Hans J. Pongratz und G. Günther Voss (2003), *Arbeitskraft-Unternehmer: Erwerbsorientierung in entgrenzten Arbeitsformen*, Berlin.

Robert Reich (2008), *Superkapitalismus. Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt*, Frankfurt am Main/New York.

Thomas Rhein, Hermann Gartner, Gerhard Krug (2005), *Niedriglohnbereich: Aufstiegschancen für Geringverdie-*

Bacaan lanjutan:

Latarbelakang, tulisan dan material terkait nilai-nilai dan akar Sosialdemokrasi, terdapat dalam Modul „Soziale Demokratie“ di Online-Akademie Friedrich-Ebert-Stiftung: www.fes-online-akademie.de Pengantar terhadap semua pertanyaan ekonomi yang penting, terdapat dalam „Das Wirtschaftslexikon. Begriffe. Zahlen. Zusammenhänge“ von Volker Happe, Gustav Horn und Kim Otto (siehe S. 18).

ner verschlechtert. IAB-Kurzbericht vom 10. März 2005, Nürnberg.

Jörg Rössel (2005), *The Semantic of Social Structure: An International Comparison*, Köln.

Dani Rodrik (1997), *Has Globalization Gone Too Far?*, Washington, D. C.

Sachverständigenrat (2005), *Die Chance nutzen – Reformen mutig voranbringen*, Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2005/06, Wiesbaden.

Sachverständigenrat (2006), *Widerstreitende Interessen, ungenutzte Chancen*, Sachverständigenrat zur Begutach-

tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 2006/07, Wiesbaden.

Claus Schäfer (2003), *Effektiv gezahlte Niedriglöhne in Deutschland*, in: *WSI-Mitteilungen*, 56, S. 420–428.

Fritz W. Scharpf (1987), *Sozialdemokratische Krisenpolitik in Europa*, Frankfurt am Main/New York.

Manfred G. Schmidt (2000), *Immer noch auf dem mittleren Weg? Deutschlands politische Ökonomie am Ende des 20. Jahrhunderts*, in: Roland Czada, Helmuth Wollmann (Hg.), *Von der Bonner zur Berliner Republik*, Wiesbaden, S. 491–513.

Thomas Schulten (2005), *Gesetzliche Mindestlöhne in Europa. Institutionelle Regelungen und ökonomische Konsequenzen*, in: Eckhard Hein (Hg.), *Löhne, Beschäftigung, Verteilung und Wachstum*, Marburg, S. 185–208.

Joseph A. Schumpeter (1950), *Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie*, München.

Amartya Sen (1999), *Development as Freedom*, New York.

Hans-Werner Sinn (1986), *Risiko als Produktionsfaktor*, in: *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, München, S. 557–571.

Adam Smith (1974), *Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen*, München.

Robert Solow und Charles Wyplosz (2007), in: Ronald Schettkat, Jochem Langkau (Hg.), *Aufschwung für Deutschland. Plädoyer international renommierter Ökonomen für eine neue Wirtschaftspolitik*, Bonn, S. 35–47.

Joseph E. Stiglitz (2002), *Die Schatten der Globalisierung*, Berlin.

Wolfgang Streeck (1995), *German Capitalism. Does it exist? Can it survive?*, Köln.

Wolfgang Streeck und Kozo Yamamura (Hg.) (2003), *The End of Diversity? Prospects for German and Japanese Capitalism*, Ithaca, New York.

Simon Vaut (2007), *Hoffnung wagen*, Berliner Republik 3/2007, Berlin, S. 78–83.

Simon Vaut (2008), *Amerikas Hoffnung*, Berliner Republik 1/2008, Berlin, S. 79–81.

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (2006), *Mindestlöhne – Gefahr für den Arbeitsmarkt. Argumentation.*

Die Stimme der Wirtschaft vom 14.3.2006, München.

Gert G. Wagner und Wolfgang Wiegard (2002), *Volkswirtschaftliche Forschung und Politikberatung*, in: Irene Becker u. a. (Hg.), *Soziale Sicherung in einer dynamischen Gesellschaft*, Frankfurt am Main, S. 770–788.

Klaus Peter Weinert (2008), *Auf lange Sicht sind wir alle tot. Die Wirtschaftsprognosen des John Maynard Keynes*, Deutschlandradio Kultur, Radiofeuilleton Kalenderblatt, Sendung vom 5. Juni 2008, URL: (zuletzt eingesehen am 8. Januar 2009).

Claudia Weinkopf (2006), *Mindestbedingungen für die Zeit-arbeitsbranche? Expertise im Auftrag des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ)*. Institut Arbeit und Technik, Gelsenkirchen.

Ernst Ulrich von Weizsäcker (2006), *Grenzen der Privatisierung*, Stuttgart.

Steward Wood (2001), *Business, Government, and Patterns of Labour Market Policy in Britain and the Federal Republic of Germany*, in: Peter A. Hall, David Soskice (Hg.), *Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage*, New York/Oxford, S. 247–274.

Duabelas kata kunci penting:

1. *Kesamaan posisi* (S. 76, S. 145 ff.)
2. *Globalisasi* (S. 49 ff., 103 ff.)
3. *Hak-hak dasar* (S. 56 ff.)
4. *Nilai-nilai dasar* (S. 53 ff.)
5. *Kerja baik* (S. 11, S. 137 ff.)
6. *Kapitalisme* (S. 17 ff., 23 ff., S. 28 ff., S. 40 ff., S. 44 ff.)
7. *Ekonomi pasar* (S. 40 ff., S. 44 ff., S. 47 ff.)
8. *Gaji minimum* (S. 145 ff.)
9. *Mitbestimmung* (S. 37 ff., S. 77, S. 137 ff.)
10. *Kelestarian* (S. 68 ff.)
11. *Keseimbangan sosial* (S. 65 ff.)
12. *Pertumbuhan* (S. 63 ff.)

PARA PENULIS

Jochen Dahm (*1981) adalah staf ahli di Akademi Politik Friedrich-Ebert-Stiftung. Ia menyelesaikan studi Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi dan Hak Publik di Münster dan Málaga.

Dr. Michael Dauderstädt (*1947) bekerja sejak 1980 di Friedrich-Ebert-Stiftung. Sejak 2006, ia mengepalai Bidang Kebijakan Ekonomi dan, sebelumnya antara lain sebagai analis kebijakan internasional. Ia kuliah matematika, ekonomi dan kebijakan ekonomi di Aachen, Paris und Berlin.

Peter Franz (*1953), sejak 1988 bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup, Perlindungan Alam dan Keamanan Reaktor Nuklir. Di tempat bekerjanya di Berlin, sejak 1999 ia adalah Kepala Referat „Lingkungan dan Ekonomi, Inovasi dan Lapangan Kerja, Audit Lingkungan“. Ia kuliah Ekonomi Makro dan Ilmu Administrasi.

Tobias Gombert (*1975) adalah anggota dewan pertimbangan perusahaan penyelenggara seminar. Ia juga aktif sebagai pelatih dalam seminar-seminar komunikasi dan teori. Pada 2003–2005 ia adalah wakil Pengurus Pusat (PP) Juso, dan pada 2005–2007, anggota PP Juso. Pada masa tersebut, ia ikut membangun Sekolah Perkumpulam Juso. Sejak 2007, ia adalah pelatih di Akademi Sosialdemokrasi. Ia adalah penulis utama kumpulan karangan „Landsan Sosialdemokrasi“. Karya ilmiahnya tentang Jean-Jacques Rousseau, terkait teori Marxis dan Filsafat Moral.

Dr. Erik Gurgsdies (*1944), sejak 1993 adalah kepala kantor cabang Friedrich-Ebert-Stiftung di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern. Ia menyelesaikan studi ekonomi dan sosiologi. Setelah itu, menjadi dosen ekonomi di Heimvolkshochschulen Bergneustadt dan Ahrensburg serta di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Politik di Hamburg.

Dr. Christian Krell (*1977) adalah staf Friedrich-Ebert-Stiftung, bertanggung jawab untuk Akademi Sosialdemokrasi. Ia menyelesaikan studi Ilmu Politik, Sejarah, Ekonomi dan Sosiologi di Universitas Siegen dan University of York. Pada tahun 2007, ia menyelesaikan program S3 dalam Ilmu Politik tentang Politik Eropa dari SPD, Labour Party dan Parti Socialiste.

Dr. Florian Mayer (*1975) bekerja di Kemeterian Lingkungan Hidup, Perlindungan Alam dan Keamanan Reaktor Nuklir, bagian „Lingkungan Hidup dan Ekonomi, Inovasi dan Lapangan Kerja, Audit Lingkungan“, dan dosen honorer di Universitas Heidelberg. Ia adalah tamatan Ilmu Ekonomi dan Sosial.

Prof. Dr. Werner Pascha (*1957), sejak 1992 adalah Profesor untuk Ekonomi Asia Timur / dan Jepang dan Korea di Universitas Duisburg-Essen. Ia kuliah di London (LSE), Nagoya/Jepang dan terutama di Freiburg, Breisgau, Ilmu Ekonomi makro, di mana ia menyelesaikan S3 dan habilitasi.

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder (*1960), sejak 2006 adalah Professor untuk sistem politik Republik Federasi Jerman (Jerman Barat)/Kenegaraan dalam transformasi di Kassel. Sebelumnya, ia menjabat berbagai posisi pimpinan pusat IGMetall dan mengajar serta meneliti di Frankfurt / Main, Darmstadt dan Harvard. Ia juga menyelesaikan studi Ilmu Politik di Marburg, Wien, Tübingen dan Frankfurt / Main Politikwissenschaft serta menyelesaikan S3 di Gießen.

Stefan Tidow bekerja di bagian „Lingkungan Hidup dan Ekonomi, Inovasi dan Lapangan Kerja, Audit Lingkungan“ di Kemeterian Lingkungan Hidup, Perlindungan Alam dan Keamanan Reaktor Nuklir. Saat ini, ia cuti dan aktif di parlemen pada Fraksi Bündnis 90/Die Grünen.

Simon Vaut (*1977), meraih gelar doktor dampak reformasi bursa lapangan kerja di Jerman. Sebagai pelatih di Akademi Sosialdemokrasi ia mengepal seminar tentang Ekonomi dan Globalisasi. Ia pernah bekerja di ‘Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft’ (Institut Penelitian Sosial dan Ekonomi Sosial), Hertie School of Governance serta OECD.

Dr. Claudia Weinkopf (*1963) adalah wakil direktur dan ketua dari divisi penelitian „Flexibilität und Sicherheit“ (FLEX) di ‘Institut Arbeit und Qualifikation’ (Institut Pekerjaan dan Kualifikasi) di Universitas Duisburg-Essen. Ia menyelesaikan studi, termasuk meraih S3, tentang Ekonomi Makro dan Sosiologi di Dortmund.

Kami ingin mengundang Anda terlibat dalam diskusi sosdem. Akademi Sosialdemokrasi dari Friedrich-Ebert-Stiftung, menawarkan tujuh modul seminar yang mewacanakan nilai-nilai dasar dan lahan praktek untuk proyek sosdem:

Landasan Sosialdemokrasi

Ekonomi dan Sosialdemokrasi

Negara Kesejahteraan dan Sosialdemokrasi

Globalisasi dan Sosialdemokrasi

Eropa dan Sosialdemokrasi

Pluralisme Budaya dan Sosialdemokrasi

Negara, Masyarakat Sipil dan Sosialdemokrasi

www.fes-soziale-demokratie.de

Politik butuh orientasi yang jelas. Hanya dia yang bisa secara jelas mengungkapkan tujuan-tujuan kegiatannya, mencapainya dan membuat yang lain ikut bersemangat. Karena itu, buku bacaan „Ekonomi dan Sosial Demokrasi“ berisi: Bagaimana sebuah kebijakan ekonomi Sosial Demokrasi yang moderen, terkait nilai, bisa berhasil? Apa saja prinsip-prinsip yang menjadi landasannya? Bagaiman ia bisa diterapkan dalam praksis?

Topik buku-buku bacaan Sosial Demokrasi berorientasi pada seminar-seminar dari Akademi Sosial Demokrasi. Akademi Sosial Demokrasi memberikan konsultasi dan peningkatan kualifikasi bagi mereka yang aktif dan tertarik secara politis.

Informasi lanjut tentang Akademi: www.fes-soziale-demokratie.de

ISBN 978-602-8866-08-8



9 786028 886608